



LAPORAN EVALUASI PELAKSANAAN RKPD DAN RENJA PERANGKAT DAERAH PROVINSI NTB TRIWULAN IV TAHUN 2019

BAPPEDA PROVINSI NTB
2020

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanallahuwata'ala, Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmat dan ridha-Nya sehingga dokumen Laporan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Provinsi NTB pada Triwulan IV tahun 2019 ini dapat diselesaikan dengan baik.

Laporan Evaluasi Pelaksanaan RKPD disusun sebagai upaya pemerintah provinsi NTB dalam melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan untuk mengetahui tingkat capaian program dan kegiatan tahunan yang telah ditetapkan dalam RKPD Provinsi NTB Tahun 2019 maupun lima tahunan sebagaimana telah ditetapkan dalam Renstra Perangkat Daerah Provinsi NTB tahun 2019-2023, dan RPJMD Provinsi NTB tahun 2019-2023. Hal ini dilakukan sebagai tindak lanjut amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Dalam RKPD Provinsi NTB Tahun 2019, terdapat 220 program dan 1.171 kegiatan yang dilaksanakan oleh 46 perangkat daerah yang diantaranya 159 program prioritas daerah. Berdasarkan hasil evaluasi, rata-rata capaian kinerja program dari 46 Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Provinsi NTB mengalami kenaikan yang cukup signifikan dibandingkan triwulan sebelumnya. Pada Triwulan III lalu, capaian kinerja hanya mencapai 65,88 persen, sedangkan pada triwulan IV saat ini telah mencapai 99,80 persen dengan kategori sangat tinggi. Rata-rata capaian kinerja keuangan juga mengalami kenaikan hingga mencapai 90,50 persen (Kategori Tinggi) atau lebih tinggi dibandingkan dengan triwulan III yang hanya mencapai 58,14 persen (Kategori Rendah). Adapun kontribusinya terhadap pencapaian indikator kinerja pembangunan daerah sesuai RPJMD Provinsi NTB 2019-2023, terdapat 15 indikator yang ditetapkan sebagai indikator kinerja utama (IKU) dan 90 indikator kinerja daerah. Berdasarkan hasil evaluasi diketahui bahwa dari 15 indikator IKU provinsi NTB, 10 indikator sudah dapat diukur tingkat capaiannya sedangkan 5 indikator masih menunggu rilis resmi dari lembaga terkait. Dari hasil tingkat capaian menunjukkan bahwa terdapat 7 indikator atau 46,67 persen yang sudah sesuai bahkan melampaui target diantaranya Indeks Risiko Bencana, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH), pertumbuhan ekonomi tanpa pertambahan bijih logam, inflasi, indeks kriminalitas. Sementara persentase balita *stunting* diperkirakan menurun dari angka 33,49 persen tahun 2018 sesuai hasil pendataan sementara sebesar 25,5 persen dari data yang masuk 67 persen. Sedangkan capaian terhadap 90 indikator kinerja daerah pemerintahan provinsi NTB tahun 2019 secara keseluruhan terdapat 54 indikator tercapai atau 60 persen, 24 indikator atau 26,67 persen belum memenuhi target, dan masih terdapat 12 indikator atau 12,33 persen belum dapat dihitung dan atau menunggu rilis resmi dari lembaga terkait.

Demikian laporan ini disusun dalam rangka mewujudkan akuntabilitas kinerja serta sebagai bahan perencanaan selanjutnya dalam pembangunan di NTB. Ucapan terimakasih disampaikan kepada semua pihak yang telah bersedia meluangkan waktu dan tenaga serta dukungan dan kontribusinya terhadap penyelesaian laporan ini. Penyusunan laporan ini tentu masih memiliki kekurangan, dan Bersama ini diharapkan saran dan kritik yang membangun dalam rangka penyempurnaan di masa mendatang sehingga dapat lebih baik dan informatif.

Mataram, Januari 2020
GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

Dr. H. ZULKIEFLIMANSYAH, S.E., M.Sc.

DAFTAR ISI

BAB I : PENDAHULUAN 1

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Landasan Hukum 2

1.3 Tujuan 3

1.4 Sasaran 3

1.5 Sistimatika Penulisan Laporan 3

BAB II : PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN TAHUN 2019 5

2.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan dalam RPJPD 2005-2025 5

2.2 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2019 24

 a) Prioritas dan Sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2019 25

 b) Prioritas dan Sasaran Pembangunan Provinsi NTB Tahun 2019 27

BAB III : PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN TAHUN 2019 28

BAB IV : HASIL EVALUASI RKPD DAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2019 61

4.1 Rekapitulasi Hasil Capaian Kinerja dan anggaran Perangkat Daerah pada Triwulan IV Tahun 2019 61

4.2 Permasalahan 63

BAB V : KESIMPULAN DAN REKOMENDASI	72
5.1 Kesimpulan	72
5.2 Rekomendasi	73

LAMPIRAN

BAB I : PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah daerah diwajibkan menyusun Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) provinsi dan RPJMN. Hal ini dimaksudkan untuk menjamin keselarasan program/kegiatan pembangunan daerah kabupaten dengan program/kegiatan pembangunan daerah provinsi dan prioritas pembangunan nasional.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan pembangunan yang disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasannya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), yakni sebagai pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Evaluasi RKPD tersebut dilakukan setiap triwulan guna memastikan bahwa target rencana program, lokasi, dan kegiatan prioritas Daerah dalam RKPD provinsi dapat dicapai. Hal ini dilaksanakan berdasarkan amanat yang tertuang di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Pada pasal 26 disebutkan bahwa evaluasi terhadap hasil RKPD lingkup provinsi mencakup sasaran dan prioritas pembangunan Daerah, serta rencana program dan kegiatan prioritas Daerah. Evaluasi tersebut dilakukan melalui penilaian hasil pelaksanaan RKPD Provinsi untuk mengetahui realisasi antara rencana program dan kegiatan prioritas Daerah dalam RKPD provinsi, dengan capaian indikator kinerja program, lokasi, dan kegiatan yang dilaksanakan melalui APBD provinsi; serta realisasi penyerapan dana program dan kegiatan yang direncanakan dalam RKPD provinsi dengan laporan realisasi APBD provinsi.

Apabila berdasarkan evaluasi ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan maka BAPPEDA Provinsi melakukan tindakan perbaikan penyempurnaan.

1.2 Landasan Hukum

Peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan hukum dalam evaluasi RKPD adalah:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD, RPJMD dan RKPD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD;
5. Peraturan Daerah Provinsi NTB Nomor 13 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2019;
6. Peraturan Gubernur NTB Nomor 12 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi NTB tahun 2019.

1.3 Tujuan

Tujuan dari kegiatan evaluasi RKPD dan Renja Perangkat Daerah Tahun 2019 Triwulan IV ini adalah untuk mengetahui:

1. Daya serap dan capaian target kinerja program/kegiatan mencakup masukan (*input*), keluaran (*output*), dan hasil (*outcome*) yang telah ditetapkan dalam dokumen RKPD tahun 2019;
2. Tingkat keberhasilan dan kegagalan suatu program/kegiatan;
3. Kinerja sebelumnya yang dapat dicapai dalam pelaksanaan pembangunan baik tingkat program maupun kegiatan.

1.4 Sasaran

Sasaran dari kegiatan evaluasi RKPD dan Renja Perangkat Daerah Tahun 2019 ini adalah untuk mengukur capaian program/kegiatan sampai dengan Triwulan IV sesuai dengan dokumen RKPD Tahun 2019.

1.5 Sistematika Penulisan Laporan

Dalam penulisan Laporan Evaluasi RKPD dan Renja Perangkat Daerah Tahun 2019 dilakukan dengan sistematika sebagai berikut:

- Bab I : Pendahuluan, Bab ini berisi tentang latar belakang, landasan hukum, tujuan, sasaran, dan sistematika penulisan laporan;
- Bab II : Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2019, bab ini berisi tentang prioritas dan sasaran RKPD Tahun 2019;
- Bab III : Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2019, bab ini berisi tentang rincian program dan kegiatan RKPD Tahun 2019

- Bab IV : Capaian Target Kinerja dan Penyerapan Anggaran Tahun 2019 Triwulan IV, bab ini berisi tentang capaian program baik kinerja maupun anggarannya pada 46 perangkat daerah lingkup Pemerintah Provinsi NTB
- Bab V : Penutup

BAB II :PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN TAHUN 2019

Prioritas dan sasaran pembangunan tahun 2019 mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi NTB 2005-2025 pada arah kebijakan pembangunan petahapan IV (tahun 2019-2023), hal ini sesuai ketentuan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 karena RPJMD Provinsi NTB 2013-2018 telah berakhir dan RPJMD 2019-2023 belum ditetapkan. Adapun arah kebijakan pembangunan Provinsi NTB 2019-2023 dapat dijabarkan sebagai berikut:

2.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan dalam RPJPD 2005-2025

Visi pembangunan jangka panjang Nusa Tenggara Barat dalam RPJPD Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2005-2025 adalah “Terwujudnya Masyarakat Nusa Tenggara Barat Yang Beriman, Maju Dan Sejahtera”. Visi tersebut diwujudkan dengan 5 (lima) misi, yaitu : Misi 1 Mewujudkan masyarakat beriman, bermoral, berbudaya, dan berkesadaran; Misi 2 Mewujudkan masyarakat sejahtera; Misi 3 Mewujudkan pemerataan pembangunan dan berkeadilan; Misi 4 Mewujudkan kemandirian dan daya saing daerah; Misi 5 Mewujudkan pembangunan berkelanjutan.

Untuk dapat memberikan arahan yang jelas bagi pelaksanaan pembangunan jangka panjang daerah, ditentukan sasaran pokok pada setiap misi beserta arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah, yang dapat dijabarkan sebagai berikut :

Misi 1 : Terwujudnya masyarakat beriman, bermoral, berbudaya, dan berkesadaran hukum, sasaran pokok dalam misi ini adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan peranan lembaga pemerintahan sebagai regulator yang diikuti dengan semakin menurunnya peranan sebagai pelaku kegiatan di masyarakat.
2. Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis sesuai prinsip-prinsip tata kelola yang baik (*good governance*) dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

3. Terwujudnya karakter masyarakat yang tangguh, kompetitif, dan bermoral tinggi yang dicirikan dengan watak dan perilaku manusia yang beriman dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi luhur, toleran, bergotong royong, patriotik, dinamis, dan beorientasi pada ilmu pengetahuan dan teknologi.
4. Terwujudnya perikehidupan masyarakat yang dinamis, berkeadilan, aman, tertib, dan harmonis.
5. Makin mantapnya peranan budaya dalam pembangunan daerah.

Sedangkan arah kebijakannya sebagai berikut :

- a. Mewujudkan masyarakat yang tangguh, kompetitif dan bermoral tinggi berdasarkan nilai-nilai agama dan nilai budaya. Agenda terhadap arah kebijakan tersebut meliputi:
 - Pemantapan fungsi dan peranan agama sebagai landasan moral dan etika dalam pembangunan, membina akhlak mulia, memupuk etos kerja, menghargai prestasi, dan menjadi kekuatan pendorong dalam mencapai kemajuan dan pembangunan.
 - Peningkatan fungsi dan peran tokoh-tokoh agama dalam meningkatkan kerukunan hidup umat beragama dengan meningkatkan rasa saling percaya dan harmonisasi antar kelompok agama dan kelompok masyarakat.
 - Penguatan kapasitas lembaga sosial keagamaan dan lembaga budaya dalam peningkatan pembinaan kehidupan masyarakat yang penuh toleransi, tenggang rasa dan harmonis.
 - Penguatan fungsi dan peran tokoh agama dalam meningkatkan kerukunan hidup umat beragama dan kehidupan sosial kemasyarakatan.Adapun prioritas lokasi meliputi wilayah perkotaan, pedesaan, dan kawasan rentan konflik.
- b. Mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat melalui peningkatan kesadaran hukum dan penegakan hak asasi manusia (HAM). Agenda terhadap arah kebijakan tersebut meliputi :
 - Peningkatan peran serta masyarakat dalam rangka mewujudkan terjaminnya keamanan dan ketertiban masyarakat.
 - Peningkatan, pemantapan, dan penguatan kesadaran dan penghayatan masyarakat terhadap hukum dan HAM.
 - Pemantapan dan penguatan peran lembaga sosial masyarakat dalam turut bertanggung jawab dan berperan aktif menciptakan keamanan dan ketertiban dalam bentuk kerjasama dan kemitraan dengan polisi.
 - Peningkatan kualitas kelembagaan dan profesionalisme pamswakarsa.
- c. Memantapkan peranan budaya dalam pembangunan daerah. Agenda terhadap arah kebijakan tersebut meliputi :
 - Penataan pembangunan budaya daerah dan sistem sosial yang berakar dan unik, seperti religius, kebersamaan, dan persatuan.
 - Revitalisasi dan reaktualisasi tata nilai budaya daerah yang unggul.
 - Pengembangan bentuk-bentuk pengungkapankreativitas melalui kesenian dalam kerangka peningkatan harkat, martabat dan peradaban manusia.

- Pengembangan budaya iptek melalui pengembangan budaya membaca dan menulis, masyarakat pembelajar, masyarakat yang cerdas, kritis, dan kreatif dalam rangka pengembangan tradisi iptek dan budaya produktif.
- d. Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Agenda terhadap arah kebijakan tersebut meliputi :
- Peningkatan fasilitasi akses masyarakat terhadap segala informasi yang dibutuhkan dan pelibatan masyarakat dalam berbagai proses pengambilan keputusan pembangunan daerah.
 - Peningkatan kesadaran dan penghayatan masyarakat terhadap hak-haknya sebagai warga negara serta bentuk-bentuk perilaku merasa memiliki “daerahnya” dan taat hukum.
 - Peningkatan pelayanan dan bantuan hukum kepada masyarakat dengan biaya yang terjangkau, proses yang tidak berbelit dan penetapan putusan yang mencerminkan rasa keadilan masyarakat.

Adapun prioritas lokasi meliputi wilayah perkotaan dan pedesaan.

Indikator keberhasilan dari misi ini adalah menurunnya konflik antar kelompok masyarakat dan antar umat beragama, menurunnya angka indeks kriminalitas, meningkatnya indeks kesetaraan gender, menurunnya angka korban kekerasan dalam rumah tangga dan trafficking, meningkatnya aktivitas berkesenian dan apresiasi budaya masyarakat, meningkatnya minat baca masyarakat, dan meningkatnya rasio jumlah perpustakaan dengan penduduk.

Misi 2 : Terwujudnya masyarakat sejahtera, sasaran pokok dalam misi ini adalah sebagai berikut :

1. Tercapainya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkesinambungan sehingga pendapatan per kapita riil penduduk terus meningkat, tingkat pengangguran tidak lebih dari 5 persen dan angka kemiskinan dibawah 10 persen.
2. Terpenuhinya kebutuhan hunian dan lingkungan permukiman yang layak bagi seluruh masyarakat.
3. Meningkatnya kualitas pendidikan penduduk, yang dicirikan dengan terbebasnya penduduk Nusa Tenggara Barat dari buta huruf, keterampilan lulusan yang sesuai dengan permintaan pasar kerja, dan rata-rata lama sekolah penduduk menjadi 12 tahun.
4. Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat, yang dicirikan dengan terbebasnya penduduk Nusa Tenggara Barat dari penyakit dasar, menurunnya angka kematian bayi, meningkatnya usia harapan hidup, menurunnya angka kematian ibu melahirkan, dan menurunnya prevalensi gizi kurang pada anak balita. Seluruh indikator kesehatan sama/mendekati rata-rata nasional.

Untuk mencapai sasaran-sasaran pokok pada misi diatas maka arah kebijakan pembangunan jangka panjangnya adalah sebagai berikut :

- a. Menjamin ketersediaan pangan dan gizi masyarakat. Agenda terhadap arah kebijakan tersebut adalah :
 - Pengembangan kelembagaan ketahanan pangan di daerah yang mampu menjamin pemenuhan kebutuhan pangan di tingkat rumah tangga yang cukup, baik jumlah maupun gizinya, aman, dan terjangkau.
 - Mengembangkan sumber-sumber pangan yang beragam sesuai dengan keragaman lokal.
 - Pemantapan ketahanan dan kemandirian pangan daerah dengan mengembangkan kemampuan produksi di daerah serta pemenuhan konsumsi seimbang.
 - Optimalisasi peran kelembagaan ketahanan pangan di daerah yang mampu menjamin pemenuhan kebutuhan pangan dan gizi.
- b. Menyediakan kebutuhan hunian dan lingkungan permukiman yang layak. Agenda terhadap arah kebijakan tersebut adalah :
 - Penelitian dan pengembangan potensi pembiayaan perumahan yang berasal dari masyarakat dan lembaga keuangan formal dan non-formal.
 - Peningkatan dan optimalisasi kualitas pemukiman rakyat.
 - Fasilitasi pembangunan perumahan yang berkelanjutan, memadai, layak dan terjangkau oleh daya beli masyarakat.
 - Pemanfaatan dan pengembangan potensi pembiayaan perumahan yang berasal dari lembaga keuangan formal dan non-formal.
 - Optimalisasi pemanfaatan potensi pembiayaan perumahan yang berasal dari masyarakat.
- c. Menyediakan lapangan kerja. Agenda terhadap arah kebijakan tersebut adalah :
 - Penelitian dan pengembangan potensi angkatan kerja dan peluang lapangan kerja formal.
 - Peningkatan produktivitas dan penempatan tenaga kerja agar dapat bersaing dan menghasilkan nilai tambah yang tinggi.
 - Peningkatan pelayanan kesejahteraan pekerja di sektor informal.
 - Peningkatan hubungan industrial yang harmonis dengan perlindungan yang layak, keselamatan kerja yang memadai, serta penyelesaian perselisihan yang memuaskan semua pihak.

Adapun prioritas lokasi meliputi daerah perkotaan, kawasan strategis industri dan kawasan agropolitan.
- d. Meningkatkan kualitas penduduk. Agenda terhadap arah kebijakan tersebut adalah :
 - Penelitian dan pengembangan database jumlah dan laju pertumbuhan penduduk.
 - Penataan sistem administrasi kependudukan untuk mendukung perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah.
 - Pengendalian jumlah dan laju pertumbuhan penduduk menuju terbentuknya keluarga kecil berkualitas.
 - Penataan persebaran penduduk yang lebih seimbang sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan.
- e. Meningkatkan pelayanan dasar pendidikan. Agenda terhadap arah kebijakan tersebut adalah :
 - Penelitian dan pengembangan database pelayanan pendidikan di semua jenjang

- Peningkatan akses dan mutu pelayanan pendidikan bagi semua lapisan masyarakat dan semua jenjang pendidikan.
- Fasilitasi peningkatan pengetahuan dan keterampilan bagi penduduk usia produktif.
- Pembebasan biaya pendidikan pada jenjang pendidikan dasar.
- Keberlanjutan peningkatan akses dan mutu pelayanan pendidikan untuk meningkatkan harkat dan kualitas hidup dan produktivitas penduduk, serta menumbuhkan kebanggaan kebangsaan dan akhlak mulia.

f. Meningkatkan pelayanan masyarakat. Agenda terhadap arah kebijakan tersebut adalah :

- Peningkatan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau pada setiap strata pelayanan pada berbagai tingkat wilayah.
- Peningkatan promosi, pengobatan, rehabilitasi dan prevensi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat.
- Penambahan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan masyarakat.
- Peningkatan dan penguatan sistem pelayanan kesehatan.
- Peningkatan jumlah tenaga kesehatan dan pemberdayaan profesi kesehatan.

g. Meningkatkan kesejahteraan sosial. Agenda terhadap arah kebijakan tersebut adalah :

- Penyediaan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang memadai.
- Peningkatan kualitas kesejahteraan dan produktivitas penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS).
- Peningkatan sistem pembiayaan sosial ekonomi masyarakat miskin/terlantar dan jaminan sosial daerah (Jamsosda) bagi PMKS.
- Peningkatan jangkauan pelayanan dan rehabilitasi sosial yang berkualitas termasuk pemberdayaan sosial yang tepat guna bagi masyarakat Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).
- Pengembangan dan penataan sistem perlindungan dan jaminan sosial untuk memastikan dan memantapkan pemenuhan hak-hak masyarakat akan pelayanan sosial dasar.
- Penanganan dampak sosial ekonomi masyarakat pasca bencana alam.

Adapun prioritas lokasi meliputi wilayah perkotaan dan pedesaan.

Indikator keberhasilan dari misi ini adalah menurunnya angka gizi buruk dan gizi kurang; menurunnya angka kemiskinan hingga sama dengan rata-rata nasional; meningkatnya angka persentase kepemilikan rumah; menurunnya angka pengangguran hingga mencapai angka dibawah 5 persen; menurunnya angka pertumbuhan penduduk mendekati 0 persen; meningkatnya akses dan mutu pendidikan yang ditandai dengan meningkatnya angka partisipasi sekolah, meningkatnya lama sekolah menjadi 12 tahun, dan angka melek huruf diatas 95 persen; meningkatnya derajat kesehatan masyarakat yang ditandai dengan

meningkatnya usia harapan hidup, menurunnya angka kematian ibu melahirkan dan angka kematian bayi, dan menurunnya prevalensi kurang gizi; menurunnya jumlah PMKS; dan meningkatnya fasilitas dan mutu pelayanan sosial masyarakat.

Misi 3 : Terwujudnya pemerataan pembangunan yang berkeadilan, sasaran pokok dalam misi ini adalah sebagai berikut :

1. Tingkat pembangunan yang semakin merata ke seluruh wilayah dan semua lapisan masyarakat. Terwujudnya peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat di seluruh wilayah, termasuk berkurangnya kesenjangan antar wilayah di Nusa Tenggara Barat.
2. Kemandirian pangan dapat dipertahankan pada tingkat aman dan dalam kualitas gizi yang memadai serta tersedianya instrumen jaminan pangan untuk tingkat rumah tangga.
3. Terpenuhinya kebutuhan hunian yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana pendukungnya bagi seluruh masyarakat.

Untuk mencapai sasaran-sasaran pokok pada misi diatas maka arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat 2005-2025 adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatkan pemerataan pembangunan. Agenda terhadap arah pembangunan tersebut adalah :
 - Pembangunan dan pertumbuhan wilayah-wilayah strategis sehingga dapat mengembangkan wilayah-wilayah tertinggal di sekitarnya.
 - Pengembangan wilayah tertinggal dan terpencil melalui pemberdayaan masyarakat secara langsung, dan jaminan akses terhadap pelayanan publik.
 - Pemanfaatan rencana tata ruang sebagai landasan atau acuan kebijakan spasial bagi pembangunan lintas sektor maupun wilayah agar pemanfaatan ruang dapat sinergis, serasi, dan berkelanjutan.
 - Fasilitasi pembangunan perdesaan melalui pengembangan agropolitan, peningkatan kapasitas SDM, pengembangan jaringan infrastruktur penunjang, peningkatan akses informasi dan pemasaran, lembaga keuangan, kesempatan kerja dan teknologi, dan pengembangan social capital dan human capital.
 - Percepatan pembangunan kota-kota kecil dan menengah untuk dapat menjalankan peran sebagai motor penggerak pembangunan wilayah-wilayah sekitarnya maupun dalam melayani kebutuhan warga kota.
 - Peningkatan konektivitas dan keterkaitan kegiatan ekonomi di wilayah perkotaan dan wilayah perdesaan.
 - Pengelolaan pertanahan secara efisien, efektif, serta melaksanakan penegakan hukum terhadap hak atas tanah dengan menerapkan prinsip-prinsip keadilan, transparansi, dan demokrasi.

Adapun prioritas lokasi meliputi wilayah strategis, desa tertinggal dan terpencil, kawasan agropolitan, perkotaan dan industri.

- b. Mengurangi kemiskinan dalam masyarakat. Agenda terhadap arah pembangunan tersebut adalah :

- Penelitian dan pengembangan database dan strategi mainstreaming penanggulangan kemiskinan daerah.
- Perlindungan, pemberdayaan dan pemenuhan hak-hak dasar masyarakat miskin secara bertahap dengan mengutamakan prinsip kesetaraan khususnya pada layanan akses dan mutu pendidikan, kesehatan dan ekonomi.
- Peningkatan pemshaman tentang pentingnya perwujudan hak-hak dasar masyarakat miskin.

Adapun prioritas lokasi meliputi wilayah pedesaan tertinggal dan terpencil, daerah perkotaan dan perbatasan.

c. Mewujudkan supremasi hukum dan penegakan hak asasi manusia. Agenda terhadap arah pembangunan tersebut adalah :

- Mengidentifikasi permasalahan yang berkaitan dengan ekonomi, terutama dunia usaha dan dunia industri, serta terciptanya kepastian investasi, terutama penegakan dan perlindungan hukumnya.
- Penataan produk hukum sesuai hirarki perundang-undangan dan kearifan lokal.
- Penguatan kelembagaan dan profesionalisme aparat hukum.
- Penegakan supremasi hukum dan HAM, pembangunan budaya hukum, harmonisasi produk hukum pada masyarakat, dan perluasan akses masyarakat terhadap keadilan.
- Meningkatkan kepastian dan perlindungan hukum, penegakan hukum dan HAM, kesadaran hukum, serta pelayanan hukum.
- Penghargaan bagi masyarakat sipil untuk berkontribusi dalam pengelolaan pemerintahan.

Adapun prioritas lokasi meliputi daerah dengan tingkat kemiskinan dan kriminalitas tinggi.

d. Penyelenggaraan pemerintahan diarahkan untuk mewujudkan penyelenggaraan otonomi daerah yang mampu mensejahterakan rakyat dan pemantapan tata kelola yang baik (good governance). Agenda terhadap arah pembangunan tersebut adalah :

- Pembentukan kemandirian dan kedewasaan masyarakat, dan membentuk kelas menengah yang kuat di bidang ekonomi dan pendidikan.
- Penataan kelembagaan pemerintah daerah dan pengembangan diklat aparatur.
- Penyusunan dan penerapan standar pelayanan minimal.
- Peningkatan kinerja birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan masyarakat.
- Penataan fungsi-fungsi positif dari pranata-pranata kemasyarakatan, lembaga hukum dan lembaga politik untuk membangun kemandirian masyarakat dalam mengelola berbagai potensi konflik sosial yang merusak.
- Fasilitasi penguatan pemerintah desa/kelurahan.
- Peningkatan kualitas kebijakan publik dan perencanaan pembangunan daerah yang partisipatif.
- Pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan (e-gov; e-procurement; e-bisnis).
- Peningkatan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pengawasan aparatur pemerintah.

Adapun prioritas lokasi meliputi lingkungan pemerintah provinsi, kabupaten dan kota.

e. Mengembangkan kapasitas pemerintah daerah. Agenda terhadap arah pembangunan tersebut adalah :

- Peningkatan kapasitas kelembagaan, kapasitas keuangan termasuk upaya peningkatan kemitraan dengan masyarakat dan swasta dalam pembiayaan pembangunan daerah.
- Penguatan kapasitas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
- Pemberdayaan masyarakat melalui peningkatan pengetahuan dan keterampilan, peningkatan akses pada modal usaha dan SDA; pemberian kesempatan yang luas untuk menyampaikan aspirasinya, dan peningkatan kesempatan dan kemampuan untuk mengelola ekonomi produktif.
- Peningkatan kapasitas daerah dalam perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja.
- Peningkatan kapasitas kelembagaan, perencanaan dan penganggaran, manajemen keuangan pemerintah dan anggota DPRD.

Adapun prioritas lokasi meliputi DPRD provinsi, kabupaten/kota, pemerintah provinsi, kabupaten/kota.

f. Meningkatkan kerjasama antar daerah. Agenda terhadap arah pembangunan tersebut adalah :

- Meningkatkan koordinasi dan kerjasama antar pemerintah daerah.
- Menghindari timbulnya inefisiensi dalam pelayanan publik.
- Pengkajian potensi dan peluang kerjasama antar daerah.
- Pemanfaatan keunggulan komparatif maupun kompetitif masing-masing daerah.
- Pengembangan kerjasama antar daerah berdasarkan keunggulan komparatif dan kompetitif.

Adapun prioritas lokasi meliputi kabupaten/kota yang memiliki keunggulan komparatif dan kompetitif.

g. Mewujudkan aparatur pemerintah yang baik dan profesional. Agenda terhadap arah pembangunan tersebut adalah :

- Fasilitasi penanggulangan penyalahgunaan kewenangan aparatur pemerintah daerah dengan penerapan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik.
- Peningkatan intensitas dan efektivitas pengawasan aparatur pemerintahan melalui pengawasan internal, pengawasan fungsional, dan pengawasan masyarakat.
- Pemberian sanksi yang seberat-beratnya kepada pelaku penyalahgunaan kewenangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Peningkatan etika birokrasi dan budaya kerja serta kompetensi para penyelenggara pemerintahan dalam menerapkan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik dalam rangka peningkatan akses dan mutu pelayanan publik.

Adapun prioritas lokasi meliputi pemerintah provinsi, kabupaten/kota.

h. Meningkatkan peranan komunikasi dan informasi. Agenda terhadap arah pembangunan tersebut adalah :

- Mewujudkan pemerataan akses informasi yang lebih besar dengan mendorong munculnya media-media massa daerah yang independen.

- Pengembangan jaringan informasi yang lebih bersifat interaktif antara masyarakat dan kalangan pengambil keputusan politik untuk menciptakan kebijakan yang lebih mudah dipahami masyarakat luas.
- Fasilitasi pengembangan kebebasan pers yang lebih mapan dan terlembaga serta menjamin hak masyarakat untuk berpendapat dan mengontrol jalannya penyelenggaraan pemerintahan secara cerdas dan demokratis.

Adapun prioritas lokasi meliputi pemerintah provinsi, kabupaten/kota.

i. Mengembangkan proses dan budaya politik. Agenda terhadap arah pembangunan tersebut adalah :

- Membangun kesadaran budaya dan penanaman nilai-nilai politik demokratis terutama penghormatan nilai-nilai HAM, nilai-nilai persamaan, anti kekerasan, serta nilai-nilai toleransi melalui berbagai wacana dan media.
- Peningkatan kualitas proses dan mekanisme seleksi publik yang lebih terbuka bagi para pejabat politik dan pejabat publik.
- Fasilitasi dialog bagi peningkatan kesadaran mengenai pentingnya memelihara persatuan dan kesatuan.
- Pengembangan komitmen politik yang tegas terhadap pentingnya kebebasan media massa, keleluasaan berserikat, berkumpul, dan menyatakan pendapat setiap warga negara berdasarkan aspirasi politiknya masing-masing.
- Mengembangkan wacana dialog dengan semua stakeholder dalam proses perumusan kebijakan.

Adapun prioritas lokasi meliputi pemerintah provinsi, kabupaten/kota, pemerintah, pihak swasta, dan kalangan lembaga swadaya masyarakat.

Indikator keberhasilan dari misi ini adalah tercapainya pertumbuhan dan pemerataan ekonomi yang berkualitas, meningkatnya konektivitas antar wilayah, menurunnya angka kemiskinan dan pengangguran, meningkatnya kesejahteraan masyarakat yang tercermin dari meningkatnya PDRB per kapita dan indeks nilai tukar petani/nelayan (NTP/NTN), terselenggaranya tata pemerintahan yang baik melalui penerapan prinsip-prinsip tata kelola yang baik (*good governance*), meningkatnya partisipasi politik masyarakat, menurunnya indeks kriminalitas, dan meningkatnya pendapatan asli daerah.

Misi 4 : Terwujudnya kemandirian dan daya saing daerah, sasaran pokok dalam misi ini adalah sebagai berikut :

1. Kualitas sumber daya manusia (SDM) yang makin meningkat, termasuk peran perempuan dalam pembangunan. Secara umum peningkatan kualitas sumber daya manusia Nusa Tenggara Barat ditandai dengan meningkatnya IPM serta tidak ada pertumbuhan penduduk karena kelahiran. Angka IPM Nusa Tenggara Barat harus sama/mendekati rata-rata nasional.
2. Terbangunnya struktur perekonomian yang variatif dan kokoh berdasarkan keunggulan komparatif dan kompetitif. Sektor pertanian dalam arti luas, industri pengolahan, pariwisata, dan jasa menjadi basis aktivitas ekonomi yang menghasilkan komoditi berkualitas dan berdaya saing.
3. Terbangunnya jaringan infrastruktur perhubungan yang terintegrasi yang dicirikan oleh terbukanya hubungan antar desa satu sama lain di dalam dan ke luar wilayah Nusa Tenggara Barat serta sentra-sentra produksi dengan pasar.

4. Terpenuhinya pasokan tenaga listrik di seluruh wilayah Nusa Tenggara Barat yang mampu mendukung dinamika ekonomi dan kehidupan masyarakat. Rasio elektrifikasi mencapai angka minimal 95 persen.
5. Meningkatnya penguasaan, pemanfaatan dan penciptaan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Untuk mencapai sasaran-sasaran pokok pada misi diatas maka arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat 2005-2025 adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Agenda terhadap arah pembangunan tersebut adalah :
 - Perluasan dan pemerataan akses pendidikan pada semua jenjang pendidikan baik formal, non formal dan informal.
 - Peningkatan mutu, kuantitas, dan relevansi pendidikan kejuruan pada semua jenjang pendidikan dengan menyertakan muatan kurikulum agribisnis, pariwisata, dan keunggulan lokal.
 - Peningkatan kualitas sekolah kejuruan berbasis keunggulan lokal dan teknologi dengan mengedepankan link dan match.
 - Peningkatan kualitas pendidikan tinggi.
 - Pengembangan budaya baca.
 - Peningkatan kualitas dan peran pemuda dalam berbagai bidang pembangunan.
 - Peningkatan budaya olah raga dan prestasi olah raga di kalangan masyarakat.
 - Penguatan kelembagaan dan jaringan pengarusutamaan gender.
 - Pencapaian penduduk tumbuh seimbang yang ditandai dengan angka reproduksi netto (NRR) sama dengan 1, atau angka fertilitas total (TFR) sama dengan 2,1.
 - Memperbaiki indeks pembanguna manusia (IPM).

Adapun prioritas lokasi meliputi pemerintah provinsi, kabupaten/kota, pemerintah desa, pihak swasta, dan kalangan lembaga swadaya masyarakat.

- b. Meningkatkan perekonomian daerah. Agenda terhadap arah pembangunan tersebut adalah :
 - Penguatan basis keunggulan komparatif daerah menjadi keunggulan kompetitif yang berdaya saing tinggi untuk mendukung iklim usaha yang kondusif.
 - Peningkatan kesempatan berusaha dan penciptaan wirausaha baru dan pembinaan usaha sektor primer, sekunder dan tersier.
 - Pengembangan keterkaitan sistem produksi, distribusi, dan pelayanan antar pusat-pusat pengembangan ekonomi.
 - Pengembangan prinsip demokrasi ekonomi yang menjamin kesempatan berusaha dan bekerja bagi seluruh masyarakat dan mendorong tercapainya penanggulangan kemiskinan.
 - Pengembangan kelembagaan ekonomi dengan menerapkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

- Peningkatan kualitas pertumbuhan sektor pertanian.
- Pelayanan investasi dan pengembangan investasi di daerah, baik PMDN dan PMA untuk mendukung terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang tinggi secara berkelanjutan dan berkualitas.
- Pengembangan iklim persaingan usaha yang sehat dan perlindungan konsumen.
- Pengembangan usaha kecil menengah (UKM) untuk memberikan kontribusi pada pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan daya saing.
- Penguatan struktur perekonomian daerah agar terwujud ketahanan ekonomi yang tangguh dan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dengan basis agroindustri dan pariwisata.
- Penjaminan ketersediaan bahan pokok dan barang strategis lainnya di daerah, meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal, dan perluasan kesempatan kerja.
- Peningkatan pengelolaan keuangan negara melalui pengelolaan APBD yang bertumpu pada sistem penganggaran yang transparan, akuntabel dan dapat menjamin efektivitas pemanfaatan.
- Peningkatan efektivitas penerimaan asli daerah.
- Peningkatan efisiensi, modernisasi dan nilai tambah sektor pertanian dalam arti luas (tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, dan peternakan), kelautan dan perikanan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan petani dan nelayan dan dalam kaitannya dengan pengentasan kemiskinan, keterbelakangan, dan ketahanan pangan.
- Pembinaan industri yang berdaya saing dengan basis keunggulan komparatif.
- Percepatan berkembangnya industri jasa, termasuk jasa infrastruktur dan keuangan.
- Meningkatkan kuantitas dan kualitas komoditi ekspor daerah.

Adapun prioritas lokasi meliputi kawasan strategis, industri, kawasan ekonomi khusus, pemerintah provinsi, kabupaten/kota, pihak swasta.

c. Meningkatkan penguasaan, pemanfaatan dan penciptaan iptek. Agenda terhadap arah pembangunan tersebut adalah :

- Mendukung ketahanan pangan, ketersediaan energi, penciptaan dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.
- Peningkatan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka pengembangan sumber daya.
- Pengembangan kapasitas SDM iptek.
- Peningkatan sumber daya anggaran riset, dan sarana dan prasarana iptek.

Adapun prioritas lokasi meliputi kawasan strategis perkotaan, kawasan agribisnis pedesaan, kawasan ekonomi khusus.

d. Membangun jaringan infrastruktur wilayah yang handal dan terintegrasi. Agenda terhadap arah pembangunan tersebut adalah :

- Pembangunan infrastruktur wilayah dalam rangka mendukung pengembangan perekonomian daerah dan konektivitas antar wilayah.
- Fasilitasi kegiatan transaksi perdagangan sebagai sumber pergerakan orang, barang dan jasa yang menjadi pangsa pasar bisnis transportasi melalui political trading yang saling menguntungkan.
- Fasilitasi pengembangan jaringan pelayanan secara inter dan antarmoda angkutan melalui pembangunan prasarana dan sarana transportasi.
- Fasilitasi stakeholder untuk berpartisipasi dalam penyediaan pelayanan mulai dari tahap perencanaan, pembangunan dan pengoperasiannya.
- Meningkatkan keberpihakan terhadap pelayanan kepada masyarakat.
- Pengembangan infrastruktur perhubungan untuk kegiatan transaksi perdagangan, dan pengembangan jaringan pelayanan inter dan antarmoda angkutan sehingga tidak ada lagi bentuk monopoli transportasi.

Adapun prioritas lokal meliputi kawasan strategis, industri, kawasan ekonomi khusus, pemerintah provinsi, kabupaten/kota, pihak swasta.

e. Memenuhi pasokan tenaga listrik di seluruh wilayah Nusa Tenggara Barat. Agenda terhadap arah pembangunan tersebut adalah :

- Pengembangan kemampuan pemenuhan kebutuhan tenaga listrik di daerah dan keandalannya untuk memulihkan kemampuan pasokan sistem ketenagalistrikan yang memadai melalui rehabilitasi dan repowering pembangkit yang ada serta pembangunan pembangkit baru (geothermal).
- Fasilitasi pelunag yang lebih luas bagi investasi swasta secara lebih terbuka, kompetitif, profesional, dan terarah, bagi badan usaha milik negara, dan pemerintah daerah.
- Fasilitasi pemenuhan kebutuhan bagi BUMN, pemerintah daerah dan swasta secara transparan, profesional.

Adapun prioritas lokasi meliputi provinsi, kabupaten, dan kota.

Indikator keberhasilan misi ini adalah meningkatnya kualitas SDM dilihat dari beberapa indikator pendidikan dan kesehatan, meningkatnya prestasi atlet olahraga di berbagai pertandingan dan perlombaan olahraga di tingkat nasional dan internasional, meningkatnya jumlah koperasi bermutu, meningkatnya jumlah wirausaha baru, meningkatnya kontribusi sektor sekunder dan tersier dalam pembentukan produk domestik regional bruto (PDRB), peningkatan pertumbuhan dan nilai tambah sektor pertanian, tercapainya kedaulatan pangan di daerah, meningkatnya proporsi anggaran terhadap APBD untuk mendukung penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, meningkatnya kemantapan jalan, meningkatnya rasio elektrifikasi, meningkatnya jumlah desa yang terlistriki, dan berkurangnya ketimpangan antar daerah dan wilayah.

Misi 5 : Terwujudnya pembangunan berkelanjutan, sasaran pokok dalam misi ini adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya kualitas pengelolaan dan pendayagunaan sumber daya alam dan pelestarian fungsi lingkungan hidup yang dicerminkan oleh tetap terjaganya fungsi daya dukung dan kemampuan pemulihannya dalam mendukung kualitas kehidupan sosial dan ekonomi secara serasi, seimbang dan lestari.

2. Terpeliharanya kekayaan keragaman jenis dan kekhasan sumber daya alam hayati untuk mewujudkan nilai tambah dan daya saing daerah.
3. Terkendalikannya pencemaran dan kerusakan lingkungan.
4. Meningkatnya kesadaran, sikap mental, dan perilaku masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian fungsi lingkungan hidup untuk menjaga kenyamanan dan kualitas kehidupan.
5. Pengembangan wilayah dalam kerangka membangun geopark, Lombok as Eco Island (LECI) dan Sumbawa as Ecozone (SuEZ).

Untuk mencapai sasaran-sasaran pokok pada misi diatas maka arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat 2005-2025 meliputi :

- a. Meningkatnya kualitas pengelolaan dan pendayagunaan sumber daya alam (SDA) yang terbarukan, seperti hutan, pertanian, perikanan dan perairan.
Agenda terhadap arah pembangunan tersebut adalah :

- Pengelolaan secara rasional, optimal, efisien dan bertanggung jawab terutama SDA terbarukan yang masih dalam kondisi baik.
- Pemulihan daya dukung terhadap SDA terbarukan yang sudah dalam kondisi kritis untuk pencadangan bagi kepentingan generasi sekarang dan generasi mendatang.
- Penguatan kapasitas unit atau balai konservasi yang bertanggung jawab pada konservasi SDA.
- Pemanfaatan SDA terbarukan secara berkelanjutan dengan mengantisipasi dampak perubahan iklim.
- Pemantapan kapasitas personal dan kelembagaan konservasi SDA daerah.
- Sosialisasi terkait dengan pengelolaan SDA yang terbarukan dan terbarukan diikuti dengan penegakan hukum dan sengketa lahan.

Adapun prioritas lokasi meliputi kawasan sentra produksi pertanian, perikanan, kehutanan, dan perairan.

- b. Meningkatkan kualitas pengelolaan dan pendayagunaan SDA yang tidak terbarukan, seperti bahan tambang, mineral, dan sumber daya energi fosil.
Agenda terhadap arah pembangunan tersebut adalah :

- Pengkajian dan pengembangan kebutuhan reklamasi, dan konservasi pada areal pertambangan.
- Memperkuat pendanaan dan pencarian sumber-sumber energi alternatif atau bahan substitusi yang terbarukan, seperti biomassa, biogas, mikrohidro, energi matahari, panas bumi (geothermal), arus laut, dan tenaga angin yang lebih ramah lingkungan.
- Penguatan kapasitas unit atau balai konservasi yang bertanggung jawab pada konservasi SDA.
- Pemanfaatan SDA terbarukan secara berkelanjutan dengan mengantisipasi dampak perubahan iklim.
- Pemantapan kapasitas personal dan kelembagaan konservasi sumber daya alam daerah.
- Sosialisasi terkait dengan pengelolaan SDA yang terbarukan dan terbarukan diikuti dengan penegakan hukum dan sengketa lahan.

Adapun prioritas lokasi meliputi kawasan sentra produksi pertanian, perikanan, kehutanan, dan kelautan.

c. Meningkatkan kualitas pengelolaan dan pendayagunaan SDA yang tidak terbarukan, seperti bahan tambang, mineral, dan sumber daya energi. Agenda terhadap arah pembangunan tersebut adalah :

- Pengkajian dan pengembangan kebutuhan reklamasi, dan konservasi pada areal pertambangan rakyat.
- Memperkuat pendanaan dan pencarian sumber-sumber energi alternatif atau bahan substitusi yang terbarukan, seperti biomassa, biogas, mikrohidro, energi matahari, panas bumi (geothermal), arus laut dan tenaga angin yang lebih ramah lingkungan.
- Pengembangan dan pemanfaatan nilai tambah SDA yang optimal, dan outputnya diarahkan untuk dijadikan sebagai kapital kumulatif. Hasil atau pendapatan yang diperoleh dari kelompok SDA ini diarahkan untuk percepatan pertumbuhan ekonomi dengan diinvestasikan kepada sektor-sektor lain yang produktif.

Adapun prioritas lokasi meliputi kawasan pertambangan di kabupaten, termasuk pertambangan liar.

d. Mengembangkan potensi sumber daya kelautan. Agenda terhadap arah pembangunan tersebut adalah :

- Pengkajian potensi sumber daya kelautan, pesisir, dan pulau-pulau kecil beserta pemanfaatannya.
- Pengembangan pemanfaatan sumber daya kelautan melalui pendekatan multisektor, integratif, dan komprehensif agar dapat meminimalisasi konflik dan tetap menjaga kelestariannya.
- Peningkatan pengelolaan SDA kelautan secara terpadu antara sektor lautan dan daratan.

Adapun prioritas lokasi meliputi kawasan pertambangan di kabupaten, termasuk pertambangan liar.

e. Mewujudkan konservasi sumber daya air. Agenda terhadap arah pembangunan tersebut adalah :

- Pengkajian potensi dan kebutuhan sumber daya air, dan kelembagaan sosial yang mengelolanya.
- Pelembagaan keberlanjutan daya dukung sumber daya air dengan menjaga kelestarian fungsi daerah tangkapan air dan keberadaan air tanah.
- Pengembangan keseimbangan antara pasokan dan kebutuhan melalui pendekatan demand management yang ditujukan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan dan konsumsi air dari pendekatan supply management yang ditujukan untuk meningkatkan kapasitas dan keandalan pasokan air.
- Optimalisasi pemanfaatan sumber daya air dengan menerapkan konsep konservasi yang menjamin keberlanjutan daya dukung sumber daya air yang ada.
- Penguatan kelembagaan pengelola sumber daya air untuk meningkatkan keterpaduan dan kualitas pelayanan terhadap masyarakat.
- Perlindungan mata air dan air tanah.

Adapun prioritas lokasi meliputi kawasan konservasi hutan.

f. Memperhatikan dan mengelola keragaman jenis dan kekhasan SDA hayati. Agenda terhadap arah pembangunan tersebut adalah :

- Meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal, mengembangkan wilayah strategis dan cepat tumbuh.
 - Memberdayakan institusi sosial dan ekonomi terkait dengan pengelolaan SDA di tingkat lokal.
 - Melakukan kajian potensi keanekaragaman hayati.
 - Pengembangan model hutan keanekaragaman hayati dengan mengembangkan dan memberdayakan institusi di tingkat lokal.
- g. Mengendalikan pencemaran dan kerusakan lingkungan. Agenda terhadap arah pembangunan tersebut adalah :
- Memanfaatkan jasa lingkungan yang ramah lingkungan sehingga tidak mempercepat terjadinya degradasi dan pencemaran lingkungan.
 - Memulihkan dan merehabilitasi kondisi lingkungan hidup diprioritaskan pada upaya untuk meningkatkan daya dukung lingkungan.
 - Studi sumber-sumber pencemaran untuk mengidentifikasi dan dampak kerusakannya.
 - Memulihkan dan merehabilitasi kondisi lingkungan hidup di kawasan yang berpotensi mengalami pencemaran dan kerusakan lingkungan.
 - Peningkatan kapasitas kelembagaan pengelolaan dan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan.
- h. Meningkatkan kapasitas pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup. Agenda terhadap arah pembangunan tersebut adalah :
- Meningkatkan dukungan kelembagaan pengelola sumber daya alam dan lingkungan hidup dan perluasan penerapan etika lingkungan.
 - Menegakan hukum lingkungan yang adil dan tegas.
 - Meningkatkan dukungan sistem politik yang kredibel dalam mengendalikan konflik.
- i. Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mencintai lingkungan hidup. Agenda terhadap arah pembangunan tersebut adalah :
- Meningkatkan kesadaran generasi muda yang peduli terhadap isu sumber daya alam dan lingkungan hidup.
 - Mempersiapkan penggerak bagi penerapan konsep pembanguna berkelanjutan dalam kehidupan sehari-hari.
 - Meningkatkan kesadaran generasi muda untuk mencintai lingkungan.
 - Pengembangan dan penerapan kurikulum sekolah yang ramah (pro) terhadap lingkungan hidup.

Indikator keberhasilan dari misi mewujudkan pembangunan berkelanjutan adalah terpeliharanya kualitas lingkungan hidup; terwujudnya pelestarian fungsi tangkapan air, pengelolaan danau/situ/embung; meningkatnya sumber daya alam hayati termamfaatkan dan diolah untuk agribisnis; meningkatnya jumlah desa yang teraliri listrik dengan sumber energi konvensional dan terbarukan, menurunnya lahan kritis akibat eksploitasi sumber daya alam, menurunnya insiden bencana alam, menurunnya tingkat pencemaran air dan udara dari berbagai sumber pencemaran seperti limbah dan gas buangan, dan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap kelestarian lingkungan dengan munculnya inisiasi pengelolaan sampah di tiap RT dan dusun.

Tahun 2019 merupakan tahun pertama dari periode keempat pembangunan tahun 2018-2023 yang tertuang dalam RPJPD Tahun 2005-2025. Tahap ke-4 (Periode 2018-2023), adalah periode yang diarahkan untuk lebih memantapkan pembangunan secara menyeluruh di pelbagai bidang dengan

menekankan pada terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing. Kemajuan di bidang ekonomi yang ditopang oleh ketahanan pangan dan berkembangnya agroindustri terutama pada beberapa komoditi unggulan sejalan kemajuan di dalam pengelolaan lingkungan hidup sehingga kualitas dan fungsi lingkungan hidup tetap terjaga. Pembangunan pada periode ini diarahkan pada:

Tabel 2.1 Arah Pembangunan Provinsi NTBTahun 2018-2023

Misi	Arah Kebijakan	Agenda	Prioritas Lokasi
Misi 1 Mewujudkan masyarakat Beriman, Bermoral, Berbudaya, dan Berkesadaran Hukum	Mewujudkan Masyarakat yang Tangguh, Kompetitif dan Bermoral Tinggi Berdasarkan Nilai-Nilai Agama	Keberlanjutan peningkatan fungsi dan peran tokoh agama dalam meningkatkan kerukunan hidup umat beragama	Kawasan perkotaan dan pedesaan, kawasan rentan konflik
	Mewujudkan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Keberlanjutan fasilitasi dan optimalisasi peran lembaga sosial masyarakat dalam turut bertanggungjawab dalam penciptaan keamanan dan ketertiban dalam bentuk kerjasama dan kemitraan dengan polisi	Kawasan perkotaan dan pedesaan, kawasan rentan konflik
	Memantapkan Peranan Budaya dalam Pembangunan Daerah	Keberlanjutan peningkatan pembangunan budaya daerah dan sistem sosial, dan pengembangan budaya iptek dalam rangka pengembangan tradisi iptek dan budaya produktif	Kawasan perkotaan dan pedesaan
	Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat	Keberlanjutan peningkatan fasilitasi akses terhadap informasi, pelayanan bantuan hukum dan kesadaran masyarakat terhadap hak dan kewajibannya	Kawasan perkotaan dan pedesaan
Misi 2 Mewujudkan Masyarakat Sejahtera	Menjamin Ketersediaan Pangan dan Gizi Masyarakat	- Keberlanjutan optimalisasi peran kelembagaan ketahanan pangan di daerah yang mampu menjamin pemenuhan kebutuhan pangan - Keberlanjutan pemantapan ketahanan dan kemandirian pangan daerah dengan mengembangkan kemampuan produksi di daerah	
	Menyediakan Kebutuhan Hunian dan Lingkungan Permukiman yang Layak	Keberlanjutan pengembangan perumahan yang berkelanjutan, memadai, layak dan terjangkau oleh daya beli masyarakat serta didukung oleh prasarana dan sarana permukiman yang mencukupi dan berkualitas	Kawasan permukiman perkotaan dan pedesaan
	Menyediakan Lapangan Kerja	- Keberlanjutan peningkatan produktivitas dan pelayanan kesejahteraan pekerja di sektor informal - Pemantapan hubungan industrial yang harmonis dengan	Daerah perkotaan, kawasan strategis industri, dan kawasan agropolitan

Misi	Arah Kebijakan	Agenda	Prioritas Lokasi
		perlindungan yang layak, keselamatan kerja yang memadai, serta penyelesaian perselisihan yang memuaskan semua pihak	
	Meningkatkan Kualitas Penduduk	Keberlanjutan pengendalian jumlah dan laju pertumbuhan penduduk, serta pemantapan sistem administrasi kependudukan	Daerah perkotaan dan pedesaan
	Meningkatkan Pelayanan Dasar Pendidikan	Keberlanjutan peningkatan mutu pelayanan pendidikan untuk meningkatkan harkat dan kualitas hidup dan produktivitas penduduk, serta menumbuhkan kebanggaan kebangsaan dan akhlak mulia	Di daerah perkotaan dan pedesaan
	Meningkatkan Pelayanan Kesehatan	▪ Pengembangan dan penguatan sistem kesehatan ▪ Pemberdayaan profesi kesehatan (institusi) ▪ Peningkatan jumlah, jenis, mutu tenaga kesehatan ▪ Peningkatan derajat kesehatan masyarakat	Di daerah perkotaan dan pedesaan
	Meningkatkan Kesejahteraan Sosial	▪ Keberlanjutan pemanfaatan fasilitas dan sarana pelayanan sosial untuk meningkatkan sistem perlindungan dan jaminan sosial ▪ Peningkatan kualitas kesejahteraan penyandang masalah kesejahteraan sosial ▪ Pemantapan sistem pembiayaan jaminan sosial daerah (Jamsosda) bagi PMKS	Di daerah perkotaan dan pedesaan
Misi 3 Mewujudkan Pemerataan Pembangunan yang Berkeadilan	Meningkatkan Pemerataan Pembangunan	▪ Keberlanjutan peningkatan konektivitas kegiatan ekonomi di wilayah perkotaan dengan wilayah perdesaan ▪ Keberlanjutan peningkatan dan pengembangan agropolitan, kapasitas SDM, jaringan infrastruktur penunjang, akses informasi dan pemasaran, lembaga keuangan, kesempatan kerja dan teknologi, serta <i>social dan human capital</i>	Wilayah strategis, desa tertinggal dan terpencil, kawasan agropolitan, perkotaan dan industri
	Mengurangi Kemiskinan dalam Masyarakat	Keberlanjutan pemantapan peningkatan perlindungan dan pemenuhan hak-hak dasar masyarakat miskin khususnya pada akses dan mutu layanan pendidikan, kesehatan dan ekonomi	Wilayah pedesaan tertinggal dan terpencil. Daerah perkotaan dan perbatasan
	Mewujudkan Supremasi Hukum dan Penegakan Hak Asasi Manusia	▪ Penegakan supremasi hukum dan HAM ▪ Penghormatan bagi masyarakat sipil untuk berkontribusi dalam pengelolaan pemerintahan	Daerah dengan tingkat kemiskinan dan kriminalitas tinggi
	Penyelenggaraan Pemerintahan diarahkan	▪ Pengawasan aparatur, peningkatan partisipasi masyarakat	Di lingkungan pemerintah provinsi,

Misi	Arah Kebijakan	Agenda	Prioritas Lokasi
	untuk mewujudkan penyelenggaraan otonomi daerah yang mampu mensejahterakan rakyat dan pemantapan tata kelola yang baik (<i>good governance</i>)	- dalam penyelenggaraan pemerintahan - Keberlanjutan peningkatan kualitas kebijakan publik dan perencanaan pembangunan yang partisipatif, dan pelayanan dasar	kabupaten dan kota
	Mengembangkan Kapasitas Pemerintah Daerah	Keberlanjutan peningkatan kapasitas kelembagaan, perencanaan dan penganggaran, manajemen keuangan pemerintah dan anggota DPRD	DPRD provinsi, kabupaten/kota, pemerintah provinsi, kabupaten/kota
	Meningkatkan Kerjasama Antardaerah	Keberlanjutan penguatan pengembangan kerjasama antar daerah berdasarkan keunggulan komparatif dan kompetitif	Kabupaten/kota yang memiliki keunggulan komparatif dan kompetitif
	Mewujudkan Aparatur Pemerintah yang Baik dan Profesional	Keberlanjutan peningkatan kompetensi para penyelenggara pemerintahan dalam menerapkan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik dalam rangka peningkatan akses dan mutu pelayanan publik	Pemerintah provinsi, kabupaten/kota
	Meningkatkan Peranan Komunikasi dan Informasi	Keberlanjutan optimalisasi pengembangan jaringan teknologi informasi dan pengembangan kebebasan pers yang lebih mapan dan terlembaga serta menjamin hak masyarakat untuk berpendapat dan berkontribusi dalam setiap kegiatan pembangunan dan pengambilan keputusan	Pemerintah provinsi, kabupaten/kota
	Mengembangkan Proses dan Budaya Politik	Keberlanjutan peningkatan kualitas proses dan mekanisme seleksi publik yang lebih terbuka dan pelembagaan fasilitasi dialog dalam setiap proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kepentingan publik	Pemerintah provinsi, kabupaten/kota, pemerintah desa, pihak swasta, dan kalangan lembaga swadaya masyarakat
Misi 4 Mewujudkan Kemandirian dan Daya Saing Daerah	Meningkatkan Kuaitas Sumber Daya Manusia	- Pengembangan perluasan dan pemerataan akses pendidikan pada semua jenjang pendidikan baik formal, non formal dan informal - Penigkatan mutu dan relevansi pendidikan pada semua jenjang pendidikan dengan menyertakan muatan kurikulum agrobisnis - Peningkatan kualitas sekolah kejuruan berbasis keunggulan lokal dan teknologi dengan mengedepankan <i>link and match</i> khususnya agrobisnis - Peningkatan kualitas pendidikan tinggi - Pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan	

Misi	Arah Kebijakan	Agenda	Prioritas Lokasi
		Memperbaiki indeks pembangunan manusia (IPM)	
	Meningkatkan Perekonomian Daerah	- Perekonomian yang berdaya saing berbasis agrobisnis - Pembinaan usaha sektor primer, sekunder, dan tersier - Penjaminan ketersediaan bahan pokok dan barang strategis lainnya di daerah dalam harga yang terjangkau - Pengembangan kepariwisataan agar mampu meningkatkan citra daerah, meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal, dan perluasan kesempatan kerja - Peningkatan pengelolaan keuangan negara melalui pengelolaan APBD yang bertumpu pada sistem penganggaran yang transparan, akuntabel dan dapat menjamin efektivitas pemanfaatan - Peningkatan efektivitas penerimaan asli daerah	Kawasan strategis perkotaan, kawasan agribisnis pedesaan, kawasan ekonomi khusus
	Membangun Jaringan Infrastruktur Perhubungan yang Handal dan Terintegrasi	Keberlanjutan pengembangan infrastruktur perhubungan untuk kegiatan transaksi perdagangan, dan pengembangan jaringan pelayanan inter dan antarmoda angkutan sehingga tidak ada lagi bentuk monopoli transportasi	Kawasan strategis, kawasan ekonomi khusus, pemerintah provinsi, kabupaten/kota, pihak swasta
	Memenuhi Pasokan Tenaga Listrik di Seluruh Wilayah Nusa Tenggara Barat	Keberlanjutan pemenuhan kebutuhan tenaga listrik dan optimalisasi peluang investasi bagi BUMN, pemerintah daerah dan swasta secara transparan, profesional	Provinsi, kabupaten, kota
Misi 5 Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan	Meningkatkan Kualitas Pengelolaan dan Pendayagunaan Sumber Daya Alam yang Terbarukan, seperti Hutan, Pertanian, Perikanan, dan Perairan	- Keberlanjutan pemanfaatan dan pemulihan sumber daya alam - Pengelolaan secara berkelanjutan oleh tenaga dan lembaga konservasi yang kompeten dan profesional - Peningkatan pemulihan daya dukung terhadap SDA terbarukan	Kawasan sentra produksi pertanian, perikanan, kehutanan dan kelautan
	Meningkatkan Kualitas Pengelolaan dan Pendayagunaan Sumber Daya Alam yang Tidak Terbarukan, seperti Bahan Tambang, Mineral, dan Sumber Daya Energi	Keberlanjutan pengendalian dan pengembangan reklamasi dan konservasi, serta pengembangan dan pemanfaatan nilai tambah yang optimal, dan outputnya diarahkan untuk percepatan pertumbuhan ekonomi	Kawasan pertambangan di kabupaten, termasuk pertambangan liar
	Mengembangkan Potensi Sumber Daya Kelautan	Keberlanjutan pemanfaatan sumber kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil melalui pengelolaan yang terpadu antara sektor lautan dan daratan	Kawasan laut dan pantai di kabupaten/kota
	Mewujudkan Konservasi Sumberdaya Air	Penguatan kelembagaan pengelola sumber daya air untuk meningkatkan keterpaduan dan kualitas pelayanan terhadap	

Misi	Arah Kebijakan	Agenda	Prioritas Lokasi
		masyarakat ▪ Pemantapan kegiatan perlindungan mata air dan air tanah	
	Memperhatikan dan Mengelola Keragaman Jenis dan Kekhasan Sumber Daya Alam Hayati	Pengembangan model hutan keanekaragaman hayati dengan mengembangkan dan memberdayakan institusi tingkat lokal	
	Mengembangkan Model Pembangunan Berbasis Resiko bencana	▪ Optimalisasi sosialisasi dan diseminasi informasi secara dini terhadap ancaman kerawanan bencana alam kepada masyarakat ▪ Pembinaan kelembagaan kelompok sadar rawan bencana di masyarakat	Kawasan perkotaan, pedesaan dan rawan bencana
	Mengendalikan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan	▪ Mengoptimalkan pemulihan dan merehabilitasi kondisi lingkungan hidup di kawasan yang berpotensi mengalami pencemaran dan kerusakan lingkungan ▪ Optimalisasi kapasitas kelembagaan pengelolaan dan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan	Kawasan perkotaan, pedesaan dan rawan bencana
	Meningkatkan Kapasitas Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup		
	Meningkatnya Kesadaran Masyarakat untuk Mencintai Lingkungan Hidup	▪ Optimalisasi pembinaan pada kelompok pecinta Lingkungan Hidup ▪ Optimalisasi penerapan kurikulum sekolah yang pro lingkungan hidup ke semua sekolah	

Sumber : RPJPD Provinsi NTB 2005-2025

2.2 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2019

Penentuan prioritas pembangunan daerah tahun 2019 dilakukan dengan mempertimbangkan dan mendasarkan beberapa hal sebagai berikut :

1. Hasil evaluasi kinerja pembangunan daerah tahun 2017 dan tahun berjalan;
2. Arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional yang dijabarkan dalam 9 (sembilan) agenda pembangunan (Nawa Cita) sebagaimana tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2019;
3. Sasaran pokok arah kebijakan periode keempat pembangunan tahun 2018-2023 yang tertuang dalam RPJPD Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2005-2025.

Melanjutkan pendekatan yang telah dilaksanakan sejak RKPD 2017, politik perencanaan dan penganggaran dalam RKPD 2019 tetap dikendalikan sesuai dengan tujuan dan manfaat yang dicapai, dan bukan oleh ketersediaan anggaran atau tugas dan fungsi organisasi. Pendekatan perencanaan dan penganggaran yang bersifat money follows program tersebut bertujuan untuk mencapai tujuan pembangunan daerah secara lebih efektif dan efisien dan berkeadilan. Sebagai tahun transisi pasca berakhirnya RPJMD 2013-2018 dan untuk mempertahankan kinerja pembangunan yang ada dan melakukan percepatan pencapaian indikator strategis yang mencerminkan sinergi antara target nasional dan daerah, serta untuk meletakkan pondasi yang kuat bagi RPJMD 2018-2023, sasaran pembangunan Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam RKPD tahun 2019 adalah sebagaimana dalam tabel 2.2 berikut.

Tabel 2.2 Target Pembangunan Daerah Tahun 2019

No	Indikator Pembangunan	Target Nasional 2019	Target Daerah 2019
1.	Pertumbuhan Ekonomi Non Tambang (%)	5,4 – 5,8	6,5 – 7,5
2.	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	4,8 – 5,2	3,0 – 2,5
3.	Angka Kemiskinan (%)	8,5 – 9,5	14 - 13
4.	Rasio Gini (Indeks)	0,38 – 0,39	0,34 – 0,33
5.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	71,98	68,00

Sumber : Proyeksi RKP dan RKPD 2019

a) Prioritas dan Sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2019

Sebagaimana diamanatkan pada Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, bahwa RKP merupakan penjabaran dari RPJM Nasional, memuat prioritas pembangunan, rancangan kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal, serta program Kementerian/Lembaga, lintas Kementerian/Lembaga, kewilayahan dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. Kemudian seluruh aspek tersebut nantinya akan menjadi landasan dalam menciptakan perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi dan terpadu. Dengan demikian hal tersebut dapat menjadi kunci untuk mencapai efektifitas dan efisiensi pelaksanaan program sehingga sasaran dan manfaat pembangunan lebih mudah dapat tercapai.

Agenda pembangunan nasional tahun 2018 sebagai tahun keempat dalam pembangunan jangka menengah 2015-2019 dimaksudkan sebagai upaya mendorong pertumbuhan ekonomi yang memprioritaskan belanja pemerintah untuk pencapaian sasaran prioritas nasional. Kemudian agar tetap terciptanya keberlanjutan, maka pada Pembangunan Nasional tahun 2019 Tema RKP 2019 adalah sebagai berikut : **"Pemerataan Pembangunan untuk Pertumbuhan Berkualitas"**

Prioritas nasional Tahun 2019 terbagi menjadi 5 (lima) prioritas nasional dan 24 (dua puluh empat) program prioritas yaitu :

- I. Pembangunan manusia melalui pengurangan kemiskinan dan peningkatan pelayanan dasar dilaksanakan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan mempercepat penurunan tingkat kemiskinan
 1. Percepatan pengurangan kemiskinan
 2. Peningkatan pelayanan kesehatan dan gizi masyarakat
 3. Pemerataan layanan pendidikan berkualitas
 4. Peningkatan akses masyarakat terhadap perumahan dan permukiman yang layak
 5. Peningkatan tata kelola pelayanan dasar
- II. Pengurangan kesenjangan antar wilayah melalui penguatan konektivitas dan kemaritiman
 6. Peningkatan konektivitas dan Teknologi Informasi dan Komunikasi
 7. Percepatan pembangunan Papua dan Papua Barat
 8. Percepatan pembangunan daerah tertinggal dan desa
 9. Penanggulangan bencana
 10. Peningkatan sistem logistik
- III. Peningkatan nilai tambah ekonomi melalui pertanian, industri dan jasa produktif
 11. Peningkatan ekspor dan nilai tambah produk pertanian
 12. Percepatan peningkatan ekspor dan nilai tambah industri pengolahan
 13. Peningkatan nilai tambah/efisiensi jasa produktif
 14. Percepatan peningkatan keahlian tenaga kerja
 15. Pengembangan Iptek dan inovasi untuk meningkatkan produktivitas
- IV. Pemantapan ketahanan energi, pangan dan sumber daya air
 16. Peningkatan produksi dan pemenuhan kebutuhan energi
 17. Peningkatan produksi, akses dan kualitas konsumsi pangan

18. Peningkatan kuantitas, kualitas dan aksesibilitas air
19. Peningkatan daya dukung sumber daya alam dan daya tampung lingkungan

V. Stabilitas keamanan nasional dan kesuksesan pemilu

20. Kamtibmas dan keamanan siber
21. Kesuksesan pemilu
22. Pertahanan wilayah nasional
23. Kepastian hukum dan reformasi birokrasi
24. Efektivitas diplomasi

b) Prioritas dan Sasaran Pembangunan Provinsi NTB Tahun 2019

Selanjutnya dalam rangka memastikan perubahan dan sebagai representasi pencapaian sasaran pembangunan nasional dan jangka panjang daerah, tentunya perlu memperhatikan aspek sumber daya manusia dan pembangunan infrastruktur di Nusa Tenggara Barat. Oleh karena itu pada penyusunan RKPD Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2019 mengambil tema : **"Pertumbuhan Dan Pemerataan Ekonomi Untuk Percepatan Penurunan Angka Kemiskinan"**

Dalam RKPD Tahun 2019 terbagi menjadi 5 (lima) prioritas daerah dan 21 (dua puluh satu) program prioritas yaitu :

- I. Percepatan penurunan angka kemiskinan
 1. Percepatan penurunan kemiskinan berbasis desa
 2. Peningkatan akses masyarakat terhadap perumahan dan permukiman layak
 3. Peningkatan daya beli masyarakat miskin
 4. Integrasi sistem perencanaan dan sistem penganggaran
 5. Peningkatan kualitas keterampilan tenaga kerja
 6. Revitalisasi pendidikan kejuruan
 7. Perencanaan berbasis data terpadu dan spasial
- II. Peningkatan pelayanan dasar
 8. Peningkatan kualitas dan pemerataan layanan kesehatan

9. Peningkatan kualitas dan pemerataan layanan pendidikan
10. Peningkatan pelayanan gizi masyarakat

- III. Peningkatan nilai tambah ekonomi melalui pertanian, industri, dan jasa produktif
 11. Hilirisasi produk pijari (Sapi, Jagung, Rumput Laut, Ikan)
 12. Peningkatan nilai tambah sektor pariwisata dan pengembangan ekonomi kreatif
 13. Peningkatan produksi dan keamanan pangan
- IV. Pemantapan infrastruktur strategis untuk mendukung peningkatan investasi, ketahanan pangan dan pariwisata
 14. Pembangunan dan pemeliharaan jaringan jalan
 15. Pembangunan sarana prasarana sumber daya air
 16. Pembangunan sarana prasarana perhubungan
 17. Pembangunan sarana dan prasarana dasar di destinasi wisata
 18. Modernisasi sarana prasarana produksi pertanian dan perikanan
- V. Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan penanggulangan bencana
 19. Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan kehutanan
 20. Peningkatan sarana dan prasarana kebencanaan
 21. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam kesiapsiagaan menghadapi bencana

BAB III : PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN TAHUN 2019

Program prioritas, rencana kerja dan pendanaan tahun 2019 dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah termasuk pemenuhan pelayanan dasar kepada masyarakat. Program prioritas pembangunan Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019 disusun dalam rangka memenuhi sasaran pokok dan arah kebijakan periode ke empat pembangunan tahun 2018-2023 yang tertuang dalam RPJPD Tahun 2005-2025 dan arah kebijakan serta prioritas pembangunan nasional sekaligus mempedomani tema pembangunan Nusa Tenggara Barat 2019 yaitu **"Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi untuk Percepatan Penurunan Angka Kemiskinan"**.

Rencana Kerja selanjutnya disusun melalui sistem entebePlan (<http://e-planning.ntbprov.go.id/>) sesuai tahapan proses perencanaan. Dalam penyusunan rencana kerja, selain memperhatikan RPJPD Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2005-2025 serta arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional, Renja disusun dengan mempertimbangkan pula aspirasi masyarakat yang diperoleh proses Musrenbang sebagai implementasi pendekatan bawah-atas (*bottom-up*). Adapun Program Prioritas Pembangunan Pemerintah Daerah Provinsi NTB Tahun 2019 sebagai berikut:

Tabel 3.1Program Prioritas PembangunanProvinsi NTB Tahun 2019

No	BID. URUSAN PEMERINTAHAN/PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAANNYA TAHUN 2019	
				TARGET	RP (000)
	URUSAN WAJIB TERKAIT PELAYANAN DASAR				1.450.021.468
	PENDIDIKAN				444.865.670
	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan				444.865.670
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	%	100	7.064.683
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Ketersediaan dan Kelayakan Sarana Prasarana Aparatur	%	100	1.936.432
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat Disiplin Aparatur	%	100	7.000
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupa Pembinaan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	%	100	1.321.971
5	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Tersusunnya dok. Perencanaan	Dokumen	7	606.779

No	BID. URUSAN PEMERINTAHAN/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAANNYA TAHUN 2019	
				TARGET	RP (000)
6	Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Manajemen Aset	Dokumen	1	271.927
7	Program Pembinaan Sekolah Menengah Atas (SMA)				64.141.493
		Persentase Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/Paket C	%	98,13	
		Persentase Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C	%	90,5	
		Persen Angka Partisipasi Sekolah (APS)	%	94,57	
		Persen Penurunan Angka Drop Out (DO),	%	0,35	
		Persentase Akreditasi SMA minimal B,	%	75,2	
		Rasio ketersediaan ruang kelas / penduduk usia sekolah pendidikan menengah	%	1,04	
8	Program Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)				82.661.833
		Persentase Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/Paket C	%	98,13	
		Persentase Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C	%	90,5	
		Persen Angka Partisipasi Sekolah (APS)	%	94,57	
		Persen Penurunan Angka Drop Out (DO),	%	0,73	
		Persentase Akreditasi SMK minimal B,	%	63,12	
		Rasio ketersediaan ruang kelas / penduduk usia sekolah pendidikan menengah	%	1,04	
		Persentase siswa SMK yang mendapat sertifikasi kompetensi,	%	2,05	
		Rasio Siswa SMK terhadap SMA	%	40.50	
9	Program Pembinaan Pendidikan Khusus Pendidikan Layanan Khusus (PKPLK)				12.075.884
		Persen Angka Partisipasi Kasar (APK)	%	68,44	
		Jumlah Siswa yang mendapatkan pendidikan keterampilan/Vokasi	Orang	45	

No	BID. URUSAN PEMERINTAHAN/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAANNYA TAHUN 2019	
				TARGET	RP (000)
10	Program Pembinaan Ketenagaan				4.503.613
		Ratio Guru terhadap Murid Pendidikan Menengah,		18	
		Rasio Guru terhadap Murid per kelas rata-rata untuk SLB,	%	16	
		Guru SMA/SMALB yang memenuhi Kualifikasi S1/DIV,	%	99,99	
		Guru SMK yang memenuhi Kualifikasi S1/DIV,	%	99,49	
		Kepala Sekolah bersertifikat	%	50	
		Pengawas Sekolah bersertifikat	%	35	
		Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan yang ditingkatkan kompetensinya	orang	200	
11	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan				59.884.957
		Angka Melanjutkan dr SD/MI ke SMP/MTs	%	100	
		Angka Melanjutkan dr SMP/MTs ke SMA/SMK/MA	%	99,98	
		Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI	%	108	
		Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs	%	110,1	
		Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD	%	78,22	
		Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI	%	99,72	
		Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs	%	98,54	
		Angka DO SD/MI	%	0,08	
		Angka DO SMP / MTs	%	0,15	
12	Program Sinkronisasi dan Koordinasi Pembangunan Pendidikan Nasional	Data pokok pendidikan dan kebudayaan	Dokumen	1	697.480
13	Program Peningkatan Layanan Pendidikan dan Kebudayaan				5.459.810
14	Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMA/SMK/SLB	Angka Drop Out SMA/SMK/SLB	%		203.076.077
15	Program Peningkatan Balai Teknologi dan Komunikasi Pendidikan	Persentase pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi pendidikan	%	86,6	1.155.731

No	BID. URUSAN PEMERINTAHAN/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAANNYA TAHUN 2019	
				TARGET	RP (000)
	KESEHATAN				506.762.217
	Dinas Kesehatan				55.214.971
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	%	100	5.447.617
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Ketersediaan dan Kelayakan Sarana Prasarana Aparatur	%	100	6.484.050
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan Pembinaan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	%	100	422.550
4	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Nilai LKJIP OPD	Nilai	B	197.427
5	Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Manajemen Aset	Dokumen	1	75.884
6	Program pelayanan kesehatan penduduk miskin	Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional	%	73	808.516
7	Program Penyediaan sarana dan prasarana sanitasi dasar	Proporsi rumah tangga dengan akses sanitasi layak	%	72,62	2.034.804
8	Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak	Persentase persalinan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	%	95	350.260
9	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	Persentase balita stunting	%	32,49	8.880.124
10	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular/Tidak Menular	Persentase pelayanan kesehatan bagi orang yang terdampak dan beresiko pada situasi KLB provinsi	%	100	1.434.155
11	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	Persentase Tempat-tempat Umum yang Memenuhi Syarat	%	76	159.700
12	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Persentase Posyandu Aktif	%	56	668.765
13	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	Persentase Ketersediaan Obat dan perbekalan kesehatan	%	96	2.125.245
14	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana	%	100	4.003.527
15	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Persentase fasilitas kesehatan yang terakreditasi	%	70	5.260.064
16	Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata	Persentase ketersediaan alat kesehatan sesuai standar	%	50	13.470.510
17	Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah	Persentase sarana dan prasarana yang terpelihara	%	100	43.050

No	BID. URUSAN PEMERINTAHAN/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAANNYA TAHUN 2019	
				TARGET	RP (000)
	sakit mata				
18	Program Kebijakan dan Manajemen Pembangunan Kesehatan	Persentase keselarasan program kesehatan pusat dan daerah	%	100	972.543
19	Program Sumber Daya Kesehatan	Persentase puskesmas yang mempunyai minimal 5 tenaga kesehatan	%	45	904.181
20	Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD	Persentase target pendapatan			1.472.000
	Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi				302.668.903
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	%	100	4.005.496
2	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan Pembinaan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	%	100	819.838
3	Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Manajemen Aset	Dokumen	1	44.400
4	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Persentase penanganan penyakit menular	%	20	200.000
5	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase Cakupan Layanan Kesehatan Masyarakat	%	20	4.380.162
6	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Nilai akreditasi	Perdana/Dasar/madya/utama/paripurna	Paripurna	600.000
7	Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana Rumah Sakit yang sesuai standar	%	76	127.619.008
8	Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD	Persentase realisasi target pendapatan	%	18,54	165.000.000
	Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma Provinsi				31.711.499
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	%	100	412.704
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Ketersediaan dan Kelayakan Sarana Prasarana Aparatur	%	100	9.396.000
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan Pembinaan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	%	38,42	581.000
4	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase cakupan layanan kesehatan masyarakat	%	15	404.795
5	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Nilai Akreditasi	status akreditasi	paripurna	69.000

No	BID. URUSAN PEMERINTAHAN/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAANNYA TAHUN 2019	
				TARGET	RP (000)
6	Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana Rumah Sakit yang sesuai standar	%	85	3.848.000
7	Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD	Persentase realisasi target pendapatan BLUD	%	17,54	17.000.000
	Rumah Sakit H. L. Manambai Abdul Kadir				117.166.844
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	%	100	13.486.372
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Ketersediaan dan Kelayakan Sarana Prasarana Aparatur	%	100	1.152.922
3	Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana Rumah Sakit yang sesuai standar	%	82	74.127.551
4	Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata	Persentase sarana dan prasarana yang terpelihara	%	100	900.000
5	Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD	Persentase Realisasi Target Pendapatan BLUD	%	100	27.500.000
	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				251.732.914
	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang				251.732.914
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat Kelancaran administrasi perkantoran	%	100	3.440.497
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat Kelancaran tugas aparatur	%	100	905.940
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Tingkat Kompetensi Aparatur	%	100	50.325
4	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Rencana program	Dokumen	39	333.996
5	Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Manajemen Aset	Dokumen	2	338.986
6	Program pembangunan jalan dan jembatan	Jaringan jalan Provinsi Dalam Kondisi Mantap	%	84,65	55.827.708
7	Program rehabilitasi/ pemeliharaan jalan dan jembatan	Jaringan jalan Provinsi Dalam Kondisi Mantap	%	84,65	15.532.728
8	Program pembangunan sistem informasi/data base jalan dan jembatan	Rencana program	Dokumen	2	237.130
9	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya	Indeks Kinerja Sistem Irigasi	%	56,18	54.277.309

No	BID. URUSAN PEMERINTAHAN/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAANNYA TAHUN 2019	
				TARGET	RP (000)
10	Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya	Kapasitas tampung	juta m3	4,34	45.109.000
11	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	Cakupan Air Minum	%	74,08	22.985.221
		Cakupan sanitasi	%	68,82	-
12	Program Pengendalian Banjir	Penurunan jumlah titik banjir	Titik	507	9.087.000
13	Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	Daya tumbuh wilayah strategis	%	21,85	19.064.603
14	Program Pembinaan Jasa Konstruksi	Daya serap jasa konstruksi bersertifikat	%	10	313.971
15	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Umum	Jumlah Gedung Pemerintah yang Berfungsi kembali	%	100	22.105.500
16	Program Perencanaan Tata Ruang	Persentase RTR yang disusun	%	-	219.546
17	Program Pemanfaatan Ruang	Persentase deviasi pelaksanaan RTRW terhadap rencana pemanfaatan	%	87,79	250.308
18	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	penurunan Penyimpangan tata ruang	%	20	898.178
19	Program Pengembangan Keterpaduan Infrastruktur Antar Kawasan	Tingkat keterpaduan infrastruktur antar Kawasan	%	5	108.026
20	Program Pengembangan Keterpaduan Infrastruktur Antar Sektor	Tingkat keterpaduan infrastruktur antar Sektor	%	5	89.739
21	Program Pengembangan Keterpaduan Infrastruktur Wilayah	Tingkat keterpaduan infrastruktur antar Wilayah	%	5	147.553
22	Program Pengembangan Pelayanan Jasa Pengujian	Sertifikasi hasil uji	Jenis	110	409.650
	PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN				189.166.700
	Dinas Perumahan dan Permukiman				189.166.700
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	%	100	1.347.130
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Ketersediaan dan Kelayakan Sarana Prasarana Aparatur	%	100	790.312
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan Pembinaan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	%	100	61.492
4	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Cakupan penyelenggaraan sistem akuntabilitas kinerja OPD	Dokumen	7	314.981

No	BID. URUSAN PEMERINTAHAN/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAANNYA TAHUN 2019	
				TARGET	RP (000)
5	Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Meningkatnya Kualitas Penatausahaan Barang Milik Daerah	Dokumen	1	32.642
6	Program Pengembangan Perumahan	Cakupan Rumah Layak Huni (RLH) yang tertangani	%	92,37	17.040.482
7	Program perbaikan perumahan akibat bencana alam/sosial	Persentase rumah korban gempa yang telah direhabilitasi dan direkonstruksi	%	75	1.154.462
8	Program Pengembangan Permukiman	Persentase Permukiman yang tertata	%	5,18	168.425.200
	KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT				22.103.810
	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri				11.317.328
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya kualitas dan kapasitas layanan administrasi perkantoran	Tahun	1	1.045.476
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatkan kapasitas dan efektifitas layanan	Tahun	1	413.161
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Tersedianya pegawai yang terampil dan sehat	Orang	65	15.600
4	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan (jumlah dokumen Perenc & Pelaporan	Dokumen	11	248.890
5	Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Tersedianya Laporan Aset	Dokumen	2	19.700
6	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Persentase ormas yang meningkat kapasitas wawasan kebangsaannya	%	20	521.000
7	Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan	Penurunan Konflik Sosial	Kasus	24	5.805.000
8	Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT)	Terwujudnya Desa Bersinar (Bersih Narkoba)	Desa	10	2.000.000
9	Program Pendidikan Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan Masyarakat	Cakupan masyarakat yang mendapat pendidikan politik pada wilayah dengan tingkat partisipasi politik rendah	%	20	1.248.500
	Satuan Polisi Pamong Praja				3.901.246
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kelancaran administrasi perkantoran	%	100	729.372
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat Kelancaran Tugas Aparatur	%	100	1.075.758
3	Program peningkatan disiplin aparatur	Tingkat Disiplin Aparatur	%	100	109.350
4	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Rencana Program	%	100	253.536

No	BID. URUSAN PEMERINTAHAN/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAANNYA TAHUN 2019	
				TARGET	RP (000)
5	Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Manajemen Asset	%	100	18.558
6	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Persentase Petugas Pelindungan Masyarakat (LINMAS)	%	100	417.494
7	Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	Persentase Penanganan Pelanggaran Produk Hukum Daerah (Perda dan Pergub)	%	100	1.018.779
8	Program Peningkatan, Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT)	Persentase Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman dan Keindahan)	%	100	278.398
	Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi NTB				6.885.237
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Mneingkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	%	100	1.506.672
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur	%	100	1.232.669
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur	%	100	18.000
4	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Meningkatnya Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	%	100	169.200
5	Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Meningkatnya Kapasita Pengelolaan Keuangan Daerah	%	100	25.000
6	Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam	Persentase Masyarakat dan Dunia Usaha Aktif dalam Penanggulangan Bencana	%	15	3.733.696
7	Program Rehabilitasi dan Rekontruksi Penanganan Penanggulangan Bencana	Pesentase realisasi rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana (struktural dan non struktural)	%	50	200.000
		Persentase penurunan jumlah korban bencana setelah Rehabilitasi/Rekonstruksi	%	30	
	SOSIAL				35.390.157
	Dinas Sosial				35.390.157
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan adminitrasi perkantoran	%	100	3.986.452
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan ketersediaan & kelayakan sarana dan prasarana aparatur	%	100	5.091.904
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan pembinaan kapasitas sumber daya Aparatur	%	100	193.975
4	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Cakupan penyelenggaraan sistem akuntabilitas OPD	%	100	320.135

No	BID. URUSAN PEMERINTAHAN/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAANNYA TAHUN 2019	
				TARGET	RP (000)
5	Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Meningkatnya kualitas penatausahaan BMD	%	100	122.401
6	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, KAT dan PMKS Lainnya	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial	%	1,78	9.150.953
7	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Persentase PMKS yang tertangani	%	2,69	12.747.707
8	Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma	Persentase Penyandang Cacat Fisik dan Mental serta Korban Trauma yang dibina	%	2,5	70.330
9	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Persentase lembaga sosial yang menyediakan sarana dan prasarana pelayanan kesejahteraan sosial	%	100	2.822.600
10	Program Jaminan Sosial	Persentase PMKS yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial	%	55,5	883.700
	URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR				123.146.183
	TENAGA KERJA				8.123.500
	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi				8.123.500
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	%	100	2.514.706
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur	%	100	1.699.037
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur	%	100	139.708
4	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Meningkatnya Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	%	100	394.029
5	Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Meningkatnya Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	%	100	84.925
6	Program Peningkatan Perencanaan dan Pelaporan	Meningkatnya Perencanaan dan Pelaporan	%	100	154.192
7	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	%	85	867.500
8	Program Perluasan dan Pengembangan Kesempatan Kerja	Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	%	90	1.589.888
9	Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	Besaran sengketa pengusaha-pekerja	%	70	255.187
10	Program Pengawasan Ketenagakerjaan	Besaran Pemeriksaan Perusahaan	%	95	424.328

No	BID. URUSAN PEMERINTAHAN/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAANNYA TAHUN 2019	
				TARGET	RP (000)
	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK				5.849.130
	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana				5.849.130
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	tahun	100	885.528
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Ketersediaan dan Kelayakan Sarana Prasarana Aparatur	%	100	385.300
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan Pembinaan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	%	100	31.400
4	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Dokumen Pelaporan	Dokumen	6	238.990
5	Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Manajemen Aset	Dokumen	1	22.020
6	Program Peningkatan Peran serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan	Cakupan perempuan kelompok sasaran yang bekerja	%	0,086	998.875
7	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) dan anak	Presentase Kab/Kota yang memiliki peraturan perundang-undangan yang mendukung PUG dan PUHA	%	50	2.101.297
8	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan	%	56,74	976.920
9	Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan	Persentase OPD yang mengintegrasikan PPRG	%	51,11	208.800
	PANGAN				7.760.671
	Dinas Ketahanan Pangan				7.760.671
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat Kelancaran Administrasi Perkantoran	%	100	838.504
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Ketersediaan dan Kelayakan Sarana Prasarana Aparatur	%	100	790.109
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan Pembinaan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	%	100	21.380
4	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Nilai LKjIP OPD		B	301.565
5	Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Manajemen Aset	DOKUMEN	1	46.412

No	BID. URUSAN PEMERINTAHAN/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAANNYA TAHUN 2019	
				TARGET	RP (000)
6	Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/ perkebunan)	Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan	POINT	87,93	5.603.277
7	Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan	Cakupan Pemasaran Produk Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) dan Produk Olahan	%	73,91	159.425
	PERTANAHAN				210.978
	Sekretariat Daerah				210.978
	Biro Pemerintahan				210.978
1	Program Peningkatan Tertib Administrasi Pertanahan	Cakupan konflik pertanahan yang difasilitasi	%	100	210.978
	LINGKUNGAN HIDUP				19.664.571
	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan				19.664.571
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	%	100	2.817.265
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Ketersediaan dan Kelayakan Sarana Prasarana Aparatur	%	100	870.428
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan Pembinaan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	%	100	331.065
4	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Nilai LKJIP OPD		B	457.059
5	Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Manajemen Aset	Dokumen	19	148.072
6	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Persentase Pengurangan Sampah	%	10	13.223.731
		Persentase penanganan sampah	%	50	
7	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Cakupan lokasi yang dikendalikan kualitas air dan udaranya	Lokasi	2	1.816.953
	ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL				1.716.045
	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil				1.716.045
1	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Rasio Penduduk BerKTP Persatuan Penduduk *	rasio	0,8	1.716.045

No	BID. URUSAN PEMERINTAHAN/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAANNYA TAHUN 2019	
				TARGET	RP (000)
	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA				8.132.445
	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil				8.132.445
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tersedianya Pelayanan Adminstrasi perkantoran	%	100	1.210.715
2	Program Peningkatan Saranan dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya sarana dan Prasarana Aparatur	%	100	3.060.500
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya Kapasitas Sumberdaya aparatur	%	100	18.000
4	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tercapainya pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Dokumen	6	164.200
5	Program Peningkatan Kapasitas Pengelola Keuangan Daerah	Meningkatnya Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Dokumen	1	21.950
6	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	Prosentase Posyantek yang terbentuk dan aktif	%	40	361.315
7	Program pengembangan lembaga ekonomi perdesaan	Prosentase BUMDes yang terbentuk dan aktif	%	84	1.774.410
8	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa	Prosentase Lembaga Adat terbentuk dan aktif	%	50	111.130
9	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Prosentase Aparatur Desa terlatih	%	36	1.209.670
10	Program Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan	Persentase PKK Aktif	%	20	200.555
	PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA				1.059.190
	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana				1.059.190
1	Program Kesehatan Reproduksi Remaja	Rata-rata usia kawin pertama	tahun	20,42	611.135
2	Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR)	Cakupan Pusat Informasi Konseling Remaja (PIK-R) yang aktif	%	1,89	166.000
3	Program Promosi Kesehatan Ibu Bayi dan Anak Melalui Kelompok Kegiatan di Masyarakat	Cakupan Anggota kelompok BKB, BKR dan BKL yang ber KB	%	66,92	168.855
4	Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga	Persentase tenaga PLKB/PKB yg berwawasan TRI BINA	%	2,8	113.200

No	BID. URUSAN PEMERINTAHAN/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAANNYA TAHUN 2019	
				TARGET	RP (000)
	PERHUBUNGAN				8.868.403
	Dinas Perhubungan				8.868.403
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	%	100	2.291.667
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Ketersediaan dan Kelayakan Sarana Prasarana Aparatur	%	100	436.345
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan Sumber Daya Aparatur Yang Mengikuti Diklat	%	28,41	27.640
4	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Cakupan Pelaporan Kinerja dan Keuangan	%	100	157.549
5	Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Cakupan Aset Yang Dimanfaatkan	%	100	35.278
6	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Persentase dokumen perencanaan perhubungan yang selaras dengan RTRW	%	37,93	2.937.635
7	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Cakupan prasarana dan fasilitas perhubungan yang terpelihara	%	100	95.650
8	Pogram Peningkatan Pelayanan Angkutan	Cakupan Angkutan yang Layak	%	79,12	1.329.241
9	Program Peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas	Rasio Fatalitas Kecelakaan Lalu Lintas	%	3,24	293.250
10	Program peningkatan Manajemen Transportasi	Cakupan Kota Tertib Lalu Lintas	%	20	91.963
11	Program Pengembangan Transportasi Laut	Rasio Pertumbuhan Angkutan Penumpang	%	5	1.172.184
	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				11.034.377
	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik				11.034.377
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	%	100	1.463.655
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Ketersediaan dan Kelayakan Sarana Prasarana Aparatur	%	100	1.278.950
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan Pembinaan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	%	100	144.553
4	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Nilai LKJIP OPD		100	218.021
5	Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Manajemen Aset	Dokumen	1	42.537
6	Program Pengembangan e-Government	Indeks Maturitas Sistem Pemerintahan Berbasis	Skor	3	2.200.000

No	BID. URUSAN PEMERINTAHAN/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAANNYA TAHUN 2019	
				TARGET	RP (000)
		Elektronik (SPBE)			
7	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Persentase informasi yang terpublikasi	%	70	2.376.864
8	Program Peningkatan SDM Bidang Komunikasi Informatika dan Statistik	Persentase Peningkatan Pemahaman SDM di Bidang Komunikasi Informatika	%	50	420.540
9	Program Penguatan Keterbukaan Informasi Publik	Cakupan Badan Publik yang Informatif	%	4	2.776.482
10	Program Pengelolaan Pelayanan Telekomunikasi	Cakupan Layanan Telekomunikasi	%	89,04	112.774
	KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH				9.286.906
	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah				9.286.906
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	%	100	1.417.396
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Ketersediaan dan Kelayakan Sarana Prasarana Aparatur	%	100	511.074
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan Pembinaan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	%	100	14.800
4	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Nilai LKJIP OPD	%	A	305.665
5	Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Manajemen Aset	%	100	25.913
6	Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah Yang Kondusif	Persentase Legalitas Usaha	%	40	155.150
7	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	Prosentase Peningkatan Kapasitas SDM	%	17,69	5.067.090
8	Pogram Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah	Persentase peningkatan usaha kecil ke menengah	%	0,29	359.234
9	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Persentase Koperasi Aktif	%	65,14	1.430.585
	PENANAMAN MODAL				3.449.278
	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu				3.449.278
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	%	100	828.368
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Ketersediaan dan Kelayakan Sarana	%	100	99.675

No	BID. URUSAN PEMERINTAHAN/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAANNYA TAHUN 2019	
				TARGET	RP (000)
		Prasarana Aparatur			
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan Pembinaan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	%	100	14.400
4	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Nilai LKJIP OPD	%	100	179.858
5	Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah		%	100	19.285
6	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Tindak Lanjut Hasil Promosi	Perusahaan	17	1.340.005
7	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Nilai Realisasi Investasi	Rp. Milyar	16.000	967.687
	KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA				17.295.521
	Dinas Pemuda dan Olahraga				17.295.521
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	%	100	1.632.600
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Ketersediaan dan Kelayakan Sarana Prasarana Aparatur	%	100	350.276
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan Pembinaan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	%	100	169.400
4	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Nilai LKJIP OPD	Nilai	B	395.161
5	Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Manajemen Aset	Dokumen		27.612
6	Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda	Kelompok pemuda yang berpartisipasi aktif dalam pembangunan pendidikan	%	60	1.386.994
7	Program peningkatan peran serta kepemudaan	Jumlah pemuda berprestasi	Orang	6	1.584.390
8	Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda	Presentase wirausahawan muda	%	67,97	500.000
9	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga	Cakupan pembinaan atlet berprestasi	%	100	6.142.344
10	Program Peningkatan Sarana Prasarana Pemuda dan Olahraga	Persentase sarana prasarana pemuda dan olahraga yang terstandar	%	35	5.106.745

No	BID. URUSAN PEMERINTAHAN/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAANNYA TAHUN 2019	
				TARGET	RP (000)
	STATISTIK				1.499.999
	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik				1.499.999
1	Program Pengembangan Data/Informasi/ Statistik Daerah	Cakupan ketersediaan data yang terintegrasi	%	60	1.499.999
	PERSANDIAN				278.635
	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik				278.635
1	Program Optimalisasi Keamanan Informasi dan Tata Kelola Persandian	Cakupan Produk Hukum OPD yang diotentifikasi	%	4,4	278.635
	KEBUDAYAAN				11.544.971
	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan				11.544.971
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	%	100	2.536.989
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Ketersediaan dan Kelayakan Sarana Prasarana Aparatur	%	100	294.300
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan Pembinaan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	%	100	187.527
4	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Nilai LKJIP OPD	Nilai	B	48.586
5	Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Manajemen Aset	Dokumen		19.560
6	Program Pengembangan Nilai Budaya	Persentase kelompok adat budaya yang dikembangkan	%	100	2.937.781
7	Program Pengembangan Pengelolaan Kekayaan Budaya	Persentase karya budaya yang direvitalisasi dan diinventarisasi	%	100	2.163.534
8	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Persentase penyelenggaraan Festival seni	%	100	2.911.020
9	Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Budaya Daerah	Persentase penyelenggaraan Festival seni	%	100	445.675
	PERPUSTAKAAN				6.969.347
	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan				6.969.347
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	%	100	1.634.522

No	BID. URUSAN PEMERINTAHAN/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAANNYA TAHUN 2019	
				TARGET	RP (000)
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Ketersediaan dan Kelayakan Sarana Prasarana Aparatur	%	100	4.009.747
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan Pembinaan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	%	100	35.286
4	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Jumlah Pelaporan Kinerja	dokumen	6	214.620
5	Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Manajemen Aset	dokumen	1	23.200
6	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	Jumlah Pengunjung Perpustakaan per Tahun	kunjungan	1.052.000	1.051.972
	KEARSIPAN				402.216
	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan				402.216
1	Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah	Jumlah Arsip yang terselamatkan dibagi total arsip yang tersimpan di depo	%	33,33	149.797
2	Program Pemeliharaan Rutin/berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kearsipan	%	100	76.950
3	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi	Peningkatan Kualitas SDM Layanan Informasi	Orang	95	138.189
4	Program Peningkatan dan Pengendalian Kearsipan	Peningkatan Record Center OPD	OPD	15	37.280
	URUSAN PILIHAN				254.384.167
	KELAUTAN DAN PERIKANAN				22.199.407
	Dinas Kelautan dan Perikanan				22.199.407
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	%	100	3.988.510
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Ketersediaan dan Kelayakan Sarana Prasarana Aparatur	%	100	4.594.466
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan Pembinaan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	%	100	33.000
4	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Nilai LKJIP OPD	Nilai	BB	245.104
5	Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Manajemen Aset	Dokumen	1	107.783

No	BID. URUSAN PEMERINTAHAN/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAANNYA TAHUN 2019	
				TARGET	RP (000)
6	Pengelolaan Sumberdaya Laut, pesisir dan Pulau - pulau Kecil	Rasio Kawasan Konservasi perairan terhadap total luas perairan territorial	Rasio	0,086	3.008.350
7	Program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir	Persentase Kelompok Masyarakat Pesisir yang diberdayakan	%	0,59	1.500.000
8	Program Pengembangan Budidaya Perikanan	Produksi perikanan Budidaya	ton	1.148.696	3.015.050
9	Program Pengembangan dan Pengelolaan Perikanan Tangkap	Produksi perikanan Tangkap	Ton	227.961	4.143.400
10	Program Optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan	Angka Konsumsi Ikan	Kg/ Kapita/ Thn	35,89	1.563.745
	PARIWISATA				25.381.442
	Dinas Pariwisata				25.381.442
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	%	100	2.137.761
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan ketersediaan sarpras yang ber kondisi baik	%	100	281.400
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan pembinaan ASN yang berkompeten	%	100	49.000
4	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Nilai LKJIP OPD	%	100	236.050
5	Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Manajemen Aset	%	100	19.325
6	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Angka kunjungan wisatawan	orang	4.000.000	2.667.458
7	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	Persentase Desa Wisata yang dikembangkan (target 99 desa)	%	40	16.064.136
8	Program Pengembangan Kemitraan	Persentase SDM penunjang layanan pariwisata yang memenuhi standar	%	0	753.075
9	Program Pengembangan Atraksi dan Daya Tarik Wisata	Rata-rata Lama Menginap	hari	2,75	3.173.237
	PERTANIAN				124.878.117
	Dinas Pertanian dan Perkebunan				107.090.439
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	%	100	9.161.486
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Ketersediaan dan Kelayakan Sarana dan Prasarana Aparatur	%	100	7.328.103

No	BID. URUSAN PEMERINTAHAN/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAANNYA TAHUN 2019	
				TARGET	RP (000)
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan Pembinaan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	%	100	203.705
4	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Nilai LKJIP OPD			494.302
5	Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Manajemen Aset	Dokumen		244.009
6	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	Nilai Tukar Petani		100	5.166.924
7	Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan	Persentase Peningkatan Produksi Tanaman Pertanian/ Perkebunan	%	1	82.886.071
		Produksi Padi	Ton GKG		
		produksi Jagung	Ton PK		
		Produksi Kedelai	Ton Biji Kering		
		Produksi Cabe	Ton Buah Segar		
		Produksi Bawang Merah	Ton Umbi Basah		
		Produksi Manggis	Ton Buah Segar		
		Produksi Tembakau			
		Produksi Kopi	Ton Berasan		
		Produksi Kakao	Ton		
		Produksi Kelapa	Ton Eq. Kopra		
		Produksi Mete	Ton Biji Kering		
8	Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan	Persentase Penyuluh Yang Ditingkatkan Kapasitasnya	%	26,75	1.605.839
	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan				17.787.678
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	%	100	2.097.137
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Ketersediaan dan Kelayakan Sarana Prasarana Aparatur	%	100	425.370
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan Pembinaan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	%	100	215.358
4	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Nilai LKJIP OPD		85	956.518

No	BID. URUSAN PEMERINTAHAN/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAANNYA TAHUN 2019	
				TARGET	RP (000)
5	Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Manajemen Aset	%	100	112.740
6	Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	Pertumbuhan Populasi Ternak	%	5	13.393.831
7	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak	Persentase Penurunan Ternak Yang Terinfeksi PHMS	%	< 1	297.968
8	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan	Cakupan Produksi Peternakan Yang Dipasarkan	%	75%	97.750
9	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan	Cakupan Kelompok Ternak Yang Memanfaatkan Teknologi Peternakan	Kelompok	100 Kelompok	191.007
	KEHUTANAN				42.813.456
	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan				42.813.456
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	%	100	3.191.137
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Ketersediaan dan Kelayakan Sarana Prasarana Aparatur	%	100	3.962.624
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan Pembinaan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	%	100	106.074
4	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Nilai LKJIP OPD		85	577.113
5	Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Manajemen Aset	%	100	224.749
6	Program Perlindungan Hutan, Konservasi sumber daya alam dan ekosistem	Rasio Kemampuan perlindungan hutan	%	0,0009	16.609.854
7	Program Pengelolaan Hutan	Persentase desa sekitar hutan yang diberdayakan melalui pembentukan kelompok HHBK dan Jasling	%	28,6	9.871.833
		Cakupan Luas Pengembangan Tanaman Gaharu dan HHBK Lainnya	%	0,08	
8	Program Rehabiltasi Kerjasama dan Perhutanan Sosial	Persentase desa sekitar hutan yang diberdayakan berbasis perhutanan social	%	29,22	8.270.071
		Persentase penurunan luas lahan kritis	%	0,53	

No	BID. URUSAN PEMERINTAHAN/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAANNYA TAHUN 2019	
				TARGET	RP (000)
	ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL				12.412.548
	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral				12.412.548
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	%	100	1.035.562
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Ketersediaan dan Kelayakan Sarana Prasarana Aparatur	%	100	425.740
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan Pembinaan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	%	100	39.966
4	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Nilai LAKIP	Nilai	B	194.354
5	Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Nilai LAKIP	Nilai	B	22.146
6	Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan	Persentase Pemegang IUP yang melaksanakan Good Mining Practices	%	2,17	687.830
7	Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan	Rasio Elektrifikasi	%	94,46	2.508.249
8	Program Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Air Tanah	Cakupan masyarakat yang terlayani air bersih	KK	2040	6.791.461
9	Program Pengembangan dan Pengelolaan Energi dan Sumber Daya Mineral	Persentase Keselarasan pengembangan dan pengelolaan energi dan sumber daya mineral	%	85	361.333
10	Program Pencegahan Kerusakan Lingkungan	Jumlah situs geologi yang dilindungi	Situs	3	128.538
11	Program Pengembangan dan Pemanfaatan Energi	Kontribusi pembangkit listrik EBT	%	5,5	217.369
	PERDAGANGAN				13.678.459
	Dinas Perdagangan				13.678.459
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat Kelancaran Administrasi Perkantoran	%	100	1.217.365
2	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	Tingkat Kelancaran Administrasi Perkantoran	%	100	1.128.654
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Tingkat Kompetensi Aparatur	%	100	16.350
4	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan keuangan	Rencana Program	Dokumen	9	485.633
5	Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan	Manajemen Asset	Dokumen	1	27.800

No	BID. URUSAN PEMERINTAHAN/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAANNYA TAHUN 2019	
				TARGET	RP (000)
	Daerah				
6	Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	Tingkat Penyelesaian Pengaduan Konsumen	%	70	546.353
7	Program Peningkatan Kerjasama Perdagangan Internasional	Pertumbuhan Jumlah Negara Tujuan Ekspor	%	21	118.000
8	Program Peningkatan Dan Pengembangan Ekspor	Persentase Peningkatan Kerjasama Jejaring Usaha dan Mitra	%	41,21	750.832
9	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	Cakupan Harga Bahan Pokok Yang Stabil Antar Waktu Antar Wilayah	%	6	1.483.910
10	Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima Dan asongan	Persentase Peningkatan Pedagang Kakilima dan usaha informal yang memperoleh peralatan perdagangan	%	15,38	6.811.600
11	Program Pembinaan Dan Pengembangan Usaha Daerah	Persentase Kerjasama, Jejaring Usaha Dan Mitra	%	60	1.091.962
	PERINDUSTRIAN				12.863.238
	Dinas Perindustrian				12.863.238
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	%	100	1.316.985
2	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	Cakupan Ketersediaan Dan Kelayakan Sarana Dan Prasarana Aparatur	%	100	578.900
3	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	Rencana Program , Pelaporan Kinerja Dan Keuangan	Dokumen	17	409.005
4	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan	Manajemen Aset	Dokumen	2	19.750
5	Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi	Cakupan Ikm Yang Terbina Dalam Kapasitas Iptek Sistem Produksi	%	10,58	2.844.515
6	Program Pengembangan Industri Kecil Dan Menengah	Cakupan Ikm Yang Terbina	%	2,69	3.082.325
7	Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri	Cakupan Ikm Yang Menerapkan Teknologi Dalam Proses Produksi	%	4,16	3.716.575
8	Program Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial	Cakupan Sentra Industri Potensial Yang Dikembangkan	%	5,22	358.625

No	BID. URUSAN PEMERINTAHAN/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAANNYA TAHUN 2019	
				TARGET	RP (000)
9	Program Kerjasama Pembangunan Sektor Perindustrian	Jumlah Kerjasama Ikm Dengan Mitra	IKM	60	436.608
10	Program Peningkatan Mutu Dan Pengembangan Komoditi Unggulan Daerah	Cakupan Ikm Dalam Pengembangan Komoditi Unggulan Daerah	%	0,97	99.950
	TRANSMIGRASI				157.500
	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi				157.500
1	Program Penempatan dan Pengembangan Wilayah Transmigrasi	Cakupan Penempatan Transmigran	%	80	157.500
	URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG				354.690.123
	ADMINISTRASI PEMERINTAHAN				163.535.946
	Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				
	Sekretariat Daerah				73.833.071
	Biro Umum				28.123.831
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	%	90	15.767.988
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Ketersediaan dan Kelayakan Sarana Prasarana Aparatur	%	90	8.683.688
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan Pembinaan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	%	90	517.155
4	Program Peningkatan Pengembangan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Nilai LKJIP OPD			420.486
5	Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Manajemen Aset	dokumen	2	379.600
6	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah	Cakupan pelayanan kedinasan KDH/WKDH	%	100	2.354.914
	Biro Organisasi				1.980.336
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	persentase administrasi perkantoran yang terlaksana	%	100	344.999
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	persentase sarana prasarana aparatur yang terpelihara	%	100	198.392

No	BID. URUSAN PEMERINTAHAN/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAANNYA TAHUN 2019	
				TARGET	RP (000)
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya aparatur	Cakupa Pembinaan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	%	100	20.000
4	Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	persentase sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	%	100	86.590
5	Program Peningkatan kapasitas pengelolaan keuangan daerah	persentase laporan asset yang tersusun	%	100	12.480
6	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Jumlah Unit Kerja Pelayanan publik yang berprestasi	Unit	9	228.367
		Persentase Unit Kerja Pelayanan publik yang survey kepuasan masyarakat meningkat	%	60	
7	Program Evaluasi Kinerja SKPD	Persentase Perangkat Daerah yang akuntabel	%	75	59.863
8	Program pengembangan sistem analisis formasi jabatan dan pendayagunaan aparatur	persentase dokumen pendayagunaan aparatur yang tersusun	%	90	300.000
9	Program Peningkatan Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi	persentase laporan kinerja pemerintah yang bernilai A / BB	%	50	223.660
10	Program Penataan Daerah Otonomi Baru	Persentase perangkat daerah / UPTD/UPTB yang ditata	%	85	397.500
11	Program Reformasi Ketatalaksanaan	Persentase perangkat daerah yang menerapkan SOP secara baik	%	80	61.600
12	Program Peningkatan Budaya Kerja	Persentase perangkat daerah yang menerapkan budaya kerja baik	%	70	46.885
	Biro Hukum				2.539.119,00
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	%	100	530.497
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Ketersediaan dan Kelayakan Sarana Prasarana Aparatur	%	100	178.512
3	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Cakupan Penyelenggaraan sistem akuntabilitas kinerja OPD	%	100	75.000
4	Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Meningkatnya Kualitas Penatausahaan Barang Milik Daerah	%	12	12.900
5	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	Persentase Produk Hukum Daerah yang terbentuk	Dokumen	100	1.167.850
6	Program Bantuan Hukum dan HAM	Persentase penanganan kasus-kasus hukum	%	100	574.360
	Biro Pemerintahan				2.928.863

No	BID. URUSAN PEMERINTAHAN/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAANNYA TAHUN 2019	
				TARGET	RP (000)
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	cakupan pelayanan administrasi perkantoran	%	100	582.540
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	cakupan ketersediaan dan kelayakan sarana prasarana aparatur	%	100	58.000
3	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat pelaporan capaian kinerja dan keuangan	%	100	140.400
4	Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Manajemen aset	dok	3	11.100
5	Program Peningkatan Kualitas Kinerja Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan/Desa	Tingkat meningkatnya kualitas kinerja kecamatan dan kelurahan	%	100	72.366
6	Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah	cakupan fasilitasi kerjasama antar pemerintah daerah	%	100	236.000
7	Program Penataan Daerah Otonomi Baru	Daerah Otonomi yang ditata	Kab/Kota	10	1.267.567
8	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan	Rangking LPPD	%	100	560.890
	Biro Perekonomian				2.064.135
1	Program Pelayan Adinistrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	%	100	241.290
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Ketersediaan dan Kelayakan Sarana dan Prasarana Aparatur	%	100	83.350
3	Program Peningkatan Pengembangan Sistim pelaporan capaian kinerja dan keuangan		%	100	84.430
4	Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah				10.051
5	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase kontribusi hasil BUMD terhadap PAD	%	100	395.869
6	Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur dan Pengawasan	Cakupan Perda/Pergub pengelola BUMD	%	100	197.260
7	Program Peningkatan dan Pengembangan Produksi Daerah	Persentase peningkatan produksi daerah	%		705.000
8	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Nilai Realisasi Investasi	Rp. Milyar	16.000	175.735
9	Program Pengembangan Data dan Informasi Perekonomian	Cakupan rekomendasi kebijakan ekonomi yang ditindaklanjuti	%	100	171.150
	Biro Bina Administrasi Pengendalian				3.516.616

No	BID. URUSAN PEMERINTAHAN/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAANNYA TAHUN 2019	
				TARGET	RP (000)
	Pembangunan dan LPBJP				
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	%	100	507.819
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Ketersediaan dan Kelayakan Sarana Prasarana Aparatur	%	100	170.308
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupa Pembinaan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	%	76	20.000
4	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Nilai LKJIP OPD	Nilai	CC	91.595
5	Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Cakupa Pembinaan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		100	10.940
6	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Tingkat kepatuhan OPD terhadap standar harga	%	76	123.332
7	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Tingkat Kematangan UKPBJ		3	2.476.568
8	Program Optimalisasi Pelayanan e-Procurement	Prosentase Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa yang Transparan sesuai Standar (17 Standar)		100	116.054
	Biro Kesejahteraan Rakyat				8.854.492
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	%	100	507.589
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Ketersediaan dan Kelayakan Sarana Prasarana Aparatur	%	100	107.424
3	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tercapainya pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Dokumen	4	107.378
4	Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Manajemen Aset	Dokumen	1	14.678
5	Program Peningkatan Pelayanan Keagamaan	Persentase Pelaksanaan kegiatan Keagamaan	%	100	6.598.593
6	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Persentase penanganan penyakit menular dan penyakit tidak menular	%	100	169.571
7	Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas anak dan Perempuan.	Persentase OPD yang mengintegrasikan PPRG	%	100	104.870
8	Program Peningkatan Peranserta Kepemudaan	Persentase keikutsertaan Pemuda berprestasi.	%	100	311.150
9	Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	Cakupan Koordinasi TKI informal yang mendapat penanganan	%	100	27.500

No	BID. URUSAN PEMERINTAHAN/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAANNYA TAHUN 2019	
				TARGET	RP (000)
10	Program Peningkatan Penanggulangan Narkoba, Penyakit Manular Seksual (PMS) termasuk HIV/AIDS.	Persentase Siswa yang tidak menggunakan Narkoba, HIV/AIDS dan PMS	%	100	500.000
11	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat	Cakupan Koordinasi Rumpun Kesra	Kali	1	375.740
12	Program Pelayanan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Persentase Penanganan PMKS	%	100	30.000
	Biro Humas dan Protokol				22.325.681
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	%	100	2.218.356
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Ketersediaan dan Kelayakan Sarana Prasarana Aparatur	%	100	1.707.600
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan Pembinaan Kapasitas Sumber daya Aparatur	%	100	54.800
4	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Dok	100	197.800
5	Program peningkatan kapasitas pengelolaan keuangan daerah	Manajemen Aset	Dok	1	7.224.839
6	Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah	Cakupan pelayanan kedinasan KDH/WKDH	%	100	4.950.194
7	Program Kerjasama Informasi dan Media massa	Persentase Kerjasama Informasi dan Media Massa	%	90	5.951.554
8	Program Pengembangan Komunikasi Informasi dan mass media	Persentase Pengembangan Komunikasi Informasi dan Mass Media	%	89	20.538
	Biro Administrasi Kerjasama				1.500.000
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	%	100	1.231.200
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Ketersediaan dan Kelayakan Sarana Prasarana Aparatur	%	100	83.800
3	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Tersusunnya Laporan capaian kinerja dan Keuangan yg baik	Dok	2	10.000
4	Program peningkatan kapasitas pengelolaan keuangan daerah	Manajemen Aset	Dok	1	25.000
5	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Persentase Kerjasama Pemerintahan dan Non Pemerintahan yang terjalin	%	100	150.000

No	BID. URUSAN PEMERINTAHAN/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAANNYA TAHUN 2019	
				TARGET	RP (000)
	Dewan Perwakilan rakyat Daerah				82.948.715
	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah				82.948.715
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	%	100	8.269.581
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Ketersediaan dan Kelayakan Sarana dan Prasarana Aparatur	%	100	7.053.844
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan Pembinaan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	%	100	352.265
4	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Cakupan Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja OPD	%	100	317.243
5	Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Meningkatnya Kualitas Penatausahaan Barang Milik Daerah	%	100	35.138
6	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	Cakupan Perda yang diinisiasi DPRD	%	37,5	66.920.643
		Cakupan Rekomendasi DPRD kepada Eksekutif yang ditindaklanjuti	%	80	
	Badan Penghubung Daerah				6.754.161
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	%	100%	3.353.211
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Ketersediaan dan Kelayakan Sarana dan Prasarana Aparatur	%	100	2.639.450
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan Pembinaan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	%	100	9.000
4	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Cakupan Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja OPD	%	100	113.800
5	Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Meningkatnya Kualitas Penatausahaan Barang Milik Daerah	%	100	20.700
6	Program Peningkatan Pelayanan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Keala Daerah				98.000
7	Program Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara	Jumlah kunjungan wisatawan pada Anjungan Daerah NTB di Jakarta		35.000	520.000
	PENGAWASAN				14.413.479
	Inspektorat				14.413.479

No	BID. URUSAN PEMERINTAHAN/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAANNYA TAHUN 2019	
				TARGET	RP (000)
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Tingkat Kepuasan Pelayanan	%	60	2.278.212
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Tingkat Kepuasan Pelayanan	%	60	1.056.520
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Tingkat Kepuasan Pelayanan	%	60	2.802.932
4	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase Tingkat Kepuasan Pelayanan	%	60	244.525
5	Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Tingkat Kepuasan Pelayanan	%	60	36.928
6	Program Peningkatan Sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kepala daerah	- Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan	%	82	3.839.509
		- Persentase Penurunan Angka Kerugian Negara/Daerah (-)		32,17	
8	Program Penguatan Akuntabilitas Kinerja	Persentase Hasil Evaluasi SAKIP PD Predikat BB-AA	%	22,22	617.236
9	Program Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah di Lingkungan Provinsi NTB	Persentase Peningkatan Level Maturitas OPD terdefinisi-terkelola dan terukur	%	37,77	110.139
10	Program Peningkatan Kapabilitas APIP	Tingkat Kapabilitas APIP	Level	Integrated (Level III)	453.001
		Persentase Auditor dan P2UPD bersertifikasi	%	55	
11	Program Pencegahan Korupsi	Persentase Penyelesaian Pengaduan Masyarakat tepat waktu	%	93	2.974.477
		Persentase PD Zona Integritas berpredikat WBK		8,88	
		Persentase PD Zona Integritas berpredikat WBBM		4,44	
	PERENCANAAN				29.251.393
	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah				29.251.393
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Penyelesaian Jenis Pelayanan Administrasi Perkantoran	%	100	7.716.809
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Ketersediaan Perlengkapan Gedung Kantor	%	100	2.199.939
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase ASN yang meningkat kapasitasnya	%	70	29.500
4	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Penyelesaian Dokumen Program/Pelaporan	%	100	78.722

No	BID. URUSAN PEMERINTAHAN/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAANNYA TAHUN 2019	
				TARGET	RP (000)
5	Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Penyelesaian Dokumen Aset/Barang Milik Daerah	%	100	100.558
6	Program Pengembangan Data/Informasi	Cakupan data/informasi pembangunan tersedia	%	100	760.786
7	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase keselarasan Program pada RPJMD dengan RKPD	%	100	5.235.199
8	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	Persentase keselarasan Program pada RKPD dengan Renja OPD bidang ekonomi	%	100	2.046.746
9	Program Perencanaan Sosial dan Budaya	Persentase keselarasan Program pada RKPD dengan Renja OPD bidang sosial budaya	%	100	2.772.981
10	Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam	Persentase keselarasan Program pada RKPD dengan Renja OPD bidang prasarana wilayah dan sumber daya alam	%	100	7.282.547
11	Program Perencanaan Tata Ruang	Persentase Keselarasan Program Perencanaan Wilayah dan Pembangunan	%	55	1.027.607
	KEUANGAN				115.050.284
	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Selaku SKPD				56.661.101
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kelancaran pelayanan administrasi perkantoran	%	100	8.807.192
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat kelancaran tugas aparatur	%	100	11.707.770
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Tingkat kompetensi aparatur	%	95	344.350
4	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Rencana program	Dok	6	1.007.053
5	Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Manajemen Aset	Dokumen	1	98.977
6	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Ketepatan waktu penetapan APBD Prov. NTB	Waktu	Tepat waktu	33.031.997
		Opini laporan keuangan Prov. NTB	Jenis	WTP	-
7	Program Pembinaan Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota	Ketepatan waktu penetapan Perda APBD Kab./Kota	Waktu	Tepat waktu	1.663.762
	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah				58.389.183

No	BID. URUSAN PEMERINTAHAN/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAANNYA TAHUN 2019	
				TARGET	RP (000)
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	%	100	15.375.444
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan ketersediaan dan kelayakan sarana dan prasarana aparatur	%	100	13.013.573
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan pembinaan kapasitas sumberdaya aparatur	%	100	895.704
4	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Cakupan penyelenggaraan Sistem akuntabilitas kinerja OPD	Dokumen	5	1.036.860
5	Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase BMD yang Tertib Administrasi	%	85	736.425
6	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah (Diluar DAK)	%	47,19	27.331.176
	KEPEGAWAIAN				15.364.177
	Badan Kepegawaian Daerah				15.364.177
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	%	100	2.425.197
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Ketersediaan dan Kelayakan Sarana Prasarana Aparatur	%	100	3.588.595
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan Pembinaan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	%	100	34.691
4	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Nilai LKJIP OPD		B	199.555
5	Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Manajemen Aset	Dokumen	12	23.120
6	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Indeks Dimensi Kualifikasi Pendidikan ASN	Nilai Indeks	2,43	8.842.703
		Persentase Tingkat Pelanggaran Disiplin ASN	%	0,01	
		Kriteria Penilaian Kinerja ASN	Kriteria	BAIK	
7	Program Peningkatan Transparansi Penyelenggara Negara	Persentase ASN yang Patuh LHKPN		0,9727	250.316
	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	Indeks Pelayanan Publik			14.464.896
	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah				14.464.896
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	%	100	2.506.059

No	BID. URUSAN PEMERINTAHAN/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAANNYA TAHUN 2019	
				TARGET	RP (000)
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Ketersediaan dan Kelayakan Sarana Prasarana Aparatur	%	100	2.969.450
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan Pembinaan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	%	100	12.200
4	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Cakupan Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja OPD	%	100	294.432
5	Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Cakupan Pejabat Pengelola asset daerah dan PPK	%	100	70.400
6	Program Peningkatan Mutu Sumber Daya Aparatur	Cakupan Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi ASN	%	10,43	8.612.355
	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN				2.609.949
	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah				2.609.949
1	Program Penelitian dan Pengembangan	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	%	18	2.609.949

BAB IV : HASIL EVALUASI RKPD DAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2019

4.1 Rekapitulasi Hasil Capaian Kinerja dan anggaran Perangkat Daerah pada Triwulan IV Tahun 2019

Perangkat Daerah yang dievaluasi adalah sebanyak 46 Perangkat Daerah dan adapun rekaputilasi hasil capaian kinerja menurut perangkat daerah sebagaimana disajikan pada tabel laporan Triwulan IV tahun 2019 sebagai berikut:

Tabel 4.1Rekapitulasi Hasil Capaian Kinerja Tahun 2019 Triwulan IV

NO	NAMA OPD	RATA-RATA TINGKAT CAPAIAN RKPD		PREDIKAT TINGKAT CAPAIAN RKPD	
		KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	REALISASI ANGGARAN
		(%)	(%)		
1	2	3	4	5	6
A	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR				
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	99,79	86,87	SANGAT TINGGI	TINGGI
2	Dinas Kesehatan	103,71	91,75	SANGAT TINGGI	SANGAT TINGGI
3	Rumah Sakit Umum Daerah	98,50	93,34	SANGAT TINGGI	SANGAT TINGGI
4	Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma	96,69	89,59	SANGAT TINGGI	TINGGI
5	Rumah Sakit H.L. Abdul Kadir Manambai	96,15	94,63	SANGAT TINGGI	SANGAT TINGGI
6	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	80,01	93,88	TINGGI	SANGAT TINGGI
7	Dinas Perumahan dan Pemukiman	91,30	91,08	SANGAT TINGGI	SANGAT TINGGI
8	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	92,13	95,74	SANGAT TINGGI	SANGAT TINGGI
9	Satuan Polisi Pamong Praja	100,00	97,58	SANGAT TINGGI	SANGAT TINGGI
10	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	109,96	88,76	SANGAT TINGGI	TINGGI
11	Dinas Sosial	96,08	94,29	SANGAT TINGGI	SANGAT TINGGI
B	URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR				
1	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	99,89	98,64	SANGAT TINGGI	SANGAT TINGGI
2	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian	94,43	77,36	SANGAT TINGGI	TINGGI

NO	NAMA OPD	RATA-RATA TINGKAT CAPAIAN RKPD		PREDIKAT TINGKAT CAPAIAN RKPD	
		KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	REALISASI ANGGARAN
		(%)	(%)		
1	2	3	4	5	6
	Penduduk dan KB				
3	Dinas Ketahanan Pangan	96,30	92,90	SANGAT TINGGI	SANGAT TINGGI
4	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	81,95	91,93	TINGGI	SANGAT TINGGI
5	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	103,01	95,15	SANGAT TINGGI	SANGAT TINGGI
6	Dinas Perhubungan	102,70	86,31	SANGAT TINGGI	TINGGI
7	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	115,46	89,16	SANGAT TINGGI	TINGGI
8	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	112,12	85,72	SANGAT TINGGI	TINGGI
9	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	94,66	81,53	SANGAT TINGGI	TINGGI
10	Dinas Pemuda dan Olahraga	104,10	89,47	SANGAT TINGGI	TINGGI
11	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	102,19	98,50	SANGAT TINGGI	SANGAT TINGGI
C URUSAN PILIHAN					
1	Dinas Kelautan dan Perikanan	101,34	93,77	SANGAT TINGGI	SANGAT TINGGI
2	Dinas Pariwisata	96,36	89,55	SANGAT TINGGI	TINGGI
3	Dinas Pertanian dan Perkebunan	101,72	84,94	SANGAT TINGGI	TINGGI
4	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	94,11	95,92	SANGAT TINGGI	SANGAT TINGGI
5	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	99,27	88,83	SANGAT TINGGI	TINGGI
6	Dinas Perdagangan	110,06	86,21	SANGAT TINGGI	TINGGI
7	Dinas Perindustrian	85,17	86,44	TINGGI	TINGGI
D URUSAN PEMERINTAH FUNGSI PENUNJANG					
1	Biro Umum	101,55	98,50	SANGAT TINGGI	SANGAT TINGGI
2	Biro Organisasi	66,67	98,35	SEDANG	SANGAT TINGGI
3	Biro Hukum	151,55	92,38	SANGAT TINGGI	SANGAT TINGGI
4	Biro Pemerintahan	99,48	98,97	SANGAT TINGGI	SANGAT TINGGI
5	Biro Perekonomian	99,90	94,18	SANGAT TINGGI	SANGAT TINGGI
6	Biro Adm. Pembangunan dan LPBJP	99,71	91,21	SANGAT TINGGI	SANGAT TINGGI
7	Biro Kesejahteraan Rakyat	102,58	82,83	SANGAT TINGGI	TINGGI
8	Biro Kerjasama	109,77	89,66	SANGAT TINGGI	TINGGI
9	Biro Humas dan Protokol	98,51	90,19	SANGAT TINGGI	TINGGI
10	Sekretariat DPRD	92,86	88,27	SANGAT TINGGI	TINGGI

NO	NAMA OPD	RATA-RATA TINGKAT CAPAIAN RKPD		PREDIKAT TINGKAT CAPAIAN RKPD	
		KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	REALISASI ANGGARAN
		(%)	(%)		
1	2	3	4	5	6
11	Badan Penghubung Daerah	97,51	84,61	SANGAT TINGGI	TINGGI
12	Inspektorat	102,46	93,96	SANGAT TINGGI	SANGAT TINGGI
13	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	98,22	88,77	SANGAT TINGGI	TINGGI
14	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	100,00	89,50	SANGAT TINGGI	TINGGI
15	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah	108,68	89,56	SANGAT TINGGI	TINGGI
16	Badan Kepegawaian Daerah	100,00	82,32	SANGAT TINGGI	TINGGI
17	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	102,27	79,87	SANGAT TINGGI	TINGGI
KATEGORI		99,80	90,50	SANGAT TINGGI	TINGGI

4.2 Permasalahan

Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan dan rekomendasi RKPD dan Renja Perangkat Daerah Provinsi NTB Triwulan IV sesuai dengan tabel berikut.

Tabel 4.2Permasalahan dan Rekomendasi RKPD dan Renja Perangkat Daerah Provinsi NTB Tahun 2019Triwulan IV

NO	NAMA OPD	FAKTOR PENGHAMBAT	TINDAKLANJUT YANG DIPERLUKAN DALAM TRIWULAN BERIKUTNYA	TINDAKLANJUT YANG DIPERLUKAN DALAM RKPD BERIKUTNYA
1	2	8	9	9
A	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR			
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	-	-	-
2	Dinas Kesehatan	1. Beberapa kegiatan terdapat salah kode akun dan ada yang analisis kebutuhan dana pada pelaksanaan tidak sesuai dengan perencanaan awal, sehingga realisasi anggaran ditahan dahulu sampai dilakukan APBD Perubahan 2. Beberapa kegiatan memang	1. Percepatan pelaksanaan kegiatan sesuai jadwal 2. Percepatan penyerapan anggaran sesuai	Analisis kebutuhan ditingkatkan, sehingga perencanaan lebih efisien dan efektif

		direncanakan pelaksanaannya pada trimester ke I, II, III dan IV	3. Percepatan proses APBD Perubahan	
3	Rumah Sakit Umum Daerah	-	-	-
4	Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma	1 Pada Program pengadaan, kegiatan pengadaan alat kesehatan, terdapat alat yang tidak sesuai spesifikasi yaitu bedside sebanyak 15 unit 2 Pada Program Upaya Kesehatan Masyarakat, Kegiatan Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan, jumlah pasien bansos yang terlayani tidak mencapai target karena pembiayaan pasien bansos sudah di cover oleh kabupaten/kota 3 Pada Program standarisasi pelayanan kesehatan, realisasi anggaran sebesar 81,76% karena biaya pendaftaran akreditasi lebih rendah dari estimasi.	Percepatan pelaksanaan kegiatan sesuai jadwal	Belanja yang melalui proses lelang dilakukan lebih awal dan memperbaiki koordinasi internal
5	Rumah Sakit H.L. Abdul Kadir Manambai	-		Dalam menentukan target kinerja baik output maupun outcome perlu menambahkan kontribusi dari dana BLUD
6	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1 Proses Tender / Pelelangan Umum di ULP terkendala ada migrasi LPSE versi dari 4.0 ke 4.3 2 Tidak dilakukan penyesuaian target padahal ada penyesuaian alokasi anggaran terutama pada program untuk peningkatan pemantapan jalan sehingga sulit tercapai kinerjanya.	Melakukan koordinasi secara intensif dengan pihak ULP untuk mempercepat pelaksanaan konstruksi dan jasa konsultansi	Konsistensi program dan kegiatan dalam RPJMD, RENSTRA dan RENJA OPD
7	Dinas Perumahan dan Pemukiman	Tersebar nya lokasi RTLH dengan jarak jangkauan yg berbeda mengakibatkan kurang optimalnya pelaksanaan kegiatan karena terbatasnya waktu		1. Meningkatkan koordinasi dengan pemerintah pusat maupun kab/kota dalam rangka pencapaian target RPJMD
8	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	-	-	-
9	Satuan Polisi Pamong Praja	1. Keterbatasan anggaran	1. Percepatan Pelaksanaan Kegiatan	1. Penambahan Anggaran

		2. Kurangnya jumlah SDM 3. Sarpras Belum Memadai	Pembinaan dan Pengawasan 2. Mendorong Pengembangan, Peningkatan dan Profesionalisme SDM	Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan 2. Penambahan Sarpras pendukung Pembinaan dan Pengawasan
10	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	-	-	-
11	Dinas Sosial	Keterlambatan pengesahan APBD, SK Pengadaan dan kurangnya SDM yang memadai dalam pengelolaan keuangan	Mempersiapkan pelaksanaan dan penyerapan anggaran setiap bulan/triwulan	Terus meningkatkan koordinasi,konsultasi dan sinergitas serta mempercepat penyerapan anggaran
B	URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR			
1	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Masih Kurangnya anggaran Oprasional	-	Akan diusulkan APBD P Tahun 2019 sesuai anggaran yang tersedia.
2	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB	-	-	Perlu penentuan target kinerja yang lebih realistis sesuai dengan kemampuan anggaran yang tersedia
3	Dinas Ketahanan Pangan	-	-	-
4	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	beberapa kegiatan dengan anggaran yg cukup besar terjadwal dalam anggaran kas triwulan III-IV, sehingga total rata2 capaian kinerja dan anggaran masih sangat rendah ; terdapat kegiatan yang masih dalam proses pembangunan fisik	Mempercepat pelaksanaan kegiatan sesuai dengan target serta melakukan koordinasi kepada instansi terkait.	Memastikan perencanaan anggaran tepat waktu sesuai dengan jadwal ROK ; memastikan anggaran yang tercantum dalam DPA konsisten dengan yang sudah direncanakan dalam Renja ; melakukan pencermatan untuk menghindari kesalahan kode rekening dan belanja
5	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Bimtek untuk pelaksanaan BumDes sangat terbatas.	Melakukan evaluasi atau perbaikan terhadap data yang salah dengan melakukan konsultasi dengan dinas pendukung perencanaan dan penganggaran,melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran yang telah tersedia.	Menyusun dokumen-dokumen perencanaan sesuai dengan kebutuhan OPD,Menyusun anggaran sesuai yang ada di RPJMD,RENSTRA dan DPA,Melakukan perbaikan atau menelaah kembali data yang digunakan sebagai dasar penyusunan Renja PD.
6	Dinas Perhubungan	Belum optmalnya data pendukung	Meningkatkan koordinasi dan konsultasi	Meningkatkan kinerja , SDM dan

		penyusunan laporan, Adanya Revisi Kegiatan	dengan pihak terkait	pengumpulan bahan bahan pendukung penyusunan laporan serta disesuaikan dengan RPJMN, RPJMD, Renstra yang telah ditetapkan.
7	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	-	-	-
8	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	Menunggu DPA Perubahan	-	-
9	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Regulasi Penanaman modal yang dinamis namun tidak diikuti perkembangan SDM dan Sarana Prasarana, dan terbatasnya pemahaman petugas/aparatur terkait perpu yang berlaku dlm pelaksanaan Penanaman Modal	Koordinasi lebih intensif dengan Pemerintah Pusat, dinas/instansi terkait dan stake holder	Menganggarkan sistem informasi/aplikasi untuk optimalisasi Promosi, Penyusunan potensi investasi pada kawasan strategis, Peningkatan sarana prasarana dan kualitas SDM PTSP
10	Dinas Pemuda dan Olahraga	1. Belum terjalin koordinasi yang baik antara sektor dan pihak terkait baik di tingkat Provinsi maupun antar Provinsi dengan kab/kota 2. Jumlah SDM yang belum memadai 3. Prasarana sarana dan dana yang masih kurang	Memastikan pelaksanaan program/kegiatan sesuai dengan jadwal	Menyusun rencana kerja berdasarkan kebutuhan untuk mewujudkan tercapainya indikator kinerja
11	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Tidak tercapainya harga karena kendaraan dibawah standar harga, dan hasil negeosiasi rekonsiliasi gedung kantor	Penyempurnaan perencanaan anggaran kegiatan	Program/Kegiatan hasil Evaluasi realisasi Kinerja Anggaran
C	URUSAN PILIHAN			
1	Dinas Kelautan dan Perikanan	-	-	-
2	Dinas Pariwisata			
3	Dinas Pertanian dan Perkebunan	Adanya Kekurangan kelengkapan dokumen yang harus dipenuhi sebagai pendukung dalam administrasi	-	Merencanakan secara tepat dan akurat dan semaksimal mungkin berkoordinasi secara intern dengan bidang-bidang terkait sehingga tidak terjadi revisi
4	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	-	-	-

	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	(1) Adanya revisi uraian DPA terkait perubahan kebijakan pemerintah pusat yaitu kebijakan diskon biaya pemasangan listrik untuk rumah tangga kategori miskin yang menyebabkan adanya penyesuaian target penerima bantuan sosial pemasangan listrik gratis yang semula berjumlah 750 rumah tangga sasaran (RTS) bertambah menjadi 950 RTS.; (2) Adanya keterlambatan proses lelang yang berada diluar kendali dinas; (3) Adanya beberapa paket pekerjaan yang mengalami tender ulang; (4) adanya perubahan nomenklatur Balai ESDM Wilayah Pulau Sumbawa menjadi Cabang Dinas ESDM Wilayah Pulau Sumbawa; (5) Adanya kebijakan pengelolaan anggaran oleh pemerintah provinsi.	-	-
6	Dinas Perdagangan	Perbedaan harga di tingkat distributor dan pengecer yang tidak berdasarkan HET (Harga Eceran Tertinggi)		Meningkatkan intensitas pengawasan dan sosialisasi regulasi terkait HET
7	Dinas Perindustrian	-	-	-
D	URUSAN PEMERINTAH FUNGSI PENUNJANG			
1	Biro Umum			
2	Biro Organisasi			
3	Biro Hukum	Tidak tertibnya administrasi dan perencanaan keuangan.	Menata administrasi dan keuangan sesuai rencana	Perlunya ketelitian dan rencana kerja yang matang
4	Biro Pemerintahan	-	-	-
5	Biro Perekonomian			
6	Biro Adm. Pembangunan dan LPBJP	Perpres Pengadaan Barang/Jasa masih belum dipahami sepenuhnya oleh Pelaku Pengadaan Barang/Jasa	melakukan pendampingan terhadap PPK yang realisasi kegiatannya masih rendah	meningkatkan pelaksanaan rakor terkait upaya percepatan pelaksanaan kegiatan
7	Biro Kesejahteraan Rakyat	1. Beberapa kegiatan terdapat salah kode akun dan ada yang analisis kebutuhan dana pada pelaksanaan tidak sesuai dengan perencanaan awal, sehingga realisasi anggaran ditahan dahulu sampai dilakukan APBD Perubahan	1. Percepatan pelaksanaan kegiatan sesuai jadwal	Analisis kebutuhan ditingkatkan, sehingga perencanaan lebih efisien dan efektif

		2. Beberapa kegiatan memang direncanakan pelaksanaannya pada trimester ke I, II, III dan IV	2. Percepatan penyerapan anggaran sesuai proses kegiatan 3) percepatan proses APBD Perubahan	
8	Biro Kerjasama	-	-	-
9	Biro Humas dan Protokol	-	-	-
10	Sekretariat DPRD	Sering terjadi perubahan jadwal kegiatan DPRD, dan kurang cermatnya pelaksana kegiatan dalam mengikuti jadwal penarikan kas.	Memperhatikan kembali jadwal penarikan kas, dan disesuaikan dengan jadwal kegiatan DPRD	Menyusun perencanaan yang efisien dan efektif untuk mendukung fungsi pelayanan terhadap Anggota DPRD
11	Badan Penghubung Daerah	-	-	-
12	Inspektorat	1. Keterbatasan Anggaran 2. Kurangnya Jumlah SDM pada Jabatan Fungsional Auditor dan P2UPD 3. Infrastruktur yang belum memadai	1. Percepatan Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan 2. Mendorong Pengembangan, Peningkatan dan Profesionalisme SDM	1. Penambahan Anggaran Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan 2. Penyusunan Rencana Pengembangan, Peningkatan dan Profesionalisme SDM 3. Penambahan Sarana dan Prasarana Pendukung Pengawasan
13	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	-	-	-
14	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Tingkat koordinasi yang belum optimal	Konsolidasi internal dan peningkatan koordinasi antar stakeholders	Evaluasi kinerja dalam periode bulanan
15	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah	1. Masih adanya pekerjaan fisik yang tidak tepat waktu masa penyelesaiannya 2. Minimnya serapan anggaran dari pagu yang ditetapkan.	efektifitas dalam penyusunan anggaran kas, dan berusaha konsisten dengan apa yang direncanakan	Optimal dalam perencanaan, maksimal dalam pengendalian sehingga angka kesalahan dapat ditekan seminim mungkin
16	Badan Kepegawaian Daerah	Adanya Peraturan Perundang-undangan yang mengikat terkait pelaksanaan kegiatan sehingga perlu dilakukan kajian dan perumusan kegiatan lebih lanjut	Melakukan Reschedule terhadap Program dan Kegiatan sehingga dapat mempercepat pencapaian target kinerja dan realisasi keuangan	Melakukan Kajian Tentang Sekala Prioritas Organisasi sehingga mampu mengoptimalkan Sumber Daya yang ada untuk mencapai Tujuan OPD
17	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	1. ASN yang tidak kompeten dan kurang inovasi di bidangnya 2. Tidak sesuai nya pelaksanaan anggaran dengan target yang telah disusun dalam RPJMD, RENSTRA sampai pelaksanaan program kegiatan di DPA	1. Melakukan evaluasi atau perbaikan terhadap data yang salah dengan melakukan konsultasi dengan dinas pendukung perencanaan dan penganggaran	1. Menyusun dokumen-dokumen perencanaan sesuai dengan kebutuhan OPD 2. Menyusun anggaran sesuai yang ada di RPJMD, RENSTRA dan DPA

		3. Adanya peraturan dari pusat terkait dengan program dan kegiatan yang harus dilaksanakan padahal anggaran tidak ada 4. Kurangnya sarana dan prasarana pendukung kinerja,keterlambatan dalam penyusunan dokumen pendukung kinerja 5. Tidak adanya kesesuaian permintaan data yang diinginkan dari SKPD pendukung 6. Kurangnya anggaran yang dibutuhkan	2. Melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran yang telah tersedia	3. Melakukan perbaikan atau menelaah kembali data yang digunakan sebagai dasar penyusunan Renja PD
KATEGORI				
E	EVALUASI PELAKSANAAN RKPD KABUPATEN/KOTA SE PROVINSI NTB			
1	Kota Mataram	TIDAK MELAPORKAN		
2	Kota Bima	TIDAK MELAPORKAN		
3	Kabupaten Lombok Barat	TIDAK MELAPORKAN		
4	Kabupaten Lombok Utara	TIDAK MELAPORKAN		
5	Kabupaten Lombok Tengah	TIDAK MELAPORKAN		
6	Kabupaten Lombok Timur	TIDAK MELAPORKAN		
7	Kabupaten Sumbawa Barat	MELAPORKAN		
8	Kabupaten Sumbawa	TIDAK MELAPORKAN		
9	Kabupaten Dompu	TIDAK MELAPORKAN		
10	Kabupaten Bima	MELAPORKAN		

BAB V : KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil rekapitulasi yang telah dilakukan, diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Rata-rata capaian kinerja program yang dilaksanakan oleh seluruh Perangkat Daerah Triwulan IV Tahun 2019 sudah mencapai 99,80% dengan serapan anggaran mencapai 90,50%, masuk dalam kategori tinggi. Adapun kontribusinya terhadap pencapaian indikator kinerja pembangunan daerah sesuai RPJMD Provinsi NTB 2019-2023, terdapat 15 indikator yang ditetapkan sebagai indikator kinerja utama (IKU) dan 90 indikator kinerja daerah. berdasarkan hasil evaluasi diketahui bahwa dari 15 indikator IKU provinsi NTB, 10 indikator sudah dapat diukur tingkat capaiannya sedangkan 5 indikator masih menunggu rilis resmi dari lembaga terkait. dari hasil tingkat capaian menunjukkan bahwa terdapat 7 indikator atau 46,67 persen yang sudah sesuai bahkan melampaui target diantaranya Indeks Risiko Bencana, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH), pertumbuhan ekonomi tanpa pertambangan bijih logam, inflasi, indeks kriminalitas. sementara persentase balita stunting diperkirakan menurun dari angka 33,49 persen tahun 2018 sesuai hasil pendataan sementara sebesar 25,5 persen dari data yang masuk 67 persen. sedangkan capaian terhadap 90 indikator kinerja daerah pemerintahan provinsi NTB tahun 2019 secara keseluruhan terdapat 54 indikator tercapai atau 60 persen, 24 indikator atau 26,67 persen belum memenuhi target, dan masih terdapat 12 indikator atau 12,33 persen belum dapat dihitung dan atau menunggu rilis resmi dari lembaga terkait.
2. Adapun faktor pendorong dan penghambat pelaksanaan program sampai Triwulan IV Tahun 2019 antara lain :
 - a. Faktor Pendorong:
 - 1) Fokus pembangunan daerah yang tertuang jelas dalam Dokumen RPJMD Provinsi NTB Periode 2019-2023;
 - 2) Koordinasi yang terbangun baik antar Perangkat Daerah; dan
 - 3) Rencana pelaksanaan program yang tersusun setiap triwulan
 - b. Faktor Penghambat:
 - 1) Masih terdapat Evaluator di beberapa Perangkat Daerah yang belum memahami teknis pengisian Form Evaluasi Renja dan Evaluasi RKPD;
 - 2) Perpres Pengadaan Barang/Jasa masih belum dipahami sepenuhnya oleh Pelaku Pengadaan Barang/Jasa

- 3) ASN yang tidak kompeten dan kurang inovasi di bidangnya
- 4) Adanya Kekurangan kelengkapan dokumen yang harus dipenuhi sebagai pendukung dalam administrasi
- 5) Adanya perubahan lokasi pelaksanaan kegiatan
- 6) Beberapa indikator tidak bisa diukur karena tidak konsisten antara antar dokumen perencanaan dan penganggaran anggaran; dan
- 7) Proses rasionalisasi anggaran Tahun 2019 menyebabkan beberapa program dan kegiatan tidak dapat direalisasikan.

5.2 Rekomendasi

Rekomendasi umum yang diberikan terhadap hasil evaluasi RKPD dan Renja Perangkat Daerah adalah:

1. Efektifitas dalam penyusunan anggaran kas, dan berusaha konsisten dengan apa yang direncanakan;
2. Konsolidasi internal dan peningkatan koordinasi antar stakeholders;
3. Mempercepat pelaksanaan program/kegiatan dan penyerapan anggaran sesuai dengan jadwal yang telah direncanakan dalam dokumen pelaksanaan anggaran;
4. Saat ini perangkat daerah tidak melakukan evaluasi triwulan pelaksanaan Renja, sehingga pengolahan data dan analisis triwulanan RKPD dibebankan sepenuhnya di Bappeda. Berdasrkn Permendagri 86 Tahun 2017 idealnya Evaluasi triwulanan RKPD bersumber dari hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah, sehingga Bappeda hanya mengkompilasi evaluasi triwulanan Renja Perangkat Daerah untuk menyusun evaluasi triwulanan RKPD;
5. Sistem e-monev saat ini belum mengadopsi matriks-matriks evaluasi sesuai permendagri 86 tahun 2017 baik untuk evaluasi RKPD maupun evaluasi dokumen perencanaan lainnya. Diharapkan e-monev perlu disesuaikan dengan kebutuhan yang ada.
6. Komitmen dan kerjasama serta koordinasi yang tinggi diperlukan untuk kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan yang direncanakan;
7. Melakukan pemantauan, pengendalian dan evaluasi terhadap capaian pelaksanaan program/kegiatan secara berkala; dan
8. Memperkuat komunikasi dan koordinasi dengan pihak-pihak terkait dalam rangka mempercepat pencapaian program/kegiatan.

**EVALUASI TERHADAP HASIL RKPD
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
TAHUN 2019 (TRIWULAN IV)**

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Output) / Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2018)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab										
										I		II		III		IV																				
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp																			
I	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100		16										
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp											
I.		URUSAN WAJIB TERKAIT PELAYANAN DASAR			9.914.329.073.252				1.507.000.370.838				65.031.393.314				285.168.409.170				469.066.917.261				857.929.706.555				1.351.977.208.166				1.842.657.648.103			
1.1		PENDIDIKAN			2.498.448.803.477				461.284.529.836				10.343.407.394				63.970.383.885				232.369.503.470				413.757.064.874				417.945.797.043				987.711.283.667			
1.1.1		Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan			2.498.448.803.477				461.284.529.836				10.343.407.394				63.970.383.885				232.369.503.470				413.757.064.874				417.945.797.043				987.711.283.667			
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	39.676.579.979			100	4.590.515.882	20	973.574.603	20	973.574.603	35	973.574.603	25	973.574.603	100	3.894.298.412	100	84.83	100	11.078.524.893	100		99										
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Ketersediaan dan Kelengkapan Sarana Prasarana Aparatur	100	10.875.362.023			100	1.177.100.000	20	31.859.625	15	139.108.068	40	354.381.693	25	975.419.195	100	975.419.195	100	82.87	100	4.080.534.665	100		98										
		Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat Disiplin Aparatur (%)	100	39.313.309			100	7.000.000		0	0	-	0	-				0	0.00	0	-	-	-	-	-										
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupa Pembinaan Kapasitas Sumber Daya Aparatur (%)	100	7.424.438.060			100	1.246.044.500	10	271.623.825	15	271.623.825	45	271.623.825	30	271.623.825	100	1.086.495.300	100	87.20	100	4.785.964.400	100		99										
		Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Tersusunnya dok. Perencanaan (Dokumen)	35	3.407.782.661			7	421.603.500	1	91.270.500	1	91.270.500	1	91.270.500	4	91.270.500	7	365.082.000	100	86.59	100	1.112.394.300	99		75										
		Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Manajemen Aset (Dokumen)	5	1.527.190.361			1	274.205.350	0	59.775.128	0	59.775.128	0	59.775.128	1	59.775.128	1	239.100.513	100	87.20	100	510.115.200	99		98										
		Program Pembinaan Sekolah Menengah Atas (SMA)			360.230.623.326			100	63.276.932.980	15	809.489.000	15	2.009.070.375	48	16.451.242.375	22	61.261.669.422	100	61.261.669.422	100	96.82	100	124.928.121.172	90		97										
			Persentase Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/Paket C (%)	100				98.13								98.55																				
			Persentase Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C (%)	95.28				90.50								88.42																				
			Persen Angka Partisipasi Sekolah (APS) (%)	98.02				94.57								94.46																				
			Persen Penurunan Angka Drop Out (DD) (%)	0.24				0.35								0.37																				
			Persentase Akreditasi SMA minimal B (%)	77.5				75.20								77																				
			Rasio ketersediaan ruang kelas / penduduk usia sekolah pendidikan menengah (%)	1.00				1.04								0.99																				
		Program Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)		0	464.244.314.926			100	80.976.041.600	15	211.654.000	35	6.839.614.000	35	15.524.207.822	15	76.149.991.354	100	76.149.991.354	100	94.04	100	133.008.479.650	-		77.00										
			Persentase Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/Paket C (%)	100				98.13								98.55																				
			Persentase Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C (%)	95.28				90.50								88.42																				
			Persen Angka Partisipasi Sekolah (APS) (%)	98.02				94.57								94.46																				

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2019)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab
										I		II		III		IV										
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100		14=8+12		15=14/5x100		16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
			Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD (%)	83.22				78.22								83.22										
			Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI (%)	99.80				99.72								99.80										
			Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs (%)	98.94				98.54								98.94										
			Angka DO SD/MI (%)	0.04				0.08								0.04										
			Angka DO SMP / MTs (%)	0.11				0.15								0.11										
		Program Sinkronisasi dan Koordinasi Pembangunan Pendidikan Nasional	Data pokok pendidikan dan kebudayaan (Dokumen)	5	3.917.175.878			100	786.879.600	0	25	149.050.000	25	231.617.000	50	500.271.000	100	500.271.000	100	63.58	100	897.038.000	98	99.00		
		Program Peningkatan Layanan Pendidikan dan Kebudayaan		95	30.663.314.371			100	958.520.900		0		50	1.319.417.300	50	894.804.200	100	894.804.200	100	93.35	100	5.679.077.679	100	99.00		
		Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMA/SMK/SLB	Angka Drop Out SMA/SMK/SLB (%)	80	1.140.513.228.355			100	229.491.190.089	25	0	39.297.800.000	25	157.191.200.000	25	199.276.450.397	100	199.276.450.397	100	86.83	100	532.908.640.000	99	95.00		
		Program Peningkatan Balai Teknologi dan Komunikasi Pendidikan	Persentase pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi pendidikan (%)	80	6.490.802.006			86.6	1.155.731.100	0	50	442.424.300	25	585.316.200	11.6	1.090.371.680	86.60	1.090.371.680	100	94.34	100	4.594.611.880	99	95.00		
Rata-rata capaian kinerja (%)																				99.79	86.87			84.80	85.87	
Predikat kinerja																				SANGAT TINGGI	TINGGI			TINGGI	TINGGI	

Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja : -
Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja : 1) Angka Murid yang mengulang masih tinggi 2) Masih Banyak Guru produktif yang beriaazah D3
Tidak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :1) Meningkatkan mutu dan kurikulum pendidikan: 1) Pembangunan RKB: 2) Meningkatkan kualitas pendidikan guru
Tidak lanjut yang diperlukan dalam RKPD tahun berikutnya : -

1.2	KESEHATAN			2.543.287.940.178			565.088.998.017		38.540.800.188		102.288.345.824		118.981.038.389		242.808.179.958	500.703.488.847			350.200.160.087					
1.2.1	Dinas Kesehatan			373.027.808.137			55.214.970.756		637.647.313		3.262.205.782		3.984.648.611		15.738.402.073	23.822.903.779			23.822.903.779	86,25	16,19			
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100,00	11.342.185.503,00			2.054.837.701,00	100,00	340.568.121,00	100,00	668.118.901,00	100,00	308.523.157,00	100,00	633.863.190,00	100	1.951.073.369,00	100,00	94,95	100,00	1.951.073.369,00	100,00	17,20	Dinas Kesehatan
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Ketersediaan dan Kelayakan Sarana Prasarana Aparatur	100,00	12.961.472.885,00			3.840.647.600,00	100,00	50.472.892,00	100,00	278.258.256,00	100,00	1.375.996.670,00	100,00	1.718.642.698,00	100	3.423.370.516,00	100,00	89,14	100,00	3.423.370.516,00	100,00	26,41	Dinas Kesehatan
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan Pembinaan Kapasitas Sumber Daya Aparatur (%)	98,00	977.361.989,00			165.300.000,00	100,00	5.350.000,00	100,00	130.960.000,00	100,00	5.100.000,00	100,00	7.300.000,00	100	148.710.000,00	100,00	89,96	100,00	148.710.000,00	102,04	15,22	Dinas Kesehatan
	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Nilai LKJIP OPD (Nilai)	A	588.731.996,00			102.103.320,00	-	-	-	7.200.000,00	-	7.210.500,00	8	87.690.000,00	8	102.100.500,00	100,00	100,00	100,00	102.100.500,00	100,00	17,34	Dinas Kesehatan
	Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Manajemen Aset (Dokumen)	5,00	181.720.000,00			30.628.500,00	1,00	-	1,00	8.250.000,00	1,00	10.332.000,00	1,00	7.828.500,00	1,00	26.410.500,00	100,00	86,23	1,00	26.410.500,00	20,00	14,53	Dinas Kesehatan
	Program pelayanan kesehatan penduduk miskin	Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (%)	83,00	4.540.766.865,00			170.740.800,00	10,00	8.042.800,00	61,00	60.705.600,00	61,00	46.651.100,00	63,79	55.060.900,00	64,00	170.460.400,00	100,00	99,84	64,00	170.460.400,00	77,11	3,75	Dinas Kesehatan
	Program Penyediaan sarana dan prasarana sanitasi dasar	Proporsi rumah tangga dengan akses sanitasi layak (%)	66,82	11.427.838.970,00			1.914.804.000,00	87,00	65.730.000,00	87,00	242.750.000,00	87,00	636.440.000,00	89,00	866.731.400,00	89,00	1.811.651.400,00	100,00	94,61	89,00	1.811.651.400,00	133,19	15,85	Dinas Kesehatan
	Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak	Persentase persalinan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	100,00	1.967.109.390,00			594.779.621,00	32,00	-	60,00	94.570.000,00	70,00	167.951.500,00	95,39	325.059.000,00	95,00	587.580.500,00	100,00	98,79	95,00	587.580.500,00	95,00	29,87	Dinas Kesehatan
	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	Persentase balita stunting	100,00	49.872.434.836,00			8.272.538.594,00	-	11.325.400,00		233.031.800,00		19.218.840,00	27,75	6.695.907.297,00	25,50	6.959.483.337,00	121,51	84,13	25,50	6.959.483.337,00	25,50	13,95	Dinas Kesehatan
	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular/Tidak Menular	Persentase pelayanan kesehatan bagi orang yang terdampak dan beresiko pada situasi	100,00	8.054.479.883,00			1.308.754.500,00	100	11.468.500,00	100	234.382.500,00	100	324.693.950,00	100	453.594.200,00	100	1.024.119.150,00	100,00	78,25	100,00	1.024.119.150,00	100,00	12,71	Dinas Kesehatan

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2019)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab
										I		II		III		IV										
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100		14=B+12		15=14/5x100		16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Program Pengembangan Lingkungan Sehat	Persentase Tempat-tempat Umum yang Memenuhi Syarat	85,00	896.905.031,00			76	159.700.000,00	-	-		-		55.930.000,00	75,64	99.420.000,00	75,64	155.350.000,00	99,53	97,28	75,64	155.350.000,00	88,99	17,32	Dinas Kesehatan
		Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Persentase Posyandu Aktif	72,00	3.755.908.995,00			61,00	738.765.000,00	-	-		111.224.000,00		7.047.500,00	61,00	572.510.000,00	61,00	690.781.500,00	100,00	93,50	61,00	690.781.500,00	84,72	18,39	Dinas Kesehatan
		Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	Persentase Ketersediaan Obat dan perbekalan	98,00	5.927.847.400,00			100	1.372.444.680,00	6,00	4.025.400,00	70,00	304.600.800,00	80,00	582.667.402,00	100,00	298.720.800,00	100	1.190.014.402,00	100,00	86,71	100,00	1.190.014.402,00	102,04	20,07	Dinas Kesehatan
		Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana	100,00	7.293.948.585,00			100	655.500.000,00	100,00	10.245.800,00	100,00	155.251.800,00	100,00	71.202.500,00	100,00	257.884.625,00	100	494.584.725,00	100,00	75,45	100,00	494.584.725,00	100,00	6,78	Dinas Kesehatan
		Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Persentase fasilitas kesehatan yang terakreditasi	95,00	29.541.477.388,00			70	3.459.617.400,00	-	-	-	231.252.200,00	-	113.260.400,00	70,00	3.055.189.250,00	70,00	3.399.701.850,00	100,00	98,27	70,00	3.399.701.850,00	73,68	11,51	Dinas Kesehatan
		Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit standar	Persentase ketersediaan alat kesehatan sesuai standar	70	206.408.192.232			50	13.470.509.960	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	-	-	0,00	-	-	
		Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata	Persentase sarana dan prasarana yang terpelihara	100	241.777.076			100	43.050.040	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	-	-	0,00	-	-	
		Program Kebijakan dan Manajemen Pembangunan Kesehatan	Persentase keselarasan program kesehatan pusat dan daerah	100,00	5.461.982.815,00			100	950.042.250,00	100,00	118.448.600,00	100,00	443.397.325,00	100,00	125.301.200,00	100,00	209.597.023,00	100	896.744.148,00	100,00	94,39	100,00	896.744.148,00	100,00	16,42	Dinas Kesehatan
		Program Sumber Daya Kesehatan	Persentase puskesmas yang mempunyai minimal 5 tenaga kesehatan	100,00	3.318.440.000,00			45	601.520.640,00	-	11.969.800,00	9,88	58.272.600,00	40,00	127.121.892,00	63,90	393.403.190,00	63,90	590.767.482,00	142,00	98,21	63,90	590.767.482,00	63,90	17,80	Dinas Kesehatan
		Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD	Persentase target pendapatan (...)	100	8.267.027.298			100	1.472.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	-	-	0,00	-	-	
Rata-rata capaian kinerja (%)																				103,71	91,75			86,25	16,19	
Predikat kinerja																				SANGAT TINGGI	SANGAT TINGGI			TINGGI	SANGAT RENDAH	

Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja : Adanya kejelasan arah pembangunan kesehatan baik nasional maupun daerah sehingga, tujuan, visi dan misi, serta arah organisasi jelas

Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja : 1) beberapa kegiatan terdapat salah kode akun dan ada yang analisis kebutuhan dana pada pelaksanaan tidak sesuai dengan perencanaan awal, sehingga realisasi anggaran ditahan dahulu sampai dilakukan APBD Perubahan 2)beberapa kegiatan memang direncanakan pelaksanaannya pada trimester ke I, II,III dan IV

Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :1) Percepatan pelaksanaan kegiatan sesuai jadwal 2) Percepatan penyerapan anggaran sesuai proses kegiatan 3) percepatan proses APBD Perubahan

Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD tahun berikutnya : Analisis kebutuhan ditingkatkan, sehingga perencanaan lebih efisien dan efektif

1.2.2	Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi			1.699.845.164.277			356.889.565.200		27.537.008.948		82.738.842.758		73.265.028.739		157.182.960.269		337.999.163.142					188.370.589.515			
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	21.980.285.020	-		4.005.496.000	25,0	795.665.277	25,0	866.168.457	25,0	858.654.745	-	1.365.941.252	75,0	3.886.429.731	75,00	97,03	75	3.886.429.731	75,00	17,68		
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Ketersediaan dan Kelayakan Sarana Prasarana Aparatur	100	3.085.498.230	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan Pembinaan Kapasitas Sumber Daya Aparatur (%)	100	4.498.884.770	-	-	20	819.838.000	5,00	4.500.000	5,00	130.150.000	5,0	261.183.043	5,0	347.540.978	20,00	743.374.021	100,00	90,67	48,2818609	743.374.021	48,28	16,52	
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan dan Keuangan Capaian Kinerja	Nilai LKJIP OPD (...)	-	478.784.210	-	-	-	8	-	8	-	88	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	
	Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Manajemen Aset (Dokumen)	1	243.646.410	-	-	1	44.400.000	0,25	5.400.000	0	14.100.000	0	7.200.000	-	2.742.375.572	0,75	44.400.000	75,00	100,00	0,75	44.400.000	75,00	18,22	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2019)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab
										I		II		III		IV										
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100		14=8+12		15=14/5x100		16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Persentase penanganan penyakit menular (%)	100	1.097.506.360	-	-	20	200.000.000	-	-	-	54.600.000	20	60.376.300		74.490.100	20	189.466.400	100,00	94,73	90	189.466.400	90,00	17,26	
		Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase Cakupan Layanan Kesehatan Masyarakat (%)	100	24.036.277.427		-	100	4.380.162.423	100	562.429.433	100	-	100	121.105.200	100	2.575.695.372	100	3.259.230.005	100,00	74,41	100	3.259.230.005	100	14	
		Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Nilai akreditasi (Perdana/Dasar/ma dya/utama/paripurn	paripurna	3.292.519.080	-	-	paripurna	600.000.000	paripurna	55.823.700	paripurna	277.338.900	paripurna	86.480.700	-	175.266.892	paripurna	594.910.192	100,00	99,15	100,00	594.910.192	100	18,07	
		Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin	Cakupan Penduduk Miskin Yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan (%)	100,00	3.558.962.620	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana Rumah Sakit yang sesuai standar (%)	85	700.313.362.570	-	-	76	127.619.007.672	-	-		33.776.663.425		19.716.684.549	90,32	70.143.868.672	90,3	123.637.216.646	118,84	96,88					
		Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata	Persentase sarana prasarana Rumah Sakit yang terpelihara (%)	100	10.588.578.760																					
		Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD	Persentase realisasi target pendapatan (%)	100	926.670.858.820	-	-	18,54	219.200.661.105	11,91	26.113.188.538	21,72	47.619.821.976	23,79	52.153.344.202	22,09	79.757.781.431	22,09	205.644.136.147	119,15	93,82	81,96	179.652.759.166	181,96	19,39	
Rata-rata capaian kinerja (%)																				98,50	93,34			111,71	20,12	
Predikat kinerja																				SANGAT TINGGI	SANGAT TINGGI			SANGAT TINGGI	SANGAT RENDAH	

Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja : 1) Semua program yang ada di RKPD dan renja terdapat didalam RPJMD : 2) Dalam rangka peningkatan kapasitas aparatur serta penanganan penyakit menular, ada yang dibiayai dari dana BLUD sehingga melampaui dari yang ditargetkan.

Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja : -

Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :-

Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD tahun berikutnya : Dalam menentukan target kinerja baik output maupun outcome perlu menambahkan kontribusi dari dana BLUD

12.3	Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma Provinsi			177.858.702.764			33.781.180.434		4.280.279.811		5.254.557.082		5.030.212.553		16.133.322.706		30.878.371.952				30.538.303.222				
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase tingkat layanan administrasi perkantoran	100	2.534.357.686	0	-	100	412.704.000	25	-	25	120.619.866	25	114.843.340	25	112.727.616	100	348.190.822	100.00	84.37	100	348.190.822	100	13.74	RSJ Mutiara Sukma
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase ketersediaan dan kelayakan sarana prasarana aparatur	98	33.061.926.069.92	0	-	90	9.396.000.000.40	0	-	67.5	493.670.000	12.5	1.602.188.400	10	6.628.483.600	90	8.724.342.000	100.00	92.85	90	8.724.342.000	91.84	26.39	RSJ Mutiara Sukma
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase SDM yang kompeten	62.05	3.291.162.205	0	-	38.42	701.000.000	6.44	900000	6.68	164.238.417	7.64	208.373.235	16.94	219.451.986	37.70484	592.963.638	98.14	84.59	37.70	592.063.638	60.77	17.99	RSJ Mutiara Sukma
	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase cakupan layanan kesehatan masyarakat	100	17.758.238.757	0	-	15.5	304.795.000	0.94	-	3.77	11.625.824	5.26	52.302.745	3.37	201.547.894	13.34	265.476.463	86.06	87.10	13.34	265.476.463	13.34	1.49	RSJ Mutiara Sukma
	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Nilai akreditasi	80	579.452.905	0	-	80	49.000.000	0	-	0	-	80	40.062.400	0	-	80	40.062.400	100.00	81.76	80	40.062.400	100	6.91	RSJ Mutiara Sukma
	Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana rumah sakit yang sesuai standar	93	21.527.610.937.6	0	-	85	3.847.999.999.60	0.00	9.801.000	18.84058	250.749.076	18.84	642.235.701.80	59.42029	2.829.436.670.60	78	3.732.222.448	92.07	96.99	78.2608696	3.722.421.448	84.15	17.29	RSJ Mutiara Sukma
	Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata	Persentase sarana dan prasarana yang terpelihara sesuai standar	90	2.005.954.203.48	0	-	82	121.483.750	0	-	0	-	0	-	82	121.483.750	82	121.483.750	100.00	100.00	82	121.483.750	91.11	6.06	RSJ Mutiara Sukma
	Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD	Persentase realisasi target pendapatan BLUD	100	96.900.000.000	0	-	17.54	18.928.177.684.02	4.33	4.249.578.611	4.30	4.213.653.899	2.42	2.370.206.731	6.0	6.020.191.190.20	17.05	16.853.630.431	97.23	89.04	17.05	16.724.262.701	17.05	17.26	RSJ Mutiara Sukma
Rata-rata capaian kinerja (%)																		96.69	89.59			69.78	13.39		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2019)		Realisasi Kinerja Pada Trivulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab					
										I				II													III				IV
										8				9				10				11					12				13=12/7x100
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100		14=B+12		15=14/5x100		16					
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp						
Predikat kinerja																															
SANGAT TINGGI																															
TINGGI																															
SEDANG																															
SANGAT RENDAH																															

Predikat kinerja

SANGAT TINGGI

TINGGI

SEDANG

SANGAT RENDAH

Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja : 1) Pada Program Administrasi Perkantoran, keberhasilan di dukung oleh perencanaan yang baik karena merupakan program rutin; 2) Pada program peningkatan sarana dan prasarana aparatur, keberhasilannya didukung oleh upaya pemenuhan sarana dan prasarana sesuai standar untuk menunjang pelayanan; 3) Pada program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit, keberhasilannya di dukung usaha rumah sakit

Faktor Penghambat Keberhasilan Kinerja : 1) Pada Program pengadaan, kegiatan pengadaan alat kesehatan, terdapat alat yang tidak sesuai spesifikasi yaitu bedside sebanyak 15 unit; 2) Pada Program Upaya Kesehatan Masyarakat, KegiatanPeningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan, jumlah pasien bansos yang terlayani tidak mencapai target karena pembiayaan pasien bansos sudah di cover oleh kabupaten/kota; 3) Pada Program standarisasi

Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : Percepatan pelaksanaan kegiatan sesuai jadwal

Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD tahun berikutnya : Belanja yang melalui proses lelang dilakukan lebih awal dan memperbaiki koordinasi internal

1,2,4	Rumah Sakit H. L. Manambai Abdul Kadir			292.756.484.000				119.243.301.627		6.105.666.296		11.042.740.302		37.701.148.466		53.553.494.910		108.403.048.974				107.668.383.551				
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	75.777.155.000	-	-	100	11.706.071.500	100	980.500.000	100	3.411.600.000	100	3.179.650.000	100	3.926.300.000	100	11.498.050.000	100,00	98.22	100	11.268.650.000	100	15	RS H. L. Manambai Abdulkadir	
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Ketersediaan dan Kelayakan Sarana Prasarana Aparatur	100	4.164.189.000	-	-	100	1.152.922.000	-	-	-	-	-	-	100	1.150.820.000	100	1.150.820.000	99.82	99.82	100	1.150.820.000	100	28	RS H. L. Manambai Abdulkadir	
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan Pembinaan Kapasitas Sumber Daya Aparatur (%)	100	600.000.000	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	RS H. L. Manambai Abdulkadir	
	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Nilai LKJIP OPD (Dokumen)	100	152.104.000	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	RS H. L. Manambai Abdulkadir	
	Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Manajemen Aset (Dokumen)	100	102.438.000	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	RS H. L. Manambai Abdulkadir	
	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Cakupan Upaya Layanan Kesehatan Masyarakat (%)	100	776.042.000	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	RS H. L. Manambai Abdulkadir	
	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Nilai Akreditasi	100	620.833.000	0	-	0	175.800.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	RS H. L. Manambai Abdulkadir	
	Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata	Presentase Sarana dan Prasarana umah sakit yang sesuai standar	86	46.762.492.000	-	-	82	75.907.850.628	82	455.001.000	82	4.163.254.287	82	28.641.679.163	82	37.496.155.166	82	70.756.089.636	100,00	93.21	82	70.556.139.636	95	151	RS H. L. Manambai Abdulkadir	
	Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata	Presentase saranadan Prasarana yang terpelihara	100	6.301.211.000	-	-	100	900.000.000	22	199.929.000	33	299.981.000	22	199.657.000	100	199.997.000	100	899.564.000	100,00	99.95	100	899.564.000	100	14	RS H. L. Manambai Abdulkadir	
	Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD	Presentase Realisasi target pendapatan BLUD	100	157.500.000.000	-	-	100	29.400.657.499	15	4.470.236.296	11	3.167.905.015	19	5.680.162.303	36	10.780.222.724	81	24.098.526.338	80.93	81.97	80.9	23.793.209.915	81	15	RS H. L. Manambai Abdulkadir	
Rata-rata capaian kinerja (%)																			96,15	94,63			95,22	44,55		
Predikat kinerja																			SANGAT TINGGI	SANGAT TINGGI			SANGAT TINGGI	SANGAT RENDAH		

Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja : -Sebagian kegiatan dibiayai dari dana BLUD

Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja : -

Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :-

Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD tahun berikutnya : Dalam menentukan target kinerja baik output maupun outcome perlu menambahkan kontribusi dari dana BLUD

1,3	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			3.484.518.622.912				251.732.914.400		1.102.978.322		4.328.106.793		38.220.655.734		131.005.345.019		174.657.085.888	80,01	93,88		271.019.678.707	51,05	16,45	
1,3,1	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang			3.484.518.622.912				251.732.914.400		1.102.978.322		4.328.106.793		38.220.655.734		131.005.345.019		174.657.085.888	80,01	93,88		271.019.678.707	51,05	16,45	
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat Kelancaran administrasi perkantoran	500,00	19.278.352.867	0,00	-	100	2.919.308.600	14,13	574.645.396	22,56	917.359.485	20,73	842.806.165	33,78	398.737.294	91	2.733.548.340	91,20	93,64	91,20	3.708.236.472	18,24	19,24	DPUPR
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat Kelancaran tugas aparatur	500,00	5.212.347.400	0,00	-	100	245.640.000	8,05	68.625.776	20,12	71.578.525	13,72	17.005.880	39,49	44.846.653	81,37	202.056.834	81,37	82,26	81,37	694.070.773	16,27	13,32	DPUPR
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Tingkat Kompetensi Aparatur	500,00	283.360.000	0,00	-	100	47.925.000	27,02	14.300.000	14,17	7.500.000	3,97	2.100.000	23,34	14.998.800	68,50	38.898.800	68,50	81,17	68,50	36.253.000	13,70	12,79	DPUPR
	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Rencana program	195,00	1.880.590.964	0,00	-	39,00	252.193.465	7,18	60.649.800	7,35	62.110.550	5,63	47.593.725	13,61	79.805.573	33,78	250.159.648	86,61	99,19	33,78	285.345.498	17,32	15,17	DPUPR

No	Kod s	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2019)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab
										I		II		III		IV										
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=12/7x100	14=B+I2	15=14/5x100	16							
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
		Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Manajemen Aset	30.00	1.047.529.900	0.00	-	7.00	52.228.500	0.88	2.612.100	2.70	30.725.100	1.78	6.363.300	1.47	10.708.400	6.83	50.408.900	97.62	96.52	6.83	330.804.250	22.78	31.58	DPUPR
		Program pembangunan jalan dan jembatan provinsi dalam kondisi mantap	Jaringan jalan dan jembatan provinsi dalam kondisi mantap	90.65	2.093.725.185.000	0.00	-	84.65	64.743.137.347	83.65	6.171.500	-	20.174.110	-	23.785.854.398	80.28	40.875.411.965	80.28	64.687.611.973	94.84	99.91	80.25	64.686.749.664	88.53	3.09	DPUPR
		Program rehabilitasi/ pemeliharaan jalan dan jembatan	Jalan dan jembatan provinsi dalam kondisi mantap	90.65	357.328.980.369	0.00	-	84.65	37.231.083.950	83.65	115.775.150	-	-	-	37.035.131.430.00	83.65	37.150.906.580	98.82	99.78	80.25	50.489.608.920	88.53	14.13	DPUPR		
		Program pembangunan sistem informasi/data base jalan dan jembatan	Rencana program	10.00	1.337.129.700	0.00	-	2.00	237.129.700	0.20	4.781.000	0.35	44.752.800	0.45	54.147.700	1.00	111.470.200	2.00	215.151.700	100.00	90.73	2.00	214.990.600	20.00	16.08	DPUPR
		Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan	Umur teknis alat berat	100.00	1.054.120.000	0.00	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DPUPR	
		Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya	Indek Kinerja Saluran Irigasi	60.06	284.006.808.900	0.00	-	56.18	8.178.022.900	0.00	-	-	-	-	55.41	5.152.713.084	55.41	5.152.713.084	98.63	63.01	55.41	45.888.588.645	92.26	16.16	DPUPR	
		Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air	Kapasitas Tampung	72.3	195.262.000.000	0.00	-	4.34	800.000.000	3.76	86.386.000	0.10	712.814.000.00	-	-	-	3.86	799.200.000	88.94	99.90	3.86	44.811.406.600	53.39	22.95	DPUPR	
		Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	Cakupan Air Bersih	81.66	311.985.221.200	0.00	-	73.32	8.546.455.101	71.80	29.993.200	0.01	877.691.773	-	591.474.525	-	6.979.619.098	71.81	8.478.778.596	97.94	99.21	71.81	8.268.445.674	87.94	2.65	DPUPR
			Cakupan Sanitasi	72.32	-	0.00	-	71.79	10.866.883.099	70.80	18.955.000	0.01	990.104.300	-	6.454.515.395	-	3.266.743.805.00	70.81	10.730.318.500	98.63	98.74	70.81	-	97.91	-	DPUPR
		Program Pengendalian Banjir	Penurunan jumlah titik banjir	8.00	45.241.870.000	0.00	-	20.00	1.164.800.000	0.46	-	3.69	-	8.95	-	1.163.149.000	19.97	1.163.149.000	99.87	99.86	19.97	8.754.350.400	249.7	19.35	DPUPR	
		Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	Daya tumbuh wilayah strategis	31.98	109.660.030.400	-	-	21.85	18.245.420.718	20.26	-	-	-	-	-	18.135.529.900	20.26	18.135.529.900	92.74	99.40	20.26	18.235.779.000	63.34	16.63	DPUPR	
		Program Pembinaan Jasa Konstruksi	Daya serap jasa konstruksi bersertifikat	50.00	2.019.738.200	0.00	-	7.49	302.471.200	0.02	4.210.000	1.68	67.698.000	1.14	46.222.500	4.51	182.869.200	7.35	300.999.700	98.15	99.51	7.35	300.456.700	14.70	14.88	DPUPR
		Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Umum	Jumlah Gedung Pemerintah yang Berfungsi kembali (%)	100.00	34.458.843.000	0.00	-	50.00	22.779.300.000	-	-	0.03	11.600.000	12.79	5.828.928.360.00	36.22	16.584.929.940.00	49.04	22.425.458.300	98.08	98.45	49.04	22.342.744.400	49.04	64.84	DPUPR
		Program Perencanaan Tata Ruang	Persentase RTR yang disusun (%)	72.73	6.879.422.500	0.00	-	17.18	218.045.700	0.10	3.221.600	5.00	45.088.900	-	74.537.833	-	88.148.567	5.10	210.996.900	29.69	96.77	5.10	182.120.133	7.01	2.65	DPUPR
		Program Pemanfaatan Ruang	Persentase deviasi pelaksanaan RTRW terhadap rencana pemanfaatan (%)	90.31	2.367.464.800	0.00	-	87.79	263.007.600	87.51	26.650.500	0.01	70.802.650	-	64.254.100	-	84.904.200	87.52	246.611.450	99.69	93.77	87.52	226.527.750	96.91	9.57	DPUPR
		Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	penurunan Penyimpangan tata ruang (%)	100.00	7.560.830.100	0.00	-	20.00	868.878.100	5.00	52.952.000	5.00	118.832.200	-	261.640.923	-	410.420.468	10.00	843.845.591	50.00	97.12	10.00	832.549.958	10.00	11.01	DPUPR
		Program Pengembangan Keterpaduan Infrastruktur Antar Kawasan	Tingkat keterpaduan infrastruktur antar Kawasan (%)	25.00	786.531.100	0.00	-	5.00	108.025.600	0.10	6.271.500	2.00	39.288.350	-	13.174.700	-	42.331.800	2.10	101.066.350	42.00	93.56	2.10	71.882.550	8.40	9.14	DPUPR
		Program Pengembangan Keterpaduan Infrastruktur Antar Sektor	Tingkat keterpaduan infrastruktur antar Sektor (%)	25.00	505.283.100	0.00	-	5.00	89.739.100	0.00	3.736.800	2.00	33.296.000	-	2.199.500	-	44.229.202	2.00	83.461.502	40.00	93.00	2.00	109.925.300	8.00	21.76	DPUPR
		Program Pengembangan Keterpaduan Infrastruktur Wilayah	Tingkat keterpaduan infrastruktur antar Wilayah (%)	25.00	597.139.900	0.00	-	5.00	235.777.900	0.30	4.313.500	2.00	61.302.000	-	13.014.000	-	120.436.000	2.30	199.065.500	46.00	84.43	2.30	121.343.700	9.20	20.32	DPUPR
		Program Pengembangan Pelayanan Jasa Pengujian	Sertifikasi hasil uji (jenis)	110.00	2.039.844.000	0.00	-	110.00	460.210.820	0.10	18.727.500	45.00	145.388.050	-	114.822.730	-	178.210.440	45.10	457.148.720	41.00	99.33	45.10	427.498.720	41.00	20.96	DPUPR
Rata-rata capaian kinerja (%)																		80.01	93.88			51.05	16.45			
Predikat kinerja																		TINGGI	SANGAT TINGGI			RENDAH	SANGAT RENDAH			

Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja

Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja

: Pembinaan, Motivasi Etos Kerja dan Pengarahan dari Eselon II

: 1) Pembayaran termyn untuk pekerjaan konstruksi banyak yang belum terbayar sehingga fisik Proses Tender / Pelelangan Umum di ULP terkendala ada migrasi LPSE versi dari 4.0 ke 4.3; 2) Tidak dilakukan penyesuaian target padahal ada penyesuaian alokasi anggaran terutama pada program untuk peningkatan pemantapan jalan sehingga sulit tercapai kinerjanya.

No	Kod a	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2019)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab								
										I				II													III				IV			
										8				9													10				11			
1	2	3	4	5		6		7		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	12		K	Rp	13=12/7x100		K	Rp	14=B+12		15=14/5x100		16				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					

Tindaklanjut yang diperlukan dalam Triwulan Berikutnya : - Melakukan koordinasi secara intensif dengan pihak ULP untuk mempercepat pelaksanaan konstruksi dan jasa
Tindaklanjut yang diperlukan dalam RKPD Berikutnya : - Konsistensi program dan kegiatan dalam RPJMD, RENSTRA dan RENJA DPD

1.4		PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN			1.082.395.565.747				189.168.700.000		387.215.583		83.917.289.881		69.385.093.892		44.898.512.491		198.368.121.847	91,30	91,08		154.880.728.723	88,65	74,66	
1.4.1		Dinas Perumahan dan Permukiman			1.082.395.565.747				189.168.700.000		387.215.583		83.917.289.881		69.385.093.892		44.898.512.491		198.368.121.847	91,30	91,08		154.880.728.723	88,65	74,66	
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	1.347.130.230			100	1.371.281.580	100,00	179.958.623	100	273.907.301	100	259.535.572	100	565.386.149	100	1.278.787.645	100,00	93,25	100	1.278.787.645	100,00	94,93	Dinas Perumahan dan Permukiman
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Ketersediaan dan Kelayakan Sarana Prasarana Aparatur	100	790.306.972			100	750.311.700	100,00	25.156.860	100	59.651.000	100	174.460.565	100	375.883.428	100	635.151.853	100,00	84,65	100	635.151.853	100,00	80,37	Dinas Perumahan dan Permukiman
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan Pembinaan Kapasitas Sumber Daya Aparatur (%)	100	61.491.997			100	61.492.000	100,00	3.500.000	100	4.900.000	100	4.050.000	100	39.992.000	100	52.442.000	100,00	85,28	100	52.442.000	100,00	85,28	Dinas Perumahan dan Permukiman
		Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Cakupan penyelenggaraan sistem akuntabilitas kinerja DPD (Dokumen)	100	314.980.540			100	314.980.540	100,00	25.065.000		53.507.700		58.665.000		161.674.600	100	298.912.300	100,00	94,90	100	137.237.700	100,00	43,57	Dinas Perumahan dan Permukiman
		Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Meningkatnya Kualitas Penatausahaan Barang Milik Daerah (Dokumen)	100	32.641.800			100	32.641.800		3.300.000		4.070.700		13.022.700		12.248.400	100	32.641.800	100,00	100,00	100	32.641.800	100,00	100,00	Dinas Perumahan dan Permukiman
		Program Pengembangan Perumahan	Cakupan Rumah Layak Huni (RLH) yang tertangani (%)	93,82	17.040.429.100			92,37	16.189.630.781	0,00	25.748.100	-	504.691.080	-	4.915.942.645	92,02	9.829.557.724	92,02	15.175.939.549	99,62	93,74	92	5.346.381.825	98,08	31,37	Dinas Perumahan dan Permukiman
		Program perbaikan perumahan akibat bencana alam/sosial	Persentase rumah korban gempa yang telah direhabilitasi dan direkonstruksi	100	1.154.461.700			75	1.120.461.700	2,12	23.779.500		478.073.600		143.647.010	59	217.609.390	59	863.109.500	78,67	77,03	59	863.109.500	59,00	74,76	Dinas Perumahan dan Permukiman
		Program Pengembangan Permukiman	Persentase Permukiman yang tertata (%)	5,18	168.425.189.900			5,18	180.438.401.210		80.707.500		82.538.498.500	2,7	63.915.770.400		33.494.160.800	2,7	180.029.137.200	52,12	99,77	2,7	146.534.976.400	52,12	87,00	Dinas Perumahan dan Permukiman
Rata-rata capaian kinerja (%)																				91,30	91,08			88,65	74,66	
Predikat kinerja																				SANGAT TINGGI	SANGAT TINGGI			TINGGI	SEDANG	

Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja : Dukungan pembiayaan dari pemerintah pusat dan Kab/Kota dalam rangka pencapaian target RPJMD dalam penanganan RTLH
Faktor Penghambat Keberhasilan Kinerja: Tersebar nya lokasi RTLH dengan jarak jauh yg berbeda mengakibatkan kurang optimalnya pelaksanaan kegiatan karena terbatas nya waktu
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD tahun berikutnya : Meningkatkan koordinasi dengan pemerintah pusat maupun kab/kota dalam rangka pencapaian target RPJMD

No	Kod s	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2018)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2018)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2018 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		Parangkat Daerah Penanggungjawab			
										I		II		III		IV													
										1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=12/7x100	14=B+12	15=14/5x100	16				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp						
1.5		KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT			125.957.289.891				22.019.810.200		12.892.008.912			5.877.313.105			3.890.738.572			42.994.795.559			42.994.795.559						
1.5.1		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri			63.560.022.221				11.317.327.500		1.152.920.704			2.679.862.679			2.089.553.684			11.197.971.192	92,13	95,74		11.197.971.192	48,85	23,54			
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya kualitas dan kapasitas layanan administrasi perkantoran (Tahun)	5	5.871.590.000			I	1.050.082.180	0,25	160.462.904	0,25		300.695.473	0,25		245.860.293	0,25		339.849.427	1,00	1.046.868.097	100,00	99,69	0,50	1.046.868.097	10,00	17,83	Bakesbang poldagri NTB
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatkan kapasitas dan efektifitas layanan (Tahun)	5	2.320.389.000			I	414.409.000	0,25	33.401.500	0,25		38.984.293	0,25		106.942.194	0,25		220.376.646	1,00	399.704.633	100,00	96,45	0,50	399.704.633	10,00	17,23	Bakesbang poldagri NTB
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Tersedianya pegawai yang terampil dan sehat (Drang)	65	87.613.000			65	15.600.000	65	2.500.000	-		2.500.000	-		4.550.000	-		3.250.000	65,00	12.800.000	100,00	82,05	65,00	12.800.000	100,00	14,61	Bakesbang poldagri NTB
		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Jumlah dokumen Perenc & Pelaporan (Dokumen)	55	1.397.815.000			11	243.036.380	-	22.700.000	2		83.550.000	3		25.450.000	6		111.318.300	11	243.018.300	100,00	99,99	11	243.018.300	100,00	78,15	Bakesbang poldagri NTB
		Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Tersedianya Laporan Aset (Dokumen)	10	110.639.000			2	19.700.000	1	4.800.000	1		4.800.000	-		3.200.000	-		6.900.000	2,00	19.700.000	100,00	100,00	2,00	19.700.000	20,00	17,81	Bakesbang poldagri NTB
		Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Persentase ormas yang meningkat kapasitas wawasan kebangsaannya (%)	100	2.926.033.000			20	383.104.600	-	-	5		8.120.000	15		122.981.000	-		243.734.586	20,00	374.835.586	100,00	97,84	20,00	374.835.586	20,00	12,81	Bakesbang poldagri NTB
		Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan	Penurunan Konflik Sosial (Kasus)	15	32.601.966.000			24	6.305.000.000.000	2	376.107.000	-		1.423.576.102	3		679.069.000	2		3.380.891.206	7,00	5.859.643.308	29,17	92,94	7,00	5.859.643.308	46,67	17,97	Bakesbang poldagri NTB
		Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT)	Terwujudnya Desa Bersinar (Bersih Narkoba) (Desa)	50	11.232.374.000			10,00	2.137.895.400	-	17.700.000	10		436.905.300	10		744.972.597	10		809.970.000	10,00	2.009.547.897	100,00	94,00	30,00	2.009.547.897	60,00	17,89	Bakesbang poldagri NTB
		Program Pendidikan Politik Masyarakat	Cakupan masyarakat yang mendapat pendidikan politik pada wilayah dengan tingkat partisipasi politik rendah (%)	100	7.011.809.000			20,00	1.248.499.940	-	535.249.300	15,00		380.731.511	5		166.528.600	-		149.343.960	20,00	1.231.853.371	100,00	98,67	73,00	1.231.853.371	73,00	17,57	Bakesbang poldagri NTB
Rata-rata capaian kinerja (%)																				92,13	95,74			48,85	23,54				
Predikat kinerja																				SANGAT TINGGI	SANGAT TINGGI			SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH				

Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja : -Selama tahun 2019 jumlah kasus konflik baik konflik horizontal baik konflik vertikal dapat terus ditekan sehingga menjadi hanya 7 kasus konflik

Faktor Penghambat Keberhasilan Kinerja: -

Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :-

Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD tahun berikutnya :-

1.5.2	Satuan Polisi Pamong Praja				23.728.470.103				3.817.245.900		599.258.381			1.225.840.507			867.967.010			1.040.012.265				3.733.078.163																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							</
-------	----------------------------	--	--	--	----------------	--	--	--	---------------	--	-------------	--	--	---------------	--	--	-------------	--	--	---------------	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----

No	Kod a	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2019)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggunjaw ab
										I		II		III		IV										
				1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Program Pemeliharaan Kantirantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	Persentase Penanganan Pelanggaran Produk Hukum Daerah (Perda dan Pergub) (%)	100	6.687.147.291	-		100	1.042.054.000	100	212.987.292	100	265.361.950	100	250.073.700	100	297.709.628	100	1.026.132.570	100,00	98,47	100	1.026.132.570	100	15	Pol PP Prov. NTB
		Program Peningkatan, Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT)	Persentase Penyelesaian Pelanggaran K3 (Keterlibatan, Ketertarikan dan Keindahan) (%)	100	2.317.395.396	-		100	229.122.500		14.970.000		58.365.000		79.047.477		73.207.550	100	225.590.027	100,00	98,46	100	225.590.027	100	10	Pol PP Prov. NTB
Rata-rata capaian kinerja (%)																				100,00	97,58			88,38	15,87	
Predikat kinerja																				SANGAT TINGGI	SANGAT TINGGI			TINGGI	SANGAT RENDAH	

Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja : (1) Pengembangan SDM; (2) Ketersediaan anggaran; dan (3) Ketetapan waktu dalam pelaksanaan Kegiatan

Faktor Penghambat Keberhasilan Kinerja: (1) Keterbatasan anggaran; (2) Kurangnya jumlah SDM; dan (3) Sarpras Belum Memadai

Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : (1) Percepatan Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan; dan (2) Mendorong Pengembangan, Peningkatan dan Profesionalisme SDM

Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD tahun berikutnya : (1) Penambahan Anggaran Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan; dan (2) Penambahan Sarpras pendukung Pembinaan dan Pengawasan

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2019)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab																	
										I				II													III				IV												
										5				6				7				8					9				10				11				12				13=12/7x100
1	2	3	4	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	16									

1.5.3		Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi NTB			38.668.777.567				6.885.236.800			11.138.830.827			1.971.609.919			923.215.878			14.029.089.580			28.063.746.204	109,96	88,76		28.063.746.204	100,00	140,80	
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Mneingkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	8.461.752.000			100	1.605.762.880	25	218.370.036	25	506.770.645	25	305.348.102	25	553.020.034	100,00	1.583.508.817	100,00	98,61	100,00	1.583.508.817	100,00	18,71		BPBD				
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur (%)	100	6.922.900.000			100	1.240.669.020	25	84.369.791	25	658.461.118	25	181.611.150	25	299.455.931	100,00	1.223.897.990	100,00	98,65	100,00	1.223.897.990	100,00	17,68		BPBD				
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur (%)	100	101.091.000			100	18.000.000	25	3.000.000	25	4.000.000	25	4.000.000	25	7.000.000	100,00	18.000.000	100,00	100,00	100,00	18.000.000	100,00	17,81		BPBD				
		Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Meningkatnya Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan (%)	100	950.259.000			100	149.200.000	25	49.200.000	25	25.100.000	25	24.450.000	25	42.600.000	100,00	141.350.000	100,00	94,74	100,00	141.350.000	100,00	14,87		BPBD				
		Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Meningkatnya Kapasita Pengelolaan Keuangan Daerah (%)	100	140.405.000			100	25.000.000	25	1.401.000	25	570.000	25	10.830.000	25	7.074.000	100,00	19.875.000	100,00	79,50	100,00	19.875.000	100,00	14,16		BPBD				
		Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam	Persentase Masyarakat dan Dunia Usaha Aktif dalam Penanggulangan Bencana (%)	50	20.969.134.000			15	16.319.353.870	12,5	10.763.490.000	12,5	763.868.156	12,5	357.057.626	15,0	3.894.263.057	15,00	15.778.678.839	100,00	96,69	50,00	15.778.678.839	100,00	75,25		BPBD				
		Program Rehabilitasi dan Rekontruksi Penanganan Penanggulangan Bencana	Pesentase realisasi rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana (struktural dan non struktural) (%)	100	1.123.237.000			50	17.496.389.190	25	20.000.000	25	12.840.000	25	39.919.000	10	9.225.676.558	84,87	9.298.435.558	169,74	53,14	100,00	9.298.435.558	100,00	827,82		BPBD				
			Persentase penurunan jumlah korban bencana setelah Rehabilitasi/Rekonstr																												
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM																				109,96	88,76			100,00	140,80						
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM																				SANGAT TINGGI	TINGGI			SANGAT TINGGI	SANGAT TINGGI						

Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja : -
Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja : -
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : -
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD tahun berikutnya : -

1.6		SOSIAL			199.720.871.046				17.807.418.085			1.785.181.935			4.776.979.802			5.219.889.225			5.527.868.243			17.309.919.003				35.851.001.381			
1.6.1		Dinas Sosial			199.720.871.046				17.807.418.085			1.785.181.935			4.776.979.802			5.219.889.225			5.527.868.243			17.309.919.003				35.851.001.381			
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran (%)	100	26.933.417.395			100	1.002.250.125	100	239.021.951	100	239.021.951	100	239.021.951	100	239.021.951	100	956.087.803	100.00	95.39	100.00	3.939.231.067	1.00	0.15						
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan ketersediaan & kelayakan sarana dan prasarana aparatur	100	22.822.273.203			100	294.390.000	100	69.721.288	100	69.721.288	100	69.721.288	100	69.721.288	100	278.885.152	100.00	94.73	100.00	4.685.062.374	1.00	0.21						
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan pembinaan kapasitas sumber daya Aparatur (%)	100	1.000.895.315			100	178.480.000	100	1.750.000	100	167.555.000	100	1.500.000	100	1.600.000	100	172.405.000	100.00	96.60	100.00	172.405.000	1.00	0.17						
		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Cakupan penyelenggaraan sistem akuntabilitas sistem akuntabilitas DPD (%)	100	2.041.168.262			100	245.520.000	100	21.825.000	100	148.715.000	100	20.350.000	100	54.576.000	100	245.466.000	100.00	99.98	100.00	359.280.950	1.00	0.18						
		Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Meningkatnya kualitas penatausahaan BMD (%)	100	800.834.553			100	22.115.000	100	5.253.750	100	5.253.750	100	5.253.750	100	5.253.750	100	21.015.000	100.00	95.03	100.00	116.951.000	1.00	0.15						

No	Kod a	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2018)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2018)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2018 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab
										I		II		III		IV										
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100		14=B+12		15=14/5x100		16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Program Pemberdayaan Fakir Miskin, KAT dan PMKS Lainnya	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial (%)	11,62	47.142.257.149			1,78	10.962.241.640	0,06	1.072.820.440	0,12	3.676.000.701	0,07	1.980.837.050	1,64	3.977.965.630	1,90	10.707.623.821	106,47	97,68	0,19	10.707.623.821	0,02	0,23	
		Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Persentase PMKS yang tertangani (%)	17,59	77.935.631.473			2,59	1.450.650.000	1,08	338.731.207	1,10	338.731.207	1,39	338.731.207	1,46	338.731.207	2,18	1.354.924.827	84,29	93,40	2,18	12.296.935.769	0,12	0,16	
		Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma	Persentase Penyandang Cacat Fisik dan Mental serta Korban Trauma yang dibina (%)	1,16	147.693.000			0,83	83.921.320	0,17	3.020.000	0,42	18.416.000	0,17	11.672.000	0,25	30.896.010	0,58	64.004.010	70,00	76,27	0,58	64.004.010	0,50	0,43	
		Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Persentase lembaga sosial yang menyediakan sarana dan prasarana pelayanan kesejahteraan sosial (%)	100	7.689.747.721			100	2.787.100.000	-	-	100	24.500.000	100	2.209.524.250	100	538.76.600	100	2.772.740.850	100,00	99,48	100,00	2.772.740.850	1,00	0,36	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2019)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab
										I		II		III		IV										
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100		14=8+12		15=14/5x100		16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Program Jaminan Sosial	Persentase PMKS yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial (%)	59,5	6.216.830.930			55,5	780.750.000	55,5	33.038.299	55,5	89.064.705	55,5	343.277.729	55,5	27.385.807	55,50	736.766.540	100,00	94,37	55,50	736.766.540	0,00	0,12	
		Program Updating Data Perencanaan	Menguatkan basis data perencanaan dan sistem informasi terpadu untuk penanggulangan kemiskinan	4	963.132			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Rata-rata capaian kinerja (%)																				96,08	94,29			0,66	0,21	
Predikat kinerja																				SANGAT TINGGI	SANGAT TINGGI			SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH	

Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja : Koordinasi, Konsultasi dan sinergi dengan lintas sektoral dan internal SKPD terus dibangun
Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja : Keterlambatan pengesahan APBD, SK Pengadaan dan kurangnya SDM yang memadai dalam pengelolaan keuangan
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : Mempersiapkan pelaksanaan dan penyerapan anggaran setiap bulan/triwulan
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD tahun berikutnya : Terus meningkatkan koordinasi,konsultasi dan sinergitas serta mempercepat penyerapan anggaran

2.		URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR			799.393.962.714				107.269.777.914		10.973.768.928		17.591.178.248		20.507.087.542		49.943.842.189		92.379.606.285				97.347.381.869			
2.1		tenaga kerja			45.184.828.381				4.029.608.320		848.210.555		1.142.978.227		1.069.641.712		882.052.829		3.942.883.324				3.942.883.324			
2.1.1		Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi			45.184.828.381				4.029.608.320		848.210.555		1.142.978.227		1.069.641.712		882.052.829		3.942.883.324				3.942.883.324			
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	15.785.711.678	-	-	100	1.412.921.759	20,48	343.611.119	18,30	343.611.119	17,67	343.611.119	42,55	343.611.119	100	1.374.444.474	100,00	97,28	100,00	1.374.444.474	100,00	8,71	
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur (%)	100	4.642.100.712	-	-	100	349.711.900	6,65	87.225.334	29,71	87.225.334	32,36	87.225.334	31,28	87.225.334	100	348.901.334	100,00	99,77	100,00	348.901.334	100,00	7,52	
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur (%)	100	883.827.678	-	-	100	49.607.700	4,74	12.060.131	51,41	12.060.131	9,75	12.060.131	34,10	12.060.131	100	48.240.525	100,00	97,24	100,00	48.240.525	100,00	5,46	
		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Meningkatnya Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan (%)	100	2.212.935.541	-	-	100	320.847.441	26,45	96.810.313	17,22	63.012.670	17,53	64.155.500	38,81	89.987.927	100	313.966.410	100,00	97,86	100,00	313.966.410	100,00	14,19	
		Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Meningkatnya Kapasitas Pengelolaan	100	476.956.264	-	-	100	20.271.200	21,53	13.976.000	18,59	2.070.000	12,17	900.803	47,70	3.323.597	100	20.270.400	100,00	100,00	100,00	20.270.400	100,00	4,25	
		Program Peningkatan Perencanaan dan Pelaporan	Meningkatnya Perencanaan dan Pelaporan (%)	100	3.565.970.981	-	-	100	146.652.200	8,32	12.200.600	72,59	106.451.600	19,09	28.000.000	-	-	100	146.652.200	100,00	100,00	100,00	146.652.200	100,00	4,11	
		Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi (%)	89	4.872.042.192	-	-	85	182.382.100	7,29	47.088.000	18,51	47.088.000	50,13	47.088.000	9,07	47.088.000	85,00	188.352.000	100,00	97,91	85,00	188.352.000	95,51	3,87	
		Program Perluasan dan Pengembangan Kesempatan Kerja	Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan (%)	94	8.928.801.016	-	-	90	1.238.189.200	12,96	156.153.393	28,50	343.245.274	36,09	434.635.626	11,45	270.435.222	89,00	1.204.469.461	98,89	97,28	89,00	1.204.469.461	94,68	13,49	
		Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	Besaran sengketa pengusaha-pekerja (%)	74	1.433.174.976	-	-	70	147.920.000	4,03	7.668.400	54,14	102.981.200	10,59	20.141.200	1,23	16.225.800	70,00	147.016.600	100,00	99,39	70,00	147.016.600	94,59	10,26	
		Program Pengawasan Ketenagakerjaan	Besaran Pemeriksaan	100	2.383.105.325	-	-	95	151.094.820	21,18	7.417.320	40,10	35.232.900	9,44	31.824.000	24,29	12.095.700	95,00	150.569.920	100,00	99,65	95,00	150.569.920	95,00	6,32	
Rata-rata capaian kinerja (%)																				99,89	98,64			97,98	7,82	
Predikat kinerja																				SANGAT TINGGI	SANGAT TINGGI			SANGAT TINGGI	SANGAT RENDAH	

Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja : 1) Sumber daya aparaturng yang memadai; 2) Sistem perencanaan dan penganggaran yang baik; 3) Koordinasi yang baik ; dan 4) Pengawasan yang efektif dan transparan.
Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja : Masih Kurangnya anggaran Operasional
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : -
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD tahun berikutnya : Akan diusulkan APBD P Tahun 2019 sesuai anggaran yang tersedia.

2.2		PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK			32.849.809.126				5.849.130.200		74.977.420		1.074.557.841		631.878.719		2.881.179.263		4.882.593.043	94,43	77,38		4.681.296.044	83,83	8,11	
-----	--	--	--	--	----------------	--	--	--	---------------	--	------------	--	---------------	--	-------------	--	---------------	--	---------------	-------	-------	--	---------------	-------	------	--

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2019)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab
										I		II		III		IV										
				1	2	3	4	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
2.2.1		Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		32.849.809.126			5.849.130.200	74.977.420	1.074.557.841	631.878.719	2.881.179.263	4.862.593.043	94,43	77,36		4.861.296.044	63,93	8,11								
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran (Tahun)	100	5.971.916.016			100	862.693.139	2,23	64.577.420	37,75	298.977.991	37,25	149.409.384	23	313.288.501	100,00	826.253.296	100,00	95,78	100	826.253.296	100,00	0,14	
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Ketersediaan dan Kelayakan Sarana Prasarana Aparatur	100	2.871.220.150			100	409.728.201	-	-	14,00	53.036.000	34,00	130.331.835	52	156.490.700	100	339.858.535	100,00	82,95	100	339.858.535	100,00	11,84	
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan Pembinaan Kapasitas Sumber Daya Aparatur (%)	100	229.240.960	-	100	31.400.000	-	-	-	-	-	-	100	21.300.000	100,00	21.300.000	100,00	67,83	100	21.300.000	100,00	9,29		
		Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Dokumen Pelaporan (Dokumen)	6	1.611.361.700		7	150.755.000	-	-	3,00	32.400.000	1,00	36.150.000	2,00	47.368.600	6,00	115.918.600	85,71	76,89	6	114.721.601	100,00	7,12		
		Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Manajemen Aset (Dokumen)	1	148.467.240		1	22.020.000	0,00	2.400.000	-	3.900.000	-	3.100.000	1	4.220.000	1	13.620.000	100,00	61,85	1	13.620.000	100,00	9,17		
		Program Peningkatan Peran serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan	Cakupan perempuan kelompok sasaran yang bekerja (%)	0,163	5.609.868.813		0,086	633.785.000	-	-	-	61.015.200	0,000	46.814.200	0,081	315.298.181	0,081	423.127.581	94,29	66,76	0	423.127.581	49,99	0,08		
		Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) dan anak	Presentase Kab/Kota yang memiliki peraturan perundang-undangan yang mendukung PUG dan PUHA (%)	100	11.839.604.266,00		50	1.909.897.061,20	-	-	-	266.802.450	-	138.493.000	40	969.335.910	40	1.374.631.360	80,00	71,97	40	1.374.131.360	40,00	0,12		
		Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan (%)	100	5.643.462.876		56,74	852.473.085	-	-	-	119.561.000	-	65.719.100	56,74	437.848.400	56,74	623.128.500	100,00	73,10	100	623.128.500	100,00	0,11		
		Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan	Persentase OPD yang mengintegrasikan PPRG (%)	100	1.172.659.851		51,11	214.200.000	-	-	0	15.360.000	-	14.811.200	30,43	18.235.171	30,43	48.406.371	59,54	22,60	16	48.406.371	15,56	4,13		
		Program Kesehatan Reproduksi Remaja	Rata-rata usia kawin pertama (Tahun)	21	3.432.248.456		20,42	459.330.000	-	5.000.000	-	78.900.000	-	42.650.000	20,21	329.045.000	20,21	455.595.000	98,97	99,19	-	455.995.000	-	13,29		
		Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR)	Cakupan Pusat Informasi Konseling Remaja (PIK-R) yang aktif (%)	28,4	1.013.446.600		1,89	166.000.000	-	3.000.000	-	144.605.000	-	4.400.000	0,69	13.980.000	0,69	165.985.000	36,36	99,99	1	165.985.000	2,42	16,38		

No	Kod a	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2019)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	
										I		II		III		IV											
				I	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100			14=8+12
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Program Promosi Kesehatan Ibu Bayi dan Anak Melalui Kelompok Kegiatan di Masyarakat	Cakupan Anggota kelompok BKB, BKR dan BKL yang ber KB (%)	71,42	948.321.259			66,92	182.386.798	-	-	-	-	-	-	76,86	158.288.800	76,86	158.288.800	114,85	86,79	77	158.288.800	107,62	16,69		
		Program KB	Rasio Akseptor KB (%)	87,42	1.685.481.080			-	-	-	-			-	-	-	-	-	-			-	-	-	-		
		Program Pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang Mandiri	Persentase Peserta KB Mandiri (%)	24,83	2.245.339.888			-	-	-	-			-	-	-	-	-	-			-	-	-	-		
		Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga	Persentase tenaga PLKB/PKB yg berwawasan TRI BINA (%)	28,4	566.000.000			2,8	96.500.000	-	-	-	-	-	-	4,42	96.480.000	4,42	96.480.000	157,86	99,98	4	96.480.000	15,55	17,05		
		Program Pengembangan Model Operasional BKB-Posyandu-PAUD	Jml Keluarga Yg Menjadi Anggota Kelompok BKB yang menggunakan Kartu Kembang Anak (KKA) (%)	21,5	5.516.119.898			-	-	-	-			-	-	-	-	-	-			-	-	-	-		
		Program Peningkatan Penanggulangan Narkoba, PMS Termasuk HIV/ AIDS	Persentase siswa yang tidak menggunakan narkoba, HIV/AIDS dan PMS (%)	100,00	1.357.184.388			100,00	-	-	-			-	-	-	-	-	-			-	-	-	-		
Rata-rata capaian kinerja (%)																				94,43	77,36				63,93	8,11	
Predikat kinerja																				SANGAT TINGGI	TINGGI				RENDAH	SANGAT RENDAH	

Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja : -Adanya peningkatan jumlah kasus kekerasan perempuan dan anak sehingga proporso jumlah kasus yang ditangani meningkat.

Faktor Penghambat Keberhasilan Kinerja: -

Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :-

Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD tahun berikutnya :-Perlu penentuan target kinerja yang lebih realistis sesuai dengan kemampuan anggaran yang tersedia

2.3	PANGAN						43.585.380.000						6.815.044.472			278.167.270				749.741.381				882.132.265			4.491.845.637			6.401.886.553				6.926.300.798					
2.3.1	Dinas Ketahanan Pangan						43.585.380.000						6.815.044.472			278.167.270				749.741.381				882.132.265			4.491.845.637			6.401.886.553				6.926.300.798					
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat Kelancaran Administrasi Perkantoran (%)	100			4.709.195.000	-	-	-	100		652.936.850	24,5		136.344.970	24,4			207.275.731	17,6			149.789.731	33,03		107.643.137	99,52		601.053.569	99,52	92,05	99,52		788.849.512	99,52	16,75		DKP
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Ketersediaan dan Kelayakan Sarana Prasarana Aparatur	100			4.437.397.500	-	-	-	100		700.008.500	12,0		15.312.700	8,0			63.095.250	32			280.057.206	47,55		332.826.081	100		691.291.237	100,00	98,75	100,00		691.291.237	100,00	15,58		DKP
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan Pembinaan Kapasitas Sumber Daya Aparatur (%)	100			120.074.000	-	-	-	100		21.380.000	-	-	-	9,9			2.115.000	-	-	-	69,06			14.765.000	78,95		16.880.000	78,95	78,95	78,95		16.880.000	78,95	14,06		DKP
		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Nilai LKJIP DPD (.....)	20			1.693.646.000	-	-	-	65		295.474.622	-	-	84.237.000	2			71.428.000	-	-	-	41.207.500	60,15		87.851.100	62,15		284.723.600	95,62	96,36	62,15		284.723.600	310,75	16,81		DKP
		Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Manajemen Aset (Dokumen)	5			260.855.500	-	-	-	1		46.411.500	-	-	5.125.000	-			9.600.000	-	-	-	20.295.000	1,00		11.391.500	1,00		46.411.500	100,00	100,00	1,00		46.411.500	20,00	17,81		DKP
		Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/ perkebunan)	Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan (Point)	94,83			31.469.051.000	-	-	-	87,93		4.960.408.000	-	-	37.147.600	-			385.227.400	-	-	-	375.782.828	87,93		3.837.815.419	87,93		4.635.973.247	100,00	93,46	91,65		4.972.591.547	96,65	15,80		DKP
		Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan	Cakupan Pemasaran Produk Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) dan Produk Olahan (%)	100,00			895.361.000	-	-	-	73,91		138.425.000	-	-	-	-			11.000.000	-	-	-	15.000.000	73,91		99.553.400	73,91		125.553.400	100,00	90,70	100,00		125.553.400	100,00	14,02		DKP
Rata-rata capaian kinerja (%)																											96,30	92,90				115,12	15,83						
Predikat kinerja																											SANGAT TINGGI	SANGAT TINGGI				SANGAT TINGGI	SANGAT RENDAH						

Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja : -

Faktor Penghambat Keberhasilan Kinerja: -

Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :-

Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD tahun berikutnya :-

No	Kod s	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2019)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab
										I		II		III		IV										
										1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=12/7x100	14=B+12	15=14/5x100	16	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
2.4		PERTANAHAN			2.870.978.200				210.978.200																	
		Sekretariat Daerah			2.870.978.200				210.978.200																	
2.4.1		Biro Pemerintahan			2.870.978.200				210.978.200																	
2.5		LINGKUNGAN HIDUP			110.439.908.000				19.882.052.597		2.201.688.080		3.773.869.284		2.448.397.839		9.477.500.581		17.899.453.766				17.899.453.766			
2.5.1		Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan			110.439.908.000				19.882.052.597		2.201.688.080		3.773.869.284		2.448.397.839		9.477.500.581		17.899.453.766				17.899.453.766			
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	15.822.286.000			100	1.606.890.497	100.00	391.159.934	100.00	391.159.934	100.00	391.159.934	100.00	391.159.934	100	1.564.639.735	100.00	97.37	100.00	1.564.639.735.00	188.28	48.42	
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Ketersediaan dan Kelayakan Sarana Prasarana Aparatur	100	4.888.485.000			100	765.701.800	2.15	187.818.934	33.72	187.818.934	48.02	187.818.934	16.11	187.818.934	100	751.275.735	100.00	98.12	100.00	751.275.735.00	100.00	91.42	
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan Pembinaan Kapasitas Sumber Daya Aparatur (%)	100	1.859.321.000			100	160.074.700.00	2.60	33.331.955	6.95	33.331.955	28.82	33.331.955	61.63	33.331.955	100	133.327.819	100.00	83.29	100.00	133.327.819.00	100.00	15.36	
		Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Nilai LKJIP OPD	A	2.566.927.000			B	417.198.700	B	103.863.900	-	103.863.900	-	103.863.900	-	103.863.900	B	415.455.600	100.00	99.58	100.00	415.455.600.00	100.00	33.68	
		Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Manajemen Aset (Dokumen)	19	831.598.000			19	114.490.100	12	24.657.500	2	24.657.500	-	24.657.500	-	24.657.500	14	98.630.000	73.68	86.15	14.00	98.630.000.00	73.68	37.98	
		Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Persentase Pengurangan Sampah (%)	30	74.266.946.000			10	15.651.868.500	-	1.197.643.378	-	2.769.826.562	-	1.442.355.137	-	8.473.457.879	-	13.883.282.956	0.00	88.70	0.00	13.883.282.956.00	0.00	18.69	
			Persentase penanganan sampah (%)	70				50		-		-		-		-		-			0.00	-	0.00			
		Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Cakupan lokasi yang dikendalikan kualitas air dan udaranya (Lokasi)	10	10.204.345.000			2	1.165.828.300		263.210.480		263.210.480		263.210.480	2	263.210.480	2	1.052.841.921	100.00	90.31	2.00	1.052.841.921.00	100.00	15.29	
Rata-rata capaian kinerja (%)																		81.95	91.93			94.57	37.26			
Predikat kinerja																		TINGGI	SANGAT TINGGI			SANGAT TINGGI	SANGAT RENDAH			

Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja : 1) Terjalinnnya koordinasi pelaksanaan kegiatan dengan sekretariat dan instansi lainnya; 2) Tersediannya anggaran tepat pada waktunya.

Faktor Penghambat Keberhasilan Kinerja: -beberapa kegiatan dengan anggaran yg cukup besar terjadwal dalam anggaran kas triwulan III-IV, sehingga total rata2 capaian kinerja dan anggaran masih sangat rendah ; terdapat kegiatan yang masih dalam proses pembangunan fisik

Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : -Mempercepat pelaksanaan kegiatan sesuai dengan target serta melakukan koordinasi kepada instansi terkait.

Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD tahun berikutnya : -Memastikan perencanaan anggaran tepat waktu sesuai dengan jadwal ROK ; memastikan anggaran yang tercantum dalam DPA konsisten dengan yang sudah direncanakan dalam Renja ; melakukan pencermatan untuk menghindari kesalahan kode rekening dan belanja

No	Kod s	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2019)	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2019)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)	Parangkat Daerah Penanggungjaw ab							
							I		II		III		IV													
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp												
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100		14=B+12		15=14/5x100		16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	

2.6		ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL			11.038.714.000			1.945.629.000		109.706.737		397.303.107		367.463.150		920.287.915		1.794.760.909				1.794.760.909				
2.6.1		Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil			11.038.714.000			1.945.629.000		109.706.737		397.303.107		367.463.150		920.287.915		1.794.760.909				1.794.760.909				
		Program Penataan Administrasi Kependudukan	Rasio Penduduk BerKTP Persatuan Penduduk (Rasio)	0,80	11.038.714.000			0,80	1.945.629.000	0,77	109.706.737	0,78	397.303.107	0,79	367.463.150	0,99	920.287.915	0,99	1.794.760.909	123,75	92,25		1.794.760.909		0,00	DPMPD DIKCAPIL
Rata-rata capaian kinerja (%)																				123,75	92,25			0,00	0,00	
Predikat kinerja																				SANGAT TINGGI	SANGAT TINGGI			SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH	

Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja : -
Faktor Penghambat Keberhasilan Kinerja: -
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :-
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD tahun berikutnya : -

2.7		PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA			44.272.246.000			7.732.445.100		564.601.775		1.544.974.205		1.208.701.308		3.829.148.035		7.147.425.323				7.091.912.691				
2.7.1		Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil			44.272.246.000			7.732.445.100		564.601.775		1.544.974.205		1.208.701.308		3.829.148.035		7.147.425.323				7.091.912.691				
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tersedianya Pelayanan Administrasi perkantoran (%)	100	7.786.730.000			100	1.218.215.400	19.83	241.554.933	25.88	315.255.973	20.30	247.357.040	25.69	368.498.385	91.70	1.172.666.331	91.70	96.26	91.70	1.117.113.699	91.70	14.35	DPMPD DIKCAPIL
		Program Peningkatan Saranan dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya sarana dan Prasarana Aparatur (%)	100	5.314.263.000			100	3.060.500.000	0.02	750.000	3.65	111.775.000	15.01	459.494.200	66.27	2.028.212.800	84.96	2.600.232.000	84.96	84.96	84.96	2.600.232.000	84.96	48.93	DPMPD DIKCAPIL
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya Kapasitas Sumberdaya aparatur (%)	100	109.891.000			100	18.000.000	8.33	1.500.000	16.67	3.000.000	13.89	2.500.000	51.39	9.250.000	90.28	16.250.000	90.28	90.28	90.28	16.250.000	90.28	14.79	DPMPD DIKCAPIL
		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tercapainya pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan (Dokumen)	6	989.679.000			6	153.200.000	15.47	23.700.000	47.91	73.400.000	5.68	8.700.000	30.91	47.350.000	6.00	153.150.000	100.00	99.97	6.00	153.150.000	100.00	15.47	DPMPD DIKCAPIL
		Program Peningkatan Kapasitas Pengelola Keuangan Daerah	Meningkatnya Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	1	134.006.000			1	21.950.000	0.00	-	43.74	9.600.000	21.87	4.800.000	24.15	5.300.000	1.00	19.700.000	100.00	89.75	1.00	19.700.000	100.00	14.70	DPMPD DIKCAPIL
		Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	Prosentase Posyantek yang terbentuk dan aktif	100	4.466.421.000			40	361.315.000	2.91	10.500.000	19.73	71.295.600	10.00	87.352.200	5.29	188.132.200	37.93	357.280.000	94.82	98.88	37.93	357.280.000	37.93	8.00	DPMPD DIKCAPIL
		Program pengembangan lembaga ekonomi perdesaan	Prosentase BUMDes yang terbentuk dan aktif (%)	100	11.897.626.000			84	1.522.268.500	6.56	99.853.045	30.02	456.996.032	9.69	147.555.086	41.17	762.474.255	87.44	1.466.878.418	104.10	96.36	87.44	1.466.878.418	87.44	12.33	DPMPD DIKCAPIL
		Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa	Prosentase Lembaga Adat terbentuk dan aktif (%)	70	2.947.312.000			50	106.130.100	0.00	-	50.00	86.170.000	23.96	18.228.000		73.96	104.398.000	147.92	98.37	73.96	104.438.000	105.66	3.54	DPMPD DIKCAPIL	
		Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Prosentase Aparatur Desa terlatih (%)	100	8.892.333.000			36	1.070.311.100	17.45	186.743.797	38.98	417.201.600	12.28	131.422.300	41.88	325.978.895	41.88	1.061.346.592	116.33	99.16	41.88	1.061.346.592	41.88	11.94	DPMPD DIKCAPIL
		Program Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan	Persentase PKK Aktif (%)	100	1.733.985.000			20	200.555.000	0.00	-	0.14	280.000	10.00	101.292.482	9.86	93.951.500	20.00	195.523.982	100.00	97.49	20.00	195.523.982	20.00	11.28	DPMPD DIKCAPIL
Rata-rata capaian kinerja (%)																			103.01	95.15			75.98	15.53		
Predikat kinerja																			SANGAT TINGGI	SANGAT TINGGI			SEDANG	SANGAT RENDAH		

Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja : 1) Adanya Peraturan Buati tentang Prioritas Penggunaan ADD yang salah satunya adalah alokasi untuk BumDes; 2) Adanya dukungan dari pemerintah Provinsi berupa bantuan adal untuk 100 BumDes
Faktor Penghambat Keberhasilan Kinerja: Bimtek untuk pelaksanaan BumDes sangat terbatas.
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : Melakukan evaluasi atau perbaikan terhadap data yang salah dengan melakukan konsultasi dengan dinas pendukung perencanaan dan penganggaran,melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran yang telah tersedia.
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD tahun berikutnya : Menyusun dokumen-dokumen perencanaan sesuai dengan kebutuhan OPD.Menyusun anggaran sesuai yang ada di RPJMD,RENSTRA dan DPA.Melakukan perbaikan atau menelaah kembali data yang digunakan sebagai dasar penyusunan Renja PD.

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2019)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab
										I		II		III		IV										
										1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=12/7x100	14=B+I2	15=14/5x100	16	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
2.8		PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA			16.752.734.387				1.059.190.000																	
2.8.1		Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana			16.752.734.387				1.059.190.000																	
2.9		PERHUBUNGAN			143.373.416.600				10.058.850.420		350.925.561		1.087.027.921		1.201.978.910		6.290.585.678		8.930.518.070				8.930.518.070			
2.9.1		Dinas Perhubungan			143.373.416.600				10.058.850.420		350.925.561		1.087.027.921		1.201.978.910		6.290.585.678		8.930.518.070				8.930.518.070			
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	13.145.258.856	-	-	100,00	2.341.675.900	81,25	228.088.457	94	692.323.976	94	519.791.249	100	743.189.877	100,00	2.103.313.559	100,00	89,82	100,00	2.103.313.559	100,00	16,00	
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Ketersediaan dan Kelayakan Sarana Prasarana Aparatur	100	4.957.906.543	-	-	100,00	332.570.700	55,26	5.050.000	63	60.240.500	68	45.858.000	76	92.784.157	76,32	203.942.657	76,32	61,32	76,32	203.942.657	76,32	4,11	
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan Sumber Daya Aparatur Yang Mengikuti Diklat (%)	74	495.753.100	-	-	28,41	27.640.000	-	2.472.500	28	4.490.000	12	1.782.500	9	12.752.500	49,38	21.497.500	173,82	77,78	49,38	21.497.500	66,86	4,34	
		Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Cakupan Pelaporan Kinerja dan Keuangan (%)	100	881.776.065	-	-	100,00	157.549.300	28,57	40.000.000	43	45.276.800	-	6.817.500	29	62.999.000	100,00	155.093.300	100,00	98,44	100,00	155.093.300	100,00	17,59	
		Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Cakupan Aset Yang Dimanfaatkan (%)	100	434.819.900	-	-	100,00	35.278.000	-	-	24	8.375.000	18	6.248.000	53	19.520.000	94,23	34.143.000	94,23	96,78	94,23	34.143.000,00	94,23	7,85	
		Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Persentase dokumen perencanaan perhubungan yang selaras dengan RTRW (%)	97	5.267.752.425	-	-	75,00	983.085.000	-	-	-	8.480.000	-	4.260.000	75	912.399.600	75,00	925.139.600	100,00	94,11	75,00	925.139.600,00	77,68	17,56	
		Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Cakupan prasarana dan fasilitas perhubungan yang terpelihara (%)	100	7.348.728.276	-	-	100,00	171.950.000	-	12.900.000	-	-	-	10.820.000	100	146.484.000	100,00	170.204.000	100,00	98,98	100	170.204.000	100	2,32	
		Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	Cakupan Angkutan yang Layak (%)	81,63	9.290.974.815	-	-	79,12	1.738.307.300	13,28	42.968.404	16	241.189.545	16	459.832.161	25	883.436.855	70,24	1.627.426.965	88,78	93,62	70,24265645	1.627.426.965	86,0501	17,52	
		Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan	Cakupan sarana dan prasarana perhubungan yang tersedia (%)	100	88.000.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		Program Peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas	Rasio Fatalitas Kecelakaan Lalu Lintas (%)	2,68	5.749.854.396	-	-	3,24	293.250.000	0,79	-	1,78	19.490.100	2,46	29.720.000	3,13	237.506.000	3,13	286.716.100	96,60	97,77	3,13	286.716.100,00	116,79	4,99	
		Program peningkatan Manajemen Transportasi	Cakupan Kota Tertib Lalu Lintas (%)	50	1.183.388.873	-	-	20,00	91.983.200	-	7.443.000	-	8.710.000	-	6.980.000	20	26.956.600	20,00	50.089.600	100,00	54,47	20,00	50.089.600	40,00	4,23	
		Program Pengembangan Transportasi Laut	Rasio Pertumbuhan Angkutan Penumpang (%)	25	6.617.203.351	-	-	5,00	3.885.381.020	5,00	12.003.200	5	78.452.000	5	109.949.500	5	3.152.547.089	5,00	3.352.951.789	100,00	86,30	(13,00)	3.352.951.789	(52,00)	50,67	
Rata-rata capaian kinerja (%)																		102,70	86,31			73,27	13,38			
Predikat kinerja																		SANGAT TINGGI	TINGGI			SEDANG	SANGAT RENDAH			

Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja : Koordinasi, Konsultasi dan Regulasi dengan Institusi terkait

Faktor Penghambat Keberhasilan Kinerja: Belum optimalnya data pendukung penyusunan laporan, Adanya Revisi Kegiatan

Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : Meningkatkan koordinasi dan konsultasi dengan pihak terkait

Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD tahun berikutnya : Meningkatkan kinerja , SDM dan pengumpulan bahan bahan pendukung penyusunan laporan serta disesuaikan dengan RPJMN, RPJMD, Renstra yang telah ditetapkan.

2.10		KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA			49.879.974.000				9.997.878.448		596.516.062		1.800.324.093		2.370.390.364		4.750.250.344		9.517.480.863				17.189.228.188			
2.10.1		Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik			49.879.974.000				9.997.878.448		596.516.062		1.800.324.093		2.370.390.364		4.750.250.344		9.517.480.863				17.189.228.188			
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	8.747.737.000			100,00	1.510.308.520	100,00	187.883.287	100,00	327.622.768	100,00	349.468.392	100,00	526.647.813	100	1.391.622.260	100,00	92,14	100,00	2.779.251.508	100,00	31,77	Diskominfotik Prov. NTB

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2019)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		Parangket Daerah Penanggungjawab
										I		II		III		IV										
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100		14=8+12		15=14/5x100		16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Ketersediaan dan Kelayakan Sarana Prasarana Aparatur	100	4.776.651.000			100,00	1.000.725.000	100,00	10.084.374	100,00	173.923.263	100,00	216.581.702	100,00	518.333.008	100	918.922.347	100,00	91,83	100,00	1.706.064.500	100,00	35,72	Diskominfotik Prov. NTB
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan Pembinaan Kapasitas Sumber Daya Aparatur (%)	100	927.465.000			100,00	74.553.700	100,00	2.900.000	100,00	33.460.000	100,00	5.950.000	100,00	4.350.000	100	46.660.000	100,00	62,59	100,00	94.905.000	100,00	10,23	Diskominfotik Prov. NTB
		Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Nilai LKJIP DPD	100	1.049.473.000			70,00	218.021.000	-	2.000.000	-	92.224.000	-	21.827.500	70,00	99.455.000	70,00	215.506.500	100,00	98,85	70,00	337.491.500	70,00	32,16	Diskominfotik Prov. NTB
		Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Manajemen Aset (Dokumen)	100	250.647.000			100,00	21.787.300	100,00	-	100,00	-	100,00	8.662.500	100,00	6.757.300	100,0	15.419.800	100,00	70,77	100,00	26.165.800	100,00	10,44	Diskominfotik Prov. NTB
		Program Pengembangan e-Government	Indeks Maturitas Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) (Skor)	4,2	9.971.098.000			3,20	2.195.176.800	-	91.250.440	-	154.578.664	-	603.619.922	3,30	1.273.511.080	3,30	2.122.960.106	103,13	96,71	3,30	3.974.857.954	78,57	39,86	Diskominfotik Prov. NTB

No	Kod s	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2019)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab
										I		II		III		IV										
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=12/7x100	14=B+12	15=14/5x100	16							
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
		Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Persentase informasi yang terpublikasi (%)	90	10.595.232.000			70,00	1.871.134.520	100,00	54.405.920	100,00	415.755.648	100,00	450.751.224	100,00	872.589.481	100,0	1.793.502.273	142,86	95,85	100,00	3.563.838.218	111,11	33,64	Diskominfoatik Prov. NTB
		Program Peningkatan SDM Bidang Komunikasi Informatika dan Statistik	Persentase Peningkatan Pemahaman SDM di Bidang Komunikasi Informatika (%)	70	1.807.089.000			50,00	338.095.008	-	49.904.000	-	64.410.000	-	94.625.000	64,35	90.819.200	64,35	299.758.200	128,70	88,66	64,35	411.214.149	91,93	22,76	Diskominfoatik Prov. NTB
		Program Penguatan Keterbukaan Informasi Publik	Cakupan Badan Publik yang Informatif (%)	8	11.641.808.000			4,00	2.665.427.600	-	194.668.041	-	506.025.150	-	612.214.124	7,00	1.301.760.612	7,00	2.614.667.927	175,00	98,10	7,00	4.107.464.592	87,50	35,28	Diskominfoatik Prov. NTB
		Program Pengelolaan Pelayanan Telekomunikasi	Cakupan Layanan Telekomunikasi (%)	88,3	112.774.000			88,25	102.449.000	-	3.420.000	-	32.324.600	-	6.690.000	92,56	56.026.850	92,56	98.461.450	104,88	96,11	92,56	187.974.965	104,88	166,68	Diskominfoatik Prov. NTB
Rata-rata capaian kinerja (%)																		115,46	89,16			94,40	41,85			
Predikat kinerja																		SANGAT TINGGI	TINGGI			SANGAT TINGGI	SANGAT RENDAH			

Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja : -
Faktor Penghambat Keberhasilan Kinerja: -
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :-
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD tahun berikutnya :-

2.11	KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH			52.157.000.085				4.316.482.837		1.057.258.236		528.295.902		1.436.924.393		900.272.337		3.922.750.867				3.922.750.867			
2.11.1	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah			52.157.000.085				4.316.482.837		1.057.258.236		528.295.902		1.436.924.393		900.272.337		3.922.750.867				3.922.750.867			
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	7.960.360.741			100	1.097.676.137	37,28	256.676.816	5,73	256.676.816	61,80	256.676.816	10,58	256.676.816	115,38	1.026.707.264	115,38	93,53	115,38	1.026.707.264,00	115,38	12,90	DISKOP
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Ketersediaan dan Kelayakan Sarana Prasarana Aparatur	95	2.870.285.763			70	386.320.000	51,65	248.752.699	5,95	28.651.098	64,59	98.417.456	8,26		130,45	375.821.253	186,36	97,28	130,45	375.821.253,00	137,32	13,09	DISKOP
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan Pembinaan Kapasitas Sumber Daya Aparatur (%)	278	83.119.568			48	14.800.000	20,27	3.000.000	-	-	33,78	5.000.000	4,05		58,11	8.000.000	121,06	54,05	58,11	8.000.000,00	20,90	9,62	DISKOP
	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Nilai LKJIP OPD (%)	95	1.716.671.807			95	305.665.000	38,20	116.763.000	2,50	7.627.500	63,44	176.772.900	19,61		123,74	301.163.400	130,25	98,53	123,74	301.163.400,00	130,25	17,54	DISKOP
	Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Manajemen Aset	5	145.529.445			1	16.862.500	38,59	4.920.833	-	-	-	4.920.833	1,0	4.920.833	1,00	14.762.500	100,00	87,55	1,00	14.762.500,00	20,00	10,14	DISKOP
	Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah Yang Kondusif	Persentase Legalitas Usaha (%)	83,35	871.351.416			40	155.150.000	-	13.222.300	-	33.626.500	13,53	46.848.800	16,67	57.789.100	30,20	151.486.700	75,50	97,64	30,20	151.486.700,00	36,23	17,39	DISKOP
	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	Persentase Peningkatan Kapasitas SDM (%)	100	28.457.725.103			17,69	762.850.000	2,00	145.413.988	2,05	145.413.988	4,00	145.413.988	6,87	145.413.988	14,92	581.655.950	84,37	76,25	14,92	581.655.950,00	14,92	2,04	DISKOP
	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah	Persentase peningkatan usaha kecil ke menengah	8,35	2.017.523.329			1,67	234.084.000	-	-	-	-	-	1,67	163.484.000	1,67	163.484.000	100,00	69,84	1,67	163.484.000,00	20,00	8,10	DISKOP	
	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Persentase Koperasi Aktif (%)	81,33	8.034.432.913			62	1.343.075.000	9,00	268.508.600	4,19	56.300.000	42,00	702.873.600	4,42	271.987.600	59,61	1.299.669.800	96,15	96,77	59,61	1.299.669.800,00	73,30	16,18	DISKOP
Rata-rata capaian kinerja (%)																		112,12	85,72			63,14	11,89		
Predikat kinerja																		SANGAT TINGGI	TINGGI			RENDAH	SANGAT RENDAH		

Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja : Pemahaman akan Tupoksi,Inovasi,Kecepatan dan Keakuratan kerja serta Kerjasama
Faktor Penghambat Keberhasilan Kinerja: Menunggu DPA Perubahan
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : Melakukan Percepatan Pelaksanaan pada beberapa Kegiatan
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD tahun berikutnya :-

2.12	PENANAMAN MODAL			19.371.787.532				2.958.858.201		273.834.936		759.346.146		500.388.871		1.024.328.844		2.557.898.797				2.557.898.797			
2.12.1	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu			19.371.787.532				2.958.858.201		273.834.936		759.346.146		500.388.871		1.024.328.844		2.557.898.797				2.557.898.797			
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	4.652.272.148	-	-	100	786.063.952	100	133.272.851	100	164.671.919	100	202.139.484	100	225.071.157	100	725.155.411	100,00	92,25	100	725.155.411	100	15,59	OPMPTSP
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Ketersediaan dan Kelayakan Sarana Prasarana Aparatur	100	559.793.442	-	-	100	99.675.000	100	11.259.125	100	24.285.442	100	20.931.033	100	36.493.870	100	92.969.470	100,00	93,27	100	92.969.470	100	16,61	OPMPTSP

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2019)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		Parangkat Daerah Penanggungjawab
										I		II		III		IV										
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100		14=8+12		15=14/5x100		16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan Pembinaan Kapasitas Sumber Daya Aparatur (%)	100	80.873.093	-	-	100	14.400.000	100	550.000	100	500.000	100	500.000	100	1.500.000	100	3.050.000	100,00	21,18	100	3.050.000	100	3,77	OPMPTSP
		Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Nilai LKJP OPD (%)	100	1.010.115.313	-	-	100	179.857.848	100	8.843.000	100	90.053.500	100	20.000.000	100	54.374.400	100	173.270.900	100,00	96,34	100	173.270.900	100	17,15	OPMPTSP

No	Kod a	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2018)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2018)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2018 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		Parangkat Daerah Penanggungjawab
										I		II		III		IV										
										1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah		100	108.305.920	-	-	100	19.284.600	100	2.475.000	100	10.122.600	100	2.475.000	100	3.798.700	100	18.871.300	100,00	97,86	100	18.871.300	100	17,42	DPMPTSP
		Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Tindak Lanjut Hasil Promosi	25	7.525.78.693	0	-	5	1.157.210.052	2	76.450.500	2	271.121.085	-	129.226.600	1	418.771.717	5	895.569.902	100,00	77,39	5	895.569.902	20	11,90	DPMPTSP
		Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Nilai Realisasi Investasi (Rp. Miliar)	102,40	5.434.708.923	-	-	16.000	702.364.749	1,285	40.984.460	2,796	198.591.600	3,039	125.116.754	2,903	284.319.000	10,023	649.011.814	62,64	92,40	7,325	649.011.814	7	11,94	DPMPTSP
Rata-rata capaian kinerja (%)																			94,66	81,53			75,31	13,48		
Predikat kinerja																			SANGAT TINGGI	TINGGI			SEDANG	SANGAT RENDAH		

Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja : Pelaksanaan kegiatan sesuai dengan RDK yang telah disusun;

Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja : Regulasi Penanaman modal yang dinamis namun tidak diikuti perkembangan SDM dan Sarana Prasarana, dan terbatasnya pemahaman petugas/aparatur terkait perlu yang berlaku di dalam pelaksanaan Penanaman Modal

Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : Koordinasi lebih intensif dengan Pemerintah Pusat, dinas/instansi terkait dan stake holder

Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD tahun berikutnya : Menganggarkan sistem informasi/aplikasi untuk optimalisasi Promosi, Penyusunan potensi investasi pada kawasan strategis, Peningkatan sarana prasarana dan kualitas SDM PTSP

2.13		KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA			97.134.878.352				15.428.673.481		2.885.607.104		982.923.913		3.176.750.897		6.147.843.831		12.993.125.545				12.993.125.545			
2.13.1		Dinas Pemuda dan Olahraga			97.134.878.352				15.428.673.481		2.885.607.104		982.923.913		3.176.750.897		6.147.843.831		12.993.125.545				12.993.125.545			
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	8.892.729.705	-	-	100	1.754.740.630	100.00	392.556.804	100.00	195.244.213	100.00	359.939.537	100.00	693.103.964	100	1.640.844.518	100.00	93.51	100.00	1.640.844.518	100.00	18.45	
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Ketersediaan dan Kelayakan Sarana Prasarana Aparatur	100	1.904.918.273	-	-	100	354.275.815	100.00	203.056.800	100.00	6.783.000	100.00	49.266.760.00	100.00	86.144.020	100	345.250.580	100.00	97.45	100.00	345.250.580	100.00	18.12	
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan Pembinaan Kapasitas Sumber Daya Aparatur (%)	100	931.572.392	-	-	100	141.400.000	100.00	121.525.000	100.00	-	100.00	3.150.000	100.00	7.650.000	100	132.325.000	100.00	93.58	100.00	132.325.000	100.00	14.20	
		Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Nilai UKJIP OPD (Nilai)	A	2.173.085.628	-	-	B	384.908.600	C	185.658.300	C	1.400.000	C	22.150.000	C	118.508.046	66.67	327.716.346	100.00	85.14	66.67	327.716.346	66.67	15.08	
		Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Manajemen Aset (Dokumen)	5	151.842.450	-	-	I	27.611.500	-	9.680.000	I	1.151.500	-	4.800.000	1.00	11.860.000	2.00	27.491.500	200.00	99.57	2	27.491.500	40.00	18.11	
		Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda	Kelompok pemuda yang berpartisipasi aktif dalam pembangunan pendidikan (%)	100	3.291.994.691	-	-	60	1.307.443.800	20	68.200.000	30	71.507.000	5	716.785.500	5	278.299.100	60	1.134.791.600	100.00	86.79	60.00	1.134.791.600	60.00	34.47	
		Program peningkatan peran serta kepemudaan	Jumlah pemuda berprestasi (Urang)	43	12.835.029.396	-	-	6	852.240.000	-	255.350.000	-	80.770.000	3	-	20	333.545.000	23	669.665.000	383.33	78.58	24.00	669.665.000	55.81	5.22	
		Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda	Persentase wirausahawan muda (%)	68.39	2.732.555.474	-	-	67.97	430.485.500	-	210.937.500	-	-	-	191.136.000	68.07	18.393.400.00	68.07	420.466.900	100.15	97.67	68.07	420.466.900	99.53	15.39	
		Program Pembinaan dan Pemasarakan Olahraga	Cakupan pembinaan atlet berprestasi (%)	100	36.739.712.823	-	-	100	4.940.784.300	100.00	125.660.000	100.00	101.437.200	100.00	423.450.000	100	2.820.772.865	100	3.471.320.065	100.00	70.26	100.00	3.471.320.065	100.00	9.45	
		Program Peningkatan Sarana Prasarana Pemuda dan Olahraga	Persentase sarana prasarana pemuda dan olahraga yang terstandar (%)	55	27.481.437.518	-	-	35	5.235.783.316	5.00	1.112.982.700	10.00	524.631.000	10.00	1.406.073.100	10.00	1.779.567.236	35.00	4.823.254.036	100.00	92.12	35.00	4.823.254.036	63.64	17.55	
Rata-rata capaian kinerja (%)																			138.35	89.47			78.56	16.60		
Predikat kinerja																			SANGAT TINGGI	TINGGI			TINGGI	SANGAT RENDAH		

Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja : Ilmu pengetahuan yang terus berkembang, Koordinasi dan kerjasama yang baik dalam tim.

Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja : Belum terjalin koordinasi yang baik antara sektor dan pihak terkait baik di tingkat Provinsi maupun antar Provinsi dengan kab/kota, , jumlah SDM yang belum memadai, dan prasarana sarana & dana yang masih kurang

Tindak lanjut yang diperlukan dalam Triwulan berikutnya : memastikan pelaksanaan program/kegiatan sesuai dengan jadwal

Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD Tahun berikutnya : Menyusun rencana kerja berdasarkan kebutuhan untuk mewujudkan tercapainya indikator kinerja

STATISTIK				8.638.570.000				1.378.548.579		43.108.660		417.253.440		378.021.714		512.581.560		1.348.945.374					2.314.414.982			
2.14.1	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik			8.638.570.000				1.378.549.579		43.108.660		417.253.440		378.021.714		512.581.560		1.348.945.374					2.314.414.982			
	Program Pengembangan Data/Informasi/ Statistik Daerah	Cakupan ketersediaan data yang terintegrasi (%)	100	8.638.570.000		70,00		1.378.549.579	10,00	43.108.660	40,00	417.253.440	30,00	378.021.714	15,49	512.581.560	95,49	1.348.945.374	136,41	97,99		95,49	2.314.414.982	95,49	26,79	Diskominfotik Prov. NTB
Rata-rata capaian kinerja (%)																			136,41	97,99			95,49	26,79		
Predikat kinerja																			SANGAT TINGGI	SANGAT TINGGI			SANGAT TINGGI	SANGAT RENDAH		

Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja : -

Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja : -

No	Kod a	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2019)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		Parangkat Daerah Penanggungjawab
										I		II		III		IV										
										1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	16
		Program Pengembangan Pengelolaan Kekayaan Budaya	Persentase karya budaya yang direvitalisasi dan diinventarisasi (%)	100	14.758.765.075	-	-	100	1.468.055.000	-	292.063.000	-	292.063.000	-	292.063.000	100	292.063.150	100	1.168.252.150	100	79,58	100,00	1.168.252.150	100,00	7,92	
		Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Persentase penyelenggaraan festival seni (%)	100	24.981.904.769	-	-	100	2.600.425.000	-	576.951.600	-	576.951.600	-	576.951.600	100	576.951.715	100	2.307.806.515	100	88,75	100,00	2.307.806.515	100,00	9,24	
		Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Budaya Daerah	Persentase penyelenggaraan Festival seni (%)	100	2.441.180.996	-	-	100	200.000.000	-	49.049.500,00	-	49.049.500,00	-	49.049.500,00	100	49.049.635	100	196.198.135	100	98,10	100,00	196.198.135	100,00	8,14	
Rata-rata capaian kinerja (%)																			100	87,94			100,00	7,22		
																			st	SANGAT TINGGI	TINGGI			SANGAT TINGGI	SANGAT RENDAH	

Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja : -
Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja : -
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Triwulan berikutnya : -
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD Tahun berikutnya : -

2.17	PERPUSTAKAAN			38.287.771.000			6.769.346.800		798.494.549		2.125.233.749		3.638.238.099		6.191.974.799		6.191.974.799					6.191.974.799			
2.17.1	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan			38.287.771.000			6.769.346.800		798.494.549		2.125.233.749		3.638.238.099		6.191.974.799		6.191.974.799					6.191.974.799			
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	9.179.779.000,00			100	1.627.312.200,00	100,00	241.293.300,00	100,00	584.541.100,00	100,00	992.049.350,00	100,00	1.459.370.450,00	100	1.459.370.450,00	100,00	89,68	100	1.459.370.450,00	100,00	15,90	
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Ketersediaan dan Kelayakan Sarana Prasarana Aparatur	100	21.666.106.000,00			100	4.074.747.000,00	100,00	416.492.249,00	100,00	1.219.550.749,00	100,00	2.026.306.749,00	100,00	3.793.068.449,00	100	3.793.068.449,00	100,00	91,12	100	3.793.068.449,00	100,00	17,14	
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan Pembinaan Kapasitas Sumber Daya Aparatur (%)	100	198.173.000,00			100	35.286.000,00			100,00	4.000.000,00	100,00	4.000.000,00	100,00	35.086.000,00	100	35.086.000,00	100,00	99,43	100	35.086.000,00	100,00	17,70	
	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Jumlah Pelaporan Kinerja (Dokumen)	6	1.205.346.000,00			6	230.620.000,00	2,00	54.610.000,00	2,00	108.610.000,00	1,00	163.610.000,00	1,00	214.610.000,00	6,00	214.610.000,00	100,00	93,06	6	214.610.000,00	100,00	17,80	
	Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Manajemen Aset (Dokumen)	1	130.296.000,00			100	23.200.000,00	-	4.050.000,00	-	8.100.000,00	-	12.150.000,00	1,00	23.200.000,00	1,00	23.200.000,00	100,00	100,00	1	23.200.000,00	100,00	17,81	
	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	Jumlah Pengunjung Perpustakaan per Tahun (Kunjungan)	1.206.000	5.908.074.000,00			1.052.000	778.181.600,00	266.000	82.049.000,00	266.000	200.431.900,00	266.000	440.122.000,00	266.186	746.639.900,00	1.064.186	746.639.900,00	101,16	95,95	1.064.186	746.639.900,00	88,24	12,64	
Rata-rata capaian kinerja (%)																				100,19	94,87			98,04	16,50
Predikat kinerja																				SANGAT TINGGI	SANGAT TINGGI			SANGAT TINGGI	SANGAT RENDAH

Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja : Program/Kegiatan dilaksanakan sesuai dengan target yang direncanakan dalam DPA
Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja : Tidak tercapainya harga karena kendaraan dibawah standar harga, dan hasil negeosiasi rekonsiliasi gedung kantor
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Triwulan berikutnya : Penyempurnaan perencanaan anggaran kegiatan
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD Tahun berikutnya : Program/Kegiatan hasil Evaluasi realisasi Kinerja Anggaran

2.18	KEARSIPAN			2.453.850.000			602.216.000		23.775.000		52.410.000		149.383.200		593.213.200		593.213.200				593.213.200				
2.18.1	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan			2.453.850.000			602.216.000		23.775.000		52.410.000		149.383.200		593.213.200		593.213.200				593.213.200				
	Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan	Persentase Peningkatan Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan (%)	100	194.931.000			100	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah	Jumlah Arsip yang terselamatkan dibagi total arsip yang tersimpan di depo	100	841.287.000,00			33,33	349.797.000,00		10.775.000,00		28.435.000,00		45.027.000,00	33,33	346.827.000,00	33,33	346.827.000,00	100,00	99,15		33	346.827.000,00	33,33	41,23
	Program Pemeliharaan Rutin/berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kearsipan (%)	100	432.166.000,00			100	76.950.000,00		5.975.000,00		16.950.000,00		16.950.000,00	100,00	75.950.000,00	100	75.950.000,00	100,00	98,70	100	75.950.000,00	100,00	17,57	
	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi	Peningkatan Kualitas SDM Layanan Informasi (Orang)	295	776.095.000,00			95	138.189.000,00	20,00	1.400.000,00	20,00	1.400.000,00	30,00	80.646.200,00	65,00	133.256.200,00	135	133.256.200,00	142,11	96,43		135	133.256.200,00	45,76	17,17
	Program Peningkatan dan Pengendalian Kearsipan	Peningkatan Record Center DPD (DPD)	45	209.374.000,00			15	37.280.000,00	5,00	5.625.000,00	6,00	5.625.000,00	8,00	6.760.000,00	10,00	37.180.000,00	10,00	37.180.000,00	66,67	99,73	10	37.180.000,00	22,22	17,76	
Rata-rata capaian kinerja (%)																		102,19	98,50			50,33	23,43		

No	Kod e	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2019)		Realisasi Kinerja Pada Trivulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab					
										I				II													III				IV
										1	2	3	4	5		6		7		8		9		10			11		12		13=12/7x100
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp						
Predikat kinerja																										SANGAT TINGGI	SANGAT TINGGI			FALSE	SANGAT RENDAH

Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja : -
Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja : -
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Triwulan berikutnya : -
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD Tahun berikutnya : -

		URUSAN PILIHAN																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja : -
Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja : -
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Triwulan berikutnya : -
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD Tahun berikutnya : -

3.2		PARISWATA																													
3.2.1		Dinas Pariwisata																													
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran (%)	100	13.196.657.751	-	-	100	2.005.735.751	25	460.210.877	25	482.801.847.00	25	380.746.280	25	609.821.902.00	100	1.933.580.906	100.00	96.40	100.00	1.933.580.906	100.00	14.65						
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan ketersediaan sarpras yang ber kondisi baik	100	2.206.400.000	-	-	100	281.400.000	25	55.196.076	25	71.138.514.00	25	63.920.588	25	73.564.590.00	100	263.819.768	100.00	93.75	100.00	263.819.768	100.00	11.96						
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan pembinaan ASN yang berkompeten (%)	100	299.000.000	-	-	100	49.000.000	-	-	13.00	1.250.000.00	20	3.374.800	67	40.364.000.00	100	44.988.800	100.00	91.81	100.00	44.988.800	100.00	15.05						
		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Nilai LKJIP DPD (%)	100	3.486.050.000	-	-	100	324.490.400	25	76.166.000	25.00	22.435.000.00	25	45.539.000	25	147.637.575.00	100	291.777.575	100.00	89.92	100.00	291.777.575	100.00	8.37						
		Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Manajemen Aset (%)	100	276.325.000	-	-	100	44.875.000	25	10.434.891	25.00	10.434.891	25	10.434.891	25	10.434.891	100	41.739.562	100.00	93.01	100.00	41.739.562	100.00	15.11						
		Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Angka kunjungan wisatawan (Drang)	23.100.000	18.917.458.200	-	-	4.000.000	2.497.495.000	1.000.000	136.856.320	1.047.326	634.101.147.00	942.089	744.661.700	76957	859.564.481.00	3.706.352	2.375.183.648	92.66	95.10	3.706.352	2.375.183.648	16.04	12.56						

No	Kod a	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2019)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab
										I		II		III		IV										
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100		14=8+12		15=14/5x100		16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	Persentase Desa Wisata yang dikembangkan (target 99 desa) (%)	15,38	62.299.703.000	-	-	20	15.888.714.000	0	3.040.000	10,00	132.850.000,00	10	2.902.351.600		11.857.476.200,00	20	14.895.717.800	100,00	93,75	20,00	14.895.717.800	130,04	23,91	
		Program Pengembangan Kemitraan	Persentase SDM penunjang layanan pariwisata yang memenuhi standar (%)	1	11.806.692.000	-	-	15,63	301.992.600	-	-	2,20	47.817.600,00	10,00	18.102.500	15,63	93.555.000,00	15,63	159.475.100	100,00	52,81	15,63	159.475.100	1.563	1,35	
		Program Pengembangan Atraksi dan Daya Tarik Wisata	Rata-rata Lama Menginap (Hari)	3,35	30.058.100.049	-	-	2,75	3.170.589.249	0,69	94.643.061	0,69	979.333.900,00	0,69	459.330.000	2,05	1.618.614.249,00	2,05	3.151.921.210	74,55	99,41	2,05	3.151.921.210	61,9	10,49	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2018)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2018)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2018 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab		
										I		II		III		IV												
										1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=12/7x100	14=B+12	15=14/5x100	16			
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					
		Program Penataan Geopark	Persentase Geosite yang tertata (%)	50,00	28.000.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
Rata-rata capaian kinerja (%)																							96,36	89,55		227,03	11,34	
Predikat kinerja																							SANGAT TINGGI	TINGGI		SANGAT TINGGI	SANGAT RENDAH	

Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja :
Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja :
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD tahun berikutnya :

		PERTANIAN			584.003.522.510				100.831.865.576		1.712.530.572		5.122.546.186		30.996.010.012		59.417.817.283		87.248.704.034				99.595.218.962				
3.3.1		Dinas Pertanian dan Perkebunan			583.985.865.900				87.285.311.615		674.894.572		2.724.584.166		29.521.142.012		51.966.377.798		84.886.998.547				99.578.772.565				
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	500	51.452.817.000			100	860.463.706	25,00	203.622.105	25,00	203.622.105	25,00	203.622.105	25,00	203.622.105	100	814.488.418	100,00	94,66	100,00	7.443.461.943	20,00	14,47		
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Ketersediaan dan Kelayakan Sarana dan Prasarana Aparatur	500	41.155.997.000			100	532.950.000	25,00	100.411.608	25,00	100.411.608	25,00	100.411.608	25,00	100.411.608	100	401.646.431	100,00	75,36	100,00	6.472.653.044	20,00	15,73		
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan Pembinaan Kapasitas Sumber Daya Aparatur (%)	500	1.144.045.000			100	145.600.000	25,00	25.405.000	25,00	43.730.000	25,00	63.855.000	25,00	4.500.000	100	137.290.000	100,00	94,29	100,00	169.645.000	20,00	14,83		
		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Nilai LKJIP OPD	-	2.776.093.000			0	433.812.049	-	61.285.220	-	34.547.830	-	198.302.940	-	85.997.830	-	380.133.820		87,63	-	423.423.820	0,00	15,25		
		Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Manajemen Aset (Dokumen)	135	1.370.398.000			29	106.839.000	3	22.533.000	3	24.697.000	12	70.812.500	11	(14.006.453)	29	104.036.047	100,00	97,38	29,00	225.048.427	21,48	16,42		
		Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	Nilai Tukar Petani	105	29.018.413.000			105	87.360.000	-	-	-	-	-	-	115,81	87.180.000	115,81	87.180.000	110,30	99,79	104,00	508.744.000	99,05	1,75		
		Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan	Persentase Peningkatan Produksi Tanaman Pertanian/ Perkebunan (%)		465.503.681.000				83.362.449.060	-	261.637.640	-	2.317.575.624	-	28.894.337.860	-	50.944.490.310	-	82.408.041.434		98,86		83.781.613.934	0,00	18,00		
		Produksi Padi	Produksi Padi (Ton BKG)	2.442.232,00	-	-	-	2.346.937	-	-	-	-	-	-	2.436.349	-	2.436.349	-	103,81			2.221.081,64	-	90,94	0,00		
		produksi jagung	produksi jagung (Ton PK)	#####	-	-	-	2.148.597	-	-	-	-	-	-	2.003.267	-	2.003.267	-	93,24			2.494.931	-	112	-		
		Produksi Kedelai	Produksi Kedelai (Ton Biji Kering)	58.959	-	-	-	56.658	-	-	-	-	-	-	80.925	-	80.925	-	142,83			43.287	-	73	-		
		Produksi Cabe	Produksi Cabe (Ton Buah Segar)	19.837	-	-	-	19.062	-	-	-	-	-	-	181.926	-	181.926	-	954,39			143.309	-	722	-		
		Produksi Bawang Merah	Produksi Bawang Merah (Ton Umbi Basah)	205.428	-	-	-	197.412	-	-	-	-	-	-	161.411	-	161.411	-	81,76			164.439	-	80	-		
		Produksi Manggis	Produksi Manggis (Ton Buah Segar)	7.685				7.385			-		-		11.556	-	11.556	-	156,48			16.105	-	210	-		
		Produksi Tembakau	Produksi Tembakau	53.793				51.694			-		-		43.068,47	-	43.068,47	-	83,31			102.350	-	190	-		
		Produksi Kopi	Produksi Kopi (Ton Berasan)	5.139	-	-	-	4.938	-	-	-	-	-	-	6.566	-	6.566	-	132,98			11.838	-	230	-		
		Produksi Kakao	Produksi Kakao (Ton)	2.210	-	-	-	2.116	-	-	-	-	-	-	2.219,35	-	2.219,35	-	104,93			4.416	-	210	-		
		Produksi Kelapa	Produksi Kelapa (Ton Eq. Kopra)	50.832	-	-	-	48.849	-	-	-	-	-	-	48.766,08	-	48.766,08	-	99,83			122.556	-	241	-		
		Produksi Mete	Produksi Mete (Ton Biji Kering)	13.383	-	-	-	12.861	-	-	-	-	-	-	10.410,72	-	10.410,72	-	80,95			21.479	-	160	-		
		Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan	Persentase Penyuluh Yang Ditingkatkan Kapasitasnya (%)	46,75	1.564.621.900	-	-	26,75	1.755.837.800	-	-	-	-	-	26,75	554.182.397	27	554.182.397	100,00	31,56		27	554.182.397	57	35		
																				Rata-rata capaian kinerja (%)		101,72	84,94		141,59	7,33	
																				Predikat kinerja		SANGAT TINGGI	TINGGI		SANGAT TINGGI	SANGAT RENDAH	

Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja : 1) Terbangunnya Koordinasi pada jajaran Pengelola Keuangan serta instansi terkait (Bappeda, Biro Keuangan, Kab/Kota); 2) SDM yang memadai sehingga kinerja menjadi lebih baik; 3) Menekan seminimal mungkin adanya kekurangan, kesalahan dari kelengkapan dokumen yang terkait; 4) Capaian kinerja di atas 100% didukung oleh beberapa produksi produk pertanian yang jauh melampaui target seperti produksi cabe, kelapa , mete.
Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja : Adanya kekurangan kelengkapan dokumen yang harus dipenuhi sebagai pendukung dalam administrasi

Tindak lanjut yang diperlukan dalam Triwulan berikutnya : -

Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD Tahun berikutnya : Merencanakan secara tepat dan akurat dan semaksimal mungkin berkoordinasi secara intern dengan bidang-bidang terkait sehingga tidak terjadi revisi

3.3.2		Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan			17.658.610				13.548.553.981		1.037.838.000		2.397.982.000		1.474.868.000		7.451.239.487		12.381.705.487				18.446.397			
-------	--	---	--	--	-------------------	--	--	--	-----------------------	--	----------------------	--	----------------------	--	----------------------	--	----------------------	--	-----------------------	--	--	--	-------------------	--	--	--

No	Kod s	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2018)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2018)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2018 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		Parangko Daerah Penanggungjaw ab
										I		II		III		IV										
				I	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	2.068.037			100	969.217.212	17	365.649.000	24	500.480.000	22	19.743.000	33	41.355.686	96	927.227.686	96,34	95,67	96	2.039.484	96,34	99	
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Ketersediaan dan Kelayakan Sarana Prasarana Aparatur	100	425.370			100	294.800.000	20	86.320.000	32	135.618.000	20	4.052.000.00	25	64.608.074	97	290.598.074	97,33	98,57	97	411.070	97,33	97	
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan Pembinaan Kapasitas Sumberdaya Aparatur (%)	100%	216.358			100	58.458.000	16	868.000	26	40.066.000	30	315.000	27	17.143.500	100	58.392.500	99,68	99,89	100	151.119	99,68	70	
		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Nilai LKJIP OPD	85	956.518			100	875.266.015						70,65	865.949.795	70,65	865.949.795	70,65	98,94	71	1.021.813	70,65	107		
		Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Manajemen Aset (%)	100	112.740			100	40.712.100	12	13.804.000	30	14.405.000	19	1.028.000	36	9.869.000	98,02	39.106.000	98,02	96,05	98	111.486	98,89	99	
		Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	Pertumbuhan Populasi Ternak (%)	5	13.291.861			5	10.258.982.334	0,2	500.504.000	1	1.633.741.000	1	1.287.692.000	3	5.772.304.232	5	9.194.241.232	91,54	89,62	5	11.725.235	91,54	88	
		Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak	Persentase Penurunan Ternak Yang Terinfeksi PHMS (%)	1	297.969			1	757.968.300	0,05	38.709.000	0,01	10.370.000	0,12	89.005.000	0,82	566.149.000	1	704.233.000	100,00	92,91	1	704.233	92,91	236	
		Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan	Cakupan Produksi Peternakan Yang Dipasarkan (%)	75	97.750			80	97.750.000	4	5.100.000	17	21.250.000	19	23.402.000	34	40.915.900	75	90.667.900	93,40	92,75	75	90.668	99,62	93	
		Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan	Cakupan Kelompok Ternak Yang Memanfaatkan Teknologi Peternakan (Kelompok)	100	191.007			100	193.400.000	14	26.682.000	22	42.032.000	26	49.631.000	38	72.944.300	100	191.289.300	100,00	98,91	100	191.289	100,00	100	
Rata-rata capaian kinerja (%)																				94,11	95,92			94,11	109,84	
Predikat kinerja																				SANGAT TINGGI	SANGAT TINGGI			SANGAT TINGGI	SANGAT TINGGI	

Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja : -
Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja : -
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Triwulan berikutnya : -
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD Tahun berikutnya : -

		KEHUTANAN				231.956.663.662				5.238.913.113		227.508.838		834.373.442		129.810.479		3.688.127.129		4.879.819.888				4.879.819.888			
3.4.1		Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan				231.956.663.662				5.238.913.113		227.508.838		834.373.442		129.810.479		3.688.127.129		4.879.819.888				4.879.819.888			
		Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Manajemen Aset (%)	100		1.262.232.979	-	-	19	341.533.100	12	38.969.800	2	46.694.250	-	58.642.000	-	171.575.950	14,00	315.882.000	73,68	92,49	14,00	315.882.000	14,00	25,03	
		Program Perlindungan Hutan, Konservasi sumber daya alam dan ekosistem	Rasio Kemampuan perlindungan hutan (%)	0.0020		93.284.043.683	-	-	0.0009	1.616.257.613	-		-			0.00		1.561.184.031	0.001	1.561.184.031	100,00	96,59	0,00	1.561.184.031	45,01	1,67	
		Program Pengelolaan Hutan	Persentase desa sekitar hutan yang diberdayakan melalui pembentukan kelompok HHBK dan Jasing (%)	40,95		78.500.135.000			28,60	1.777.170.160	-	188.539.038	-	787.679.192	-	71.168.479	35,60	609.399.540	35,60	1.656.786.249	124,48	93,23	35,60	1.656.786.249	86,94	2,11	
			Cakupan Luas Pengembangan Tanaman Gaharu dan HHBK Lainnya (%)	20,08				0,08								-		-	0,00	0,00		0,00	-	-			
		Program Rehabilitasi Kerjasama dan Perhutanan Sosial	Persentase desa sekitar hutan yang diberdayakan berbasis perhutanan	41,56		58.910.252.000			29,22	1.503.952.240	-	-	-	-		43,62	1.345.967.608	43,62	1.345.967.608	149,28	89,50	43,62	1.345.967.608	104,96	2,28		
			Persentase penurunan luas lahan	0,54					0,53							0,53		0,53	-	100,00		0,53	-	98,15			
Rata-rata capaian kinerja (%)																				109,49	92,95			69,81	6,22		
Predikat kinerja																				SANGAT TINGGI	SANGAT TINGGI			SEDANG	SANGAT RENDAH		

Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja : -
Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja : -

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2019)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab								
										I				II													III				IV			
										I		II		III		IV											I		II		III		IV	
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100		14=B+12		15=14/5x100		16								
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp									

Tindak lanjut yang diperlukan dalam Triwulan berikutnya : -

Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD Tahun berikutnya : -

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2019)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab
										I		II		III		IV										
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100		14=8+12		15=14/5x100		16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
3.5		ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL			68.234.989			10.665.827.841		659.886.295		1.553.282.481		2.595.806.107		5.136.132.373		9.944.907.256				10.214.484				
3.5.1		Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral			68.234.989			10.665.827.841		659.886.295		1.553.282.481		2.595.806.107		5.136.132.373		9.944.907.256				10.214.484				
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	8.030.360			100	710.919.991	25	159.838.607	25	289.199.140	25	152.247.760	25	80.524.851	100	681.810.358	100,00	95,91	100,00	844.070	100,00	10,51	
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Ketersediaan dan Kelayakan Sarana Prasarana Aparatur	100	3.890.040			100	328.383.536	25	25.505.003	25	129.503.069	25	50.672.083	25	108.131.063	100	313.811.218	100,00	95,56	100,00	334.034	100,00	8,59	
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan Pembinaan Kapasitas Sumberdaya Aparatur (%)	100	800.666			100	12.959.600	18	5.809.600	-	-	-	-	-	-	18	5.809.600	17,89	44,83	17,89	5.810	17,89	0,73	
		Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Nilai LAKIP	8	1.037.354			8	162.963.050	-	29.500.000	-	27.750.900	-	27.569.900	-	51.278.400	-	136.099.200		83,52	100,00	136.099	100,00	13,12	
		Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Nilai LAKIP	5	142.146			1	21.822.350	0	3.480.800	0	2.717.900	0	9.920.400	0	4.800.000	1	20.919.100	100,00	95,86	1,00	20.919	20,00	14,72	
		Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan	Persentase Pemegang IUP yang melaksanakan Good Mining Practices (%)	100	6.170.830			2,17	481.329.700	0	39.356.500	1	233.560.940	0	111.592.700	0,83	81.371.200	2,17	465.881.340	100,00	96,79	2,17	496.362	2,17	8,04	
		Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan	Rasio Elektrifikasi (%)	97	18.005.408			94,46	2.417.739.400	95	79.967.727	97	81.745.600	98	910.570.800	99,55	1.204.530.273	99,55	2.276.814.400	105,39	94,17	99,55	2.292.008	2,55	12,73	
		Program Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Air Tanah	Cakupan masyarakat yang terlayani air bersih (KK)	3.400	14.449.165			2040	5.921.550.347	-	185.713.048	85	592.509.766	425	1.284.752.628	1.615	3.397.617.657	2.125	5.460.593.099	104,17	92,22	2.125,00	5.480.783	62,50	37,93	
		Program Pengembangan dan Pengelolaan Energi dan Sumber Daya Mineral	Persentase Keselarasan pengembangan dan pengelolaan energi dan sumber daya mineral (%)	100	2.100.833			100	347.173.275	16	49.481.600	28	96.510.334	4	18.470.600	53	177.255.897	100	341.718.431	100,00	98,43	100,00	341.718	100,00	16,27	
		Program Pencegahan Kerusakan Lingkungan	Jumlah situs geologi yang dilindungi (Situs)	15	3.498.538			3	90.935.500	-	-	-	50.880.000	-	5.399.236	4	17.775.400	4	74.054.636	133,33	81,44	4,00	74.055	26,67	2,12	
		Program Pengembangan dan Pemanfaatan Energi	Kontribusi pembangkit listrik EBT	6	10.109.650			5,57	170.051.092	-	81.033.410	-	48.904.832	-	24.610.000	7	12.847.632	7,35	167.395.874	131,96	98,44	7,35	188.636	131,96	1,87	
Rata-rata capaian kinerja (%)																			99,27	88,83				60,34	11,51	
Predikat kinerja																			SANGAT TINGGI	TINGGI				RENDAH	SANGAT RENDAH	

Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja : (1) Adanya revisi uraian DPA terkait perubahan kebijakan pemerintah pusat yaitu kebijakan diskon biaya pemasangan listrik untuk rumah tangga kategori miskin yang menyebabkan adanya penyesuaian target penerima bantuan sosial pemasangan listrik gratis yang semula berjumlah 750 rumah tangga sasaran (RTS) bertambah menjadi 950 RTS.; (2) Adanya keterlambatan proses lelang yang berada diluar kendali dinas; (3) Adanya

Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja : -

Tindak lanjut yang diperlukan dalam Triwulan berikutnya : -

Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD Tahun berikutnya : -

3.6		PERDAGANGAN			76.820.783.932				13.678.459.000		1.934.800.368		348.261.480		3.964.174.845		4.592.404.028		10.839.440.731	110.06	86.21		10.818.561.731	23.00	12.70	
3.6.1		Dinas Perdagangan			76.820.783.932				13.678.459.000		1.934.800.368		348.261.480		3.964.174.845		4.592.404.028		10.839.440.731	110.06	86.21		10.818.561.731	23.00	12.70	
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat Kelancaran Administrasi Perkantoran (%)	100	6.836.948.000	-	-	100	1.125.912.800	25	359.319.055	25	110.801.684	25	251.245.077	25	323.429.997	100	1.044.795.813	100.00	92.80	20	1.044.795.813	20	15	Dinas Perdagangan
		Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	Tingkat Kelancaran Administrasi Perkantoran (%)	100	6.338.732.000	-	-	100	925.327.600	25	450.573.813	25	17.851.687.00	25	279.329.018	25	125.357.292	100	873.111.810	100.00	94.36	20	873.111.810	20	14	Dinas Perdagangan
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Tingkat Kompetensi Aparatur (%)	100	91.825.000	-	-	100	16.350.000	25	3.500.000	25	750.000	25	5.071.550	25	2.601.500	100	11.923.050	100.00	72.92	20	11.923.050	20	13	Dinas Perdagangan
		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan keuangan	Rencana Program (Dokumen)	9	2.727.406.000	-	-	9	485.633.000	2	82.515.900	1	29.770.000	3	172.290.000	3	177.575.000	9	462.150.900	100.00	95.16	9	462.150.900	20	17	Dinas Perdagangan
		Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Manajemen Asset (Dokumen)	1	156.130.000	-	-	1	27.800.000	1	0.00	-	0.00	-	7.650.000	-	2.550.000	1	10.200.000	100.00	36.69	1	10.200.000	20	7	Dinas Perdagangan
		Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	Tingkat Penyelesaian Pengaduan Konsumen (%)	86	3.468.421.000	-	-	70	545.753.000	40	89.182.400	50	94.020.000	60	125.686.600	97	199.281.400	97	508.170.400	138.57	93.11	20	508.170.400	23	15	Dinas Perdagangan

No	Kod a	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2019)	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2019)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)	Perangkat Daerah Penanggungjawab							
							I		II		III		IV													
							I	2	3	4	5	6	7	8						9	10	11	12	13=12/7x100	14=B+12	15=14/5x100
K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	16				
		Program Peningkatan Kerjasama Perdagangan Internasional	Pertumbuhan Jumlah Negara Tujuan Ekspor (%)	33	662.710.000	-	-	21	118.000.000		24.420.000		0.00		66.036.200	23	21.955.500	23	112.411.700	109.52	95.26	23	112.411.700	70	17	Dinas Perdagangan
		Program Peningkatan Dan Pengembangan Ekspor	Persentase Peningkatan Kerjasama Jejaring Usaha dan Mitra (%)	67	4.368.220.000	-	-	41,21	208.787.400		57.488.500	26	26.721.000.00	20	44.815.400	20	69.902.000	66	198.926.900	160.16	95.28	-	178.047.900	-	4	Dinas Perdagangan
		Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	Cakupan Harga Bahan Pokok Yang Stabil Antar Waktu Antar Wilayah (%)	4	8.333.915.000	-	-	6,00	1.310.180.485		225.980.000	3	45.015.000.00	3	707.063.000.00	3,75	257.630.000	3,75	1.235.688.000	62.50	94,31	3	1.235.688.000	20	15	Dinas Perdagangan

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2019)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab
										I		II		III		IV										
				1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima Dan asongan	Persentase Peningkatan Pedagang Kakilima dan usaha informal yang memperoleh peralatan perdagangan (%)	26,67	38.255.220.000	-	-	15,38	6.811.600.000		370.799.200		0,00		2.259.176.400	12,27	3.295.037.600	12,27	5.925.013.200	79,78	86,98	15	5.925.013.200	20	15	Dinas Perdagangan
		Program Pembinaan Dan Pengembangan Usaha Daerah	Persentase Kerjasama, Jejaring Usaha Dan Mitra (%)	120	5.581.259.000	-	-	41,21	499.962.080	5	270.821.500	10	23.332.119,00	15	45.811.600	36	117.083.739	66	457.048.958	160,16	91,42	20	457.048.958	20	8	Dinas Perdagangan
Rata-rata capaian kinerja (%)																		110,06	86,21			23,00	12,70			
Predikat kinerja																		SANGAT TINGGI	TINGGI			SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH			

Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja : Operasi Pasar, Pasar Murah, Pemantauan dan Pengawasan oleh satgas pangan sebagai faktor stabilisasi harga di daerah

Faktor Penghambat Keberhasilan Kinerja: Perbedaan harga di tingkat distributor dan pengecer yang tidak berdasarkan HET (Harga Eceran Tertinggi)

Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :

Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD tahun berikutnya : Meningkatkan intensitas pengawasan dan sosialisasi regulasi terkait HET

	PERINDUSTRIAN			266.728.412.396				12.863.237.900		295.528.897		1.776.042.957		2.423.744.637		4.260.005.812		8.755.320.103	85,17	8,87			9.569.789.211	17,36	0,83	
3.7.1	Dinas Perindustrian			266.728.412.396				12.863.237.900		295.528.897		1.776.042.957		2.423.744.637		4.260.005.812		8.755.320.103	85,17	8,87			9.569.789.211	17,36	0,83	
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	12.064.584.200			100	900.997.340	9,12	108.964.863	27,18	324.614.569.00	20	244.012.611	28	90.936.769	85	768.528.812	85,10	85,30		85,10	1.016.213.561	85,10	8,42	
	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	Cakupan Ketersediaan Dan Kelayakan Sarana Dan Prasarana Aparatur	100	7.966.465.000			100	525.143.600	9,35	66.793.000	28,97	263.121.781.00	23	45.805.212	38	80.947.020	100	456.667.013	100,00	86,96		100,00	503.327.712	100,00	6,32	
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	Rencana Program . Pelaporan Kinerja Dan Keuangan	100	3.442.205.000			100	405.195.610	46,15	-	15,38	18.050.000.00	15,38	53.417.625	23	200.127.500	100	271.595.125	100,00	67,03		100,00	282.395.125	100,00	8,20	
	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan	Manajemen Aset (Dokumen)	2	110.920.000			2	11.350.000	-	-	-	0,00	1	6.400.000	1	4.950.000	2	11.350.000	100,00	100,00		2,00	11.350.000	100,00	10,23	
	Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi	Cakupan Ikm Yang Terbina Dalam Kapasitas Iptek Sistem Produksi (%)	20,80	20.590.120.440			10,58	2.671.715.100	-	-	2,65	606.880.857	1,06	258.391.400	6,34	1.469.333.754	10,04	2.334.606.011	94,92	87,38		9,52	2.334.606.011	45,78	11,34	
	Program Pengembangan Industri Kecil Dan Menengah	Cakupan Ikm Yang Terbina (%)	7,47	13.745.314.845			2,69	2.130.100.000	0,02	25.292.054	0,07	68.382.000	0,28	116.999.295	4,55	1.348.450.889	4,55	1.559.124.238	169,14	73,19		2,60	1.559.124.238	34,77	11,34	
	Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri	Cakupan Ikm Yang Menerapkan Teknologi Dalam Proses Produksi (%)	8,24	47.709.195.000			4,16	2.727.286.790	0,15	94.476.980	0,28	227.041.850	1,78	1.571.542.600	2,02	767.056.555	2,02	2.660.117.985	48,56	97,54		3,66	3.169.441.645	44,44	6,64	
	Program Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial	Cakupan Sentra Industri Potensial Yang Dikembangkan (%)	12,18	1.047.286.260			5,22	345.314.000	-		0,20	165.764.000	0,50	8.710.000	0,73	149.521.025	0,73	323.995.025	13,98	93,83		4,96	323.995.025	40,71	30,94	
	Program Kerjasama Pembangunan Sektor Perindustrian	Jumlah Kerjasama Ikm Dengan Mitra	80	3.858.282.000			60	373.493.000	9,00	-	5,00	68.362.300	5,00	57.837.694	5,00	148.682.100	24	274.882.094	40,00	73,60		51,43	274.882.094	64,29	7,12	
	Program Peningkatan Mutu Dan Pengembangan Komoditi Unggulan Daerah	Cakupan Ikm Dalam Pengembangan Komoditi Unggulan Daerah (%)	2,20	879.686.180			0,97	94.825.000	-	-	0,48	33.825.600	0,48	60.628.200		-	1	94.453.800	100,00	99,61		0,97	94.453.800	43,97	10,74	
Rata-rata capaian kinerja (%)																			85,17	86,44			65,91	11,13		
Predikat kinerja																			TINGGI	TINGGI			RENDAH	SANGAT RENDAH		

Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja : -

Faktor Penghambat Keberhasilan Kinerja: -

Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :-

Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD tahun berikutnya :-

No	Kod s	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2019)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	
										I		II		III		IV											
				1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100			14=B+I2
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
3.8		TRANSMIGRASI			884.549.446				145.900.000		6.183.760		7.580.000		31.836.100		97.655.200		143.255.080					143.255.080			
3.8.1		Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi			884.549.446				145.900.000		6.183.760		7.580.000		31.836.100		97.655.200		143.255.080					143.255.080			
		Program Penempatan dan Pengembangan Wilayah Transmigrasi	Cakupan Penempatan Transmigran (%)	100	884.549.446	-	-	80	145.900.000	4,33	6.183.760	5,30	7.580.000	22,23	31.836.100	48,00	97.655.200	80	143.255.080	100,00	98,19	100	143.255.080	100	16,20	DISNAKERTRANS	
4.		URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG			2.037.328.127.121				289.880.808.536		41.746.742.127		64.419.456.575		69.221.820.795				269.203.881.832					304.563.916.422			
4.1		ADMINISTRASI PEMERINTAHAN			943.104.825.848				159.474.244.319		23.851.472.520		36.073.168.644		39.001.777.619				150.618.465.644					160.044.214.394			
		Sekretariat Daerah			434.516.800.872				73.971.368.819		10.055.275.432		20.172.584.881		17.874.777.229				70.743.888.831					70.170.771.581			
4.1.1		Biro Umum			158.836.571.737				27.823.214.363		5.113.096.891		9.272.417.733		6.282.621.891				27.412.455.914					27.164.650.514			
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	88.555.969.927			100	16.239.524.843	20,03	3.148.761.848	31,57	5.089.764.914	22,55	3.592.028.912	25,24	4.241.597.007	99	16.072.152.681	99,39	98,97	49,70	16.072.152.681	49,70	18,15		
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Ketersediaan dan Kelayakan Sarana Prasarana Aparatur	100	48.768.316.134			100	7.950.314.720	16,56	1.415.074.089	38,04	3.247.881.508	20,01	1.655.982.831	25,05	1.496.516.202	100	7.815.454.630	99,66	98,30	49,83	7.815.454.630	49,83	16,03		
		Program Peningkatan Disiplin Aparatur (usulan hanya 2020 dan 2023	Tingkat Disiplin Aparatur (%)		292.000.000					0	0	0	0	0	0	0	0	-	-			-	-	-	0,00		
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan Pembinaan Kapasitas Sumber Daya Aparatur (%)	100	2.904.439.196			100	520.155.000	12,68	65.586.100	15,25	78.872.800	43,09	222.023.500	28,90	151.690.100	100	518.172.500	99,92	99,62	49,96	518.172.500	49,96	17,84		
		Program Peningkatan Pengembangan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Nilai LKJIP OPD	95	958.305.563			90	420.366.000	2,53	16.296.000	38,76	156.916.000	0,00	122.428.400	58,70	123.395.000	100	419.035.400	111,10	99,68	50,00	171.230.000	52,63	17,87		
		Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Manajemen Aset (Dokumen)	10	2.131.904.592			100	371.540.000	0	9.620.000	92,84	259.539.492	2,28	83.272.596	4,22	14.624.000	99	367.056.088	99,34	98,79	49,67	367.056.088				
		Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah	Cakupan pelayanan kedinasan KDH/WKDH (%)	100	13.225.636.325			100	2.321.313.800	20,69	457.758.654	19,69	439.443.019	28,18	616.885.652	31,33	706.497.290	99,89	2.220.584.615	99,89	95,66	98,91	2.220.584.615				
Rata-rata capaian kinerja (%)																				101,55	98,50			33,69	11,65		
Predikat kinerja																				SANGAT TINGGI	SANGAT TINGGI			SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH		

Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja : -
Faktor Penghambat Keberhasilan Kinerja: -
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :-
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD tahun berikutnya :-

4.1.2	Biro Organisasi				13.193.896.726				1.945.335.500		656.238.333		687.238.248		286.443.479		283.994.506		1.913.912.566					1.913.912.566			
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	persentase administrasi perkantoran yang terlaksana (%)	100		1.937.576.099	-	-	100	347.088.500	100	152.737.873	100	54.782.757	100	68.038.000	100	64238278	100.00	339.796.908	100.00	97.90	100.00	339.796.908	100.00	17.54		
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	persentase sarana prasarana aparatur yang terpelihara (%)	100		1.114.206.576	-	-	100	219.592.000	100	101.571.343	100	48.260.732	100	15.728.850	100	53914913	100.00	219.475.838	100.00	99.95	100.00	219.475.838	100.00	19.70		
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya aparatur	Cakupa Pembinaan Kapasitas Sumber Daya Aparatur (%)	100		112.323.740	-	-	100	20.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000	0.00	20.000.000	0.00	100.00	0.00	20.000.000	0.00	17.81		
	Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	persentase sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan (%)	100		486.305.634	-	-	100	82.990.000		23.762.000		-		25.025.000		32393000	0.00	81.180.000	0.00	97.82	0.00	81.180.000	0.00	16.69		
	Program Peningkatan kapasitas pengelolaan keuangan daerah	persentase laporan asset yang tersusun (%)	100		70.090.014	-	-	100	12.480.000		3.100.000		1.550.000		2.325.000		5395000	0.00	12.370.000	0.00	99.12	0.00	12.370.000	0.00	17.65		
	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Jumlah Unit Kerja Pelayanan publik yang berprestasi (Unit)	34		1.282.551.782	-	-	9	186.717.000		98.593.238		65.548.762		4.500.000		2782457	0.00	196.424.457	0.00	99.85	0.00	196.424.457	0.00	15.32		

No	Kod s	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2018)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2018)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2018 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab
										I		II		III		IV										
				1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
			Persentase Unit Kerja Pelayanan publik yang survey kepuasan masyarakat meningkat (%)	100		-	-	60												-						
		Program Evaluasi Kinerja SKPD	Persentase Perangkat Daerah yang akuntabel (%)	100	336.200.119	-	-	75	59.412.700	20	8.276.400	40	22.785.600	60	2.000.000	75	21492700	75,00	54.554.700	100,00	91,82	75,00	54.554.700	75,00	16,23	
		Program pengembangan sistem analisis formasi jabatan dan pendayagunaan aparatur	persentase dokumen pendayagunaan aparatur yang tersusun (%)	100	1.684.856.107	-	-	90	295.200.000	30	121.809.200	60	103.665.495	80	40.250.551	90	27242484	90,00	292.967.730	100,00	99,24	90,00	292.967.730	90,00	17,39	
		Program Peningkatan Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi	persentase laporan kinerja pemerintah yang bernilai A / BB (%)	100	2.328.397.592	-	-	50	219.470.300	20	14.185.300	30	179.964.897	40	14.900.000	50	28000000	50,00	211.850.197	100,00	96,53	50,00	211.850.197	50,00	9,10	
		Program Penataan Daerah Otonomi Baru	Persentase perangkat daerah / UPTD/UPTB yang	100	2.232.396.014	-	-	85	383.900.000	20	117.736.379	40	167.821.355	60	66.870.688	85	24512343	85,00	376.940.765	100,00	98,19	85,00	376.940.765	85,00	16,89	
		Program Reformasi Ketatalaksanaan	Persentase perangkat daerah yang menerapkan SOP secara baik (%)	100	345.957.121	-	-	80	61.600.000		-	20	18.186.250	40	31.269.990	80	1201181	80,00	61.467.421	100,00	99,76	80,00	61.467.421	80,00	17,77	
		Program Peningkatan Budaya Kerja	Persentase perangkat daerah yang menerapkan budaya kerja baik (%)	100	263.314.929	-	-	70	46.885.000	20	9.464.600	40	19.672.400	60	10.535.400	70	7212160	70,00	46.884.550	100,00	100,00	70,00	46.884.550	70,00	17,81	
		Program Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur	persentase dokumen pengembangan SDA yang tersusun (%)	100	739.721.000	-	-	-	-											-						
		Program Pengelolaan Kelembagaan IT Pelayanan Publik	Persentase Aduan Masyarakat yang ditindaklanjuti (%)	100	100.000.000	-	-	-	-											-						
		Program Pemenuhan Kepatuhan Pelayanan Publik	Nilai Kepatuhan Pelayanan Publik	80	60.000.000	-	-	75	-											-						
		Program Pengembangan Inovasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik yang terekspikasi (Inovasi)	12	100.000.000	-	-	2	-											-						
Rata-rata capaian kinerja (%)																				66,67	98,35			0,00	3,32	
Predikat kinerja																				SEDANG	SANGAT TINGGI			SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH	

Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja : -
Faktor Penghambat Keberhasilan Kinerja: -
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :-
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD tahun berikutnya :-

4.1.3	Biro Hukum			14.570.577.519				2.523.091.000		358.175.865		887.545.188		529.967.219		783.131.330		2.358.819.602				2.358.799.602			
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	2.983.324.068	-	-	100	527.928.956	101	95.392.167	92	148.369.377	59	183.080.808	100	94.364.833	100	521.207.185	100,00	98,73	100	521.187.185	100,00	17,47	
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Ketersediaan dan Kelayakan Sarana Prasarana Aparatur	100	1.002.551.078	-	-	100	174.912.000	66	29.72.500	67	29.341.211	100	65.606.992	100	36.805.625	100	161.466.328	100,00	92,31	100	161.466.328	100,00	16,11	
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Cakupan Penyelenggaraan sistem akuntabilitas kinerja DPD (%)	100	421.214.027	-	-	100	75.000.000	67	30.000.000	-	67	30.000.000	20	15.000.000	154	75.000.000	154,00	100,00	100	75.000.000	100,00	17,81		
	Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Meningkatnya Kualitas Penatausahaan Barang Milik Daerah (%)	100	72.448.810	-	-	100	12.900.000	25	2.325.000	25	3.050.000	25	2.150.000	25	3.225.000	100	10.750.000	100,00	83,33	100	10.750.000	100,00	14,84	
	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	Persentase Produk Hukum Daerah yang terbentuk (Dokumen)	5100	6.558.857.460	0	-	100	1.118.100.000	50	141.740.198,00	70	400.585.800,00	100	195.941.819,00	144,05	339.070.170,00	144,05	1.077.337.987	144,05	96,35	1612	1.077.337.987	31,61	16,43	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2019)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab
										I		II		III		IV										
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100		14=B+12		15=14/5x100		16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Program Bantuan Hukum dan HAM	Persentase penanganan kasus-kasus hukum (%)	100	3.532.182.076	0	-	100	614.250.044	70	59.006.000.00	72	106.198.800.00	74	53.187.600.00	95	294.665.702.00	311,25	513.058.102	311,25	83,53	286	513.058.102	286,25	14,53	
Rata-rata capaian kinerja (%)																				151,55	92,38			119,64	16,20	
Predikat kinerja																				SANGAT TINGGI	SANGAT TINGGI			SANGAT TINGGI	SANGAT RENDAH	

Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja : Tertibnya administrasi dan keuangan.
Faktor Penghambat Keberhasilan Kinerja: Tidak tertibnya administrasi dan perencanaan keuangan.
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : Menata administrasi dan keuangan sesuai rencana
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD tahun berikutnya : Perlunya ketelitian dan rencana kerja yang matang.

No	Kod a	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2019)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		Parangkat Daerah Penanggungjawab					
										I		II		III		IV															
										1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=12/7x100	14=8+12	15=14/5x100							
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	16							
4.1.4		Biro Pemerintahan			16.448.041.250				2.928.862.800		254.960.985				719.794.182		787.328.546				917.408.340			2.879.482.013	99,48	98,97		2.879.850.213	82,22	13,29	
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	cakupan pelayanan administrasi perkantoran (%)	100	3.271.653.000	-	-	100	592.539.930	100	102.126.014	100	107.178.246	100	192.351.754	100	177.972.139	100	579.628.153	100,00	97,82	100	579.628.153	100,00	17,72						
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	cakupan ketersediaan dan kelayakan sarana prasarana aparatur	100	325.739.000	-	-	100	32.500.000	100	9.740.000	100	8.020.000	100	5.050.000	100	9.598.000	100	32.408.000	100,00	99,72	100	32.408.000	100,00	9,95						
		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat pelaporan capaian kinerja dan keuangan (%)	100	788.513.000	-	-	100	114.650.000	25	28.000.000	25	14.000.000	25	32.400.000	25	40.250.000	100	114.650.000	100,00	100,00	100	114.650.000	100,00	14,54						
		Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Manajemen aset (Dokumen)	15	62.340.000	-	-	3	11.100.000	-	-	1	2.700.000	1	2.980.000	1	5.420.000	3	11.100.000	100,00	100,00	3	11.100.000	20,00	17,81						
		Program Peningkatan Kualitas Kinerja Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan/Desa	Tingkat meningkatnya kualitas kinerja kecamatan dan kelurahan (%)	100	406.421.000	-	-	100	72.366.000	-	-	-	-	100	69.698.000	-	1.531.300	100	71.229.300	100,00	98,43	100	71.229.300	100,00	17,53						
		Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah	cakupan fasilitasi kerjasama antar pemerintah daerah (%)	100	1.325.420.000	-	-	100	26.000.000	-	-	-	-	98,43	25.541.800	-		98,43	25.541.800	98,43	98,24	100	26.000.000	100,00	1,96						
		Program Penataan Daerah Otonomi Baru	Daerah Otonomi yang ditata (Kab/Kota)	50	7.118.892.000	-	-	10	1.101.665.790	-	60.293.200	4	335.810.620	4	202.996.180	2	477.836.611	10	1.076.936.611	100,00	97,76	10	1.076.936.611	20,00	15,13						
		Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan	Rangking LPPD (%)	100	3.150.063.000	-	-	100	560.890.000	30	54.201.751	40	224.525.296	60	170.310.812	97,76	109.890.716	97,76	558.928.575	97,76	99,65	100	558.928.575	100,00	17,74						
		Program Peningkatan Tertib Administrasi Pertanahan	Cakupan konflik pertanahan yang difasilitasi (%)	100	2.870.978.000	-	-	100	210.978.200	25	600.000	50	27.560.000	70	86.000.000	99,1	94.909.574	99,10	209.069.574	99,10	99,10	100	209.069.574	100,00	7,28						
Rata-rata capaian kinerja (%)																			99,48	98,97			82,22	13,29							
Predikat kinerja																			SANGAT TINGGI	SANGAT TINGGI			TINGGI	SANGAT RENDAH							

Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja : Koordinasi dengan Kabupaten/Kota dan Pusat

Faktor Penghambat Keberhasilan Kinerja: -

Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :-

Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD tahun berikutnya :-

4.1.5		Biro Perekonomian			11.335.230.825				1.802.834.500		258.223.793				398.829.393				481.483.154				537.980.421				1.886.526.781				1.886.075.781					
		Program Pelyenan Adinistrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	1.307.948.210	-	-	100	202.089.500	20	39.047.880	40	37.937.190	60,00	82.960.460	100,00	39.710.243	100	199.655.773	100,00	98.80	100	199.655.773	100,00	15,26	Biro Ekonomi										
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan ketersediaan dan kelayakan sarana dan prasarana Aparatur	100	466.878.550	-	-	100	83.350.000	20	17.979.790	40	19.879.003	60,00	16.899.460	100,00	24.436.610	100	79.194.863	100,00	95.01	100	79.194.863	100,00	16,96	Biro Ekonomi										
		Program Peningkatan Pengembangan Sistim pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan(100)	100	420.571.480	-	-	100	71.630.000	20	25.070.000	40	1.600.000	60,00	800.000	100,00	41.240.000	100	68.710.000	100,00	95.92	100	68.710.000	100	16,34	Biro Ekonomi										
		Program Peningkatan Sumberdaya Manusia		-					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		-	-	-											
		Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Manajemen Aset (100)	100	56.300.588	-	-	100	10.051.000	20	1.600.000	40	1.600.000	60,00	3.200.000	100	3.651.000	100	10.051.000	100,00	100,00	100	9.600.000	100	17,05	Biro Ekonomi										
		Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Meningkatnya efektivitas dan efesiensi pengelolaan keuangan daerah	100	2.217.467.828	-	-	100	304.369.000	20	10.224.000	40	100.471.300	60,00	82.530.934	99,09	90.822.362	99,09	284.048.596	99,09	93,32	100	284.048.596	100	12,81	Biro Ekonomi										
		Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur dan Pengawasan	MeningkatnyaKesehatan Perusahaan Daerah dan BUMD	100	1.104.955.269	-	-	100	195.460.000	20	12.568.834	40	15.659.300	60,00	25.228.900	100,00	82.239.926	100	135.696.960	100,00	69.42	100	135.696.960	100	12,28	Biro Ekonomi										
		Program Peningkatan dan Pengembangan Produksi Daerah	Tersedianya Rumusan Kebijakan hasil Koordinasi Monitoring dan Evaluasi Produksi Daerah	100	3.818.032.000	-	-	100	664.000.000	20	111.702.500	40	152.081.600	60,00	186.104.000	100,00	188.832.880	100	638.720.980	100,00	96.19	100	638.720.980	100	0,17	Biro Ekonomi										

No	Kod s	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2018)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2018)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2018 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab
										I		II		III		IV										
										1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Program Peningkatan Sumberdaya Aparatur	Persentase Peningkatan IPTEK Aparatur (%)	100	221.582.000	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	Biro Kesra
		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tercapainya pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan (Dokumen)	4	585.248.000	-	-	4	107.378.000		27.927.500,00		19.798.500,00	-	-	4,00	57.052.000,00	4,00	104.778.000	100,00	97,58	100,00	104.778.000,00	#####	17,90	Biro Kesra
		Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Manajemen Aset (Dokumen)	1	80.000.000	-	-	1	14.678.000	-	3.115.000,00	-	4.169.000,00	-	3.675.000	1,00	3.369.000,00	1,00	14.328.000	100,00	97,62	100,00	14.328.000,00	#####	17,91	Biro Kesra
		Program Peningkatan Pelayanan Keagamaan	Persentase Pelaksanaan kegiatan Keagamaan (%)	100	34.698.487.500	-	-	100	7.081.801.910	7,08	430.265.750,00	18,27	1.223.378.500	34,08	2.342.323.450	39,95	2.654.473.250,00	99,38	6.650.440.950	99,38	93,91	99,38	6.650.440.950,00	99,38	19,17	Biro Kesra
		Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Persentase penanganan penyakit menular dan penyakit tidak menular (%)	100	924.219.500	-	-	100	172.129.700	0,28	480.000,00	14,50	24.960.000	36,72	63.209.200	48,50	81.987.500,00	100,00	170.636.700	100,00	99,13	100,00	170.636.700,00	100,00	18,46	Biro Kesra
		Program Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan	Prosentase Sekolah yang bisa mengikuti ISS (%)	100	738.606.000	-	-	100	345.740.000	8,95	30.931.150,00	4,03	13.916.500	36,52	126.257.000	50,51	151.574.400,00	100,00	322.679.050	100,00	93,33	100,00	322.679.050,00	100,00	43,69	Biro Kesra
		Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas anak dan Perempuan.	Persentase OPD yang mengintegrasikan PPRG (%)	100	563.138.000	-	-	100	104.870.000	-	-	7,31	7.670.000	2,77	2.910.000	89,91	85.399.500,00	100,00	95.979.500	100,00	91,52	100,00	95.979.500,00	100,00	17,04	Biro Kesra
		Program Pengendalian Penduduk dan KB.	Rasio Akseptor KB dan Penduduk (%)	75	379.854.000	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	Biro Kesra

No	Kod a	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2018)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2018)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2018 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab
										I		II		III		IV										
				1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Program Peningkatan Peranserta Kepemudaan	Persentase keikutsertaan Pemuda berprestasi	100	1.653.671.000	-	-	100	311.150.000	3,01	9.360.000,00	20,00	8.750.000	16,85	33.770.000	176,84	220.608.100,00	216,70	272.488.100	216,70	87,57	100,00	272.488.100,00	100,00	16,48	Biro Kesra
		Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	Cakupan Koordinasi TKI informal yang mendapat penanganan (%)	100	149.884.000	-	-	100	27.500.000	-	-	11,17	1.696.000	51,36	10.000.000	17,47	2.314.500,00	80,00	14.010.500	80,00	50,95	80,00	14.010.500,00	80,00	9,35	Biro Kesra
		Program Peningkatan Iman dan Ta'qwa (IMTAQ)	Persentase ASN yang mengikuti IMTAQ (%)	100	868.810.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Program Peningkatan Penanggulangan Narkoba, Penyakit Menular Seksual (PMS) termasuk HIV/AIDS.	Persentase Siswa yang tidak menggunakan Narkoba, HIV/AIDS dan PMS (%)	100	2.682.971.000	-	-	100	500.000.000	3,31	11.800.000,00	28,37	111.845.600	13,61	38.037.900	49,71	215.364.000,00	95,00	377.047.500	95,00	75,41	95,00	377.047.500,00	95,00	14,05	Biro Kesra
		Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat	Cakupan Koordinasi Rumpun Kesra (Kali)	100	1.963.504.000	-	-	1	375.740.000	-	322.679.050	-	8.750.200	-	580.000,00	1,00	11.234.500,00	1,00	343.243.750	100,00	91,35	97,50	20.564.700,00	97,50	1,05	Biro Kesra
		Program Pelayanan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Persentase Penanganan PMKS (%)	100	163.511.000	-	-	100	30.000.000	-	-	17,74	1.723.000	13,75	1.425.200	13,51	1.547.300,00	45,00	4.695.500	45,00	15,65	45,00	4.695.500,00	45,00	2,87	Biro Kesra
		Program Peningkatan Peran Perempuan di Pedesaan	Persentase PKK Desa Aktif	100	252.181.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Rata-rata capaian kinerja (%)																				102,58	82,83			1039,55	16,36	
Predikat kinerja																				SANGAT TINGGI	TINGGI			SANGAT TINGGI	SANGAT RENDAH	

Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja : Adanya kejelasan arah pembangunan kesehatan baik nasional maupun daerah sehingga, tujuan, visi dan misi, serta arah organisasi jelas

Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja : 1)beberapa kegiatan terdapat salah kode akun dan ada yang analisis kebutuhan dana pada pelaksanaan tidak sesuai dengan perencanaan awal, sehingga realisasi anggaran ditahan dahulu sampai dilakukan APBD Perubahan 2)beberapa kegiatan memang direncanakan pelaksanaannya pada trimester ke I, II,III dan IV

Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :1) Percepatan pelaksanaan kegiatan sesuai jadwal 2) Percepatan penyerapan anggaran sesuai proses kegiatan 3) percepatan proses APBD Perubahan

Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD tahun berikutnya : Analisis kebutuhan ditingkatkan, sehingga perencanaan lebih efisien dan efektif

4.1.8	Biro Humas dan Protokol			121.500.390.234				22.208.648.400		2.008.474.897		8.102.457.980		5.208.273.835		7.692.082.556		21.011.269.088				21.011.269.068			
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	11.650.015.400	-	-	100	2.606.106.296	23	264.231.896	25	532.674.137	26	722.308.258	25	1.032.417.651	99	2.551.631.942	99,00	97,91	99	2.551.631.942	99	22	Biro Humas
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Ketersediaan dan Kelayakan Sarana Prasarana Aparatur	100	6.698.855.000	-	-	100	1.550.800.000	19	64.708.000	26	1.151.628.611	23	93.787.541	26	172.106.177	95	1.482.230.329	94,67	95,58	95	1.482.230.329	95	22	Biro Humas
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan Pembinaan Kapasitas Sumber daya Aparatur (%)	100	289.040.000	-	-	100	54.800.000	23	4.800.000	26	6.050.000	26	2.200.000	24	30.475.000	99	43.525.000	99,00	79,43	99	43.525.000	99	15	Biro Humas
	(DB.) Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Tersusunnya Laporan kinerja dan Keuangan yg baik (Dokumen)	100	986.367.000	-	-	100	188.300.000	50	31.200.000	-	37.100.000	-	-	50	63.246.000	100	131.546.000	100,00	69,86	100	131.546.000	100	13	Biro Humas
	Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah	Terlaksananya Pelayanan Kegiatan Kedinasan Pimpinan Daerah (%)	100	40.555.970.000	-	-	100	7.824.838.000	17	763.205.868	28	1.826.931.080	26	1.907.932.836	28	2.494.156.555	99	6.992.226.339	99,36	89,36	99	6.992.226.339	99	17	Biro Humas
	Program Pengembangan Komunikasi Informasi dan mass media	Terlaksananya Pengembangan Komunnikasi Informasi dan Mess	100	27.801.212.534	-	-	100	4.189.711.444	6	245.065.433	20	842.554.152	12	517.365.800	58	2.446.308.173	100	4.051.293.558	96,47	96,47	96	4.051.293.558	96	15	Biro Humas
	Program Kerjasama Informasi dan Media massa	Terlaksananya kerjasama Penyebarluasan Informasi dengan Massa media (%)	100	33.404.586.600	-	-	100	5.761.553.960	11	632.972.000	29	1.699.008.000	34	1.960.508.000	25	1.447.164.000	100	5.739.652.000	99,62	99,62	100	5.739.652.000	100	17	Biro Humas
	Program peningkatan kapasitas pengelolaan keuangan daerah	Manajemen Aset (Dokumen)	5	114.343.700	-	-	1	20.537.700	-	2.231.700	-	6.512.000	-	4.171.200	1	6.189.000	1	19.163.900	100,00	93,31	1	19.163.900	20	17	Biro Humas
Rata-rata capaian kinerja (%)																			98,51	90,19			88,51	17,27	
Predikat kinerja																			SANGAT TINGGI	TINGGI			TINGGI	SANGAT RENDAH	

Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja : 1) Adanya Rasionalisasi Anggaran; 2) Banyak Kegiatan yang pelaksanaannya diakhir tahun; 3) Beberapa kegiatan yang sedang dalam proses pengerjaan; 4) Belum adanya diklat yang berkenaan dengan kehumasan yang diselenggarakan lembaga resmi pemerintah; 5) Pelaksanaan peningkatan kapasitas baru akan diadakan secara internal pada bulan November bersekala provinsi NTB yang akan mendatangkan narasumber dari

Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja :

Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :

Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD tahun berikutnya :

No	Kod s	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2018)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2018)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2018 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab
										I		II		III		IV										
										1	2	3	4	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
4.1.9		Biro Administrasi Kerjasama			22.238.105.807				1.531.000.000		38.232.250		281.572.722		224.000.829		887.529.341		1.432.334.942				1.429.734.942			
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100	2.763.453.818			100	968.246.300	4,05	39.232.250	28,68	277.726.722	21,91	212.117.484	41,51	404.525.312	98,83	933.601.768	98,83	96,42	98,83	931.001.768	98,83	33,69	
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Ketersediaan dan Kelayakan Sarana	100	4.049.178.560			100	21.750.000	0,00	-	9,89	2.150.000	44,25	9.625.145	43,51	9.464.004	100,00	21.239.149	100,00	97,65	100,00	21.239.149	100,00	0,52	
		Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Tersusunnya Laporan capaian kinerja dan Keuangan yg baik (Dokumen)	22	980.391.219			2	75.327.900	-	-	-	1.350.000	1	1.350.000	1	72.316.400	2,00	75.016.400	100,00	99,59	2,00	75.016.400	9,09	7,65	
		Program peningkatan kapasitas pengelolaan keuangan daerah	Manajemen Aset (Dokumen)	5	141.482.995			1	12.297.900	-	-	-	346.000	-	908.000	1	7.069.000	1,00	8.323.000	100,00	67,68	1,00	8.323.000	20,00	5,88	
		Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Persentase Kerjasama Pemerintahan dan Non Pemerintahan yang terjalin (%)	100	150.000.000			100	453.377.900	-	-	-	-	89,54	-	150,00	394.154.625	150	394.154.625	150,00	86,94	99,56	394.154.625	99,56	262,77	
		Program Peningkatan Kerjasama Pemerintahan	Persentase Kerjasama Pemerintahan yang terjalin (%)	100	3.956.366.336			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Program Peningkatan Kerjasama Non Pemerintahan	Persentase Kerjasama Non Pemerintahan yang terjalin (%)	100	4.001.427.456			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Program Pengendalian Kerjasama Daerah	Persentase Kerjasama Daerah yang terevaluasi (%)	100	6.196.805.222			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Rata-rata capaian kinerja (%)																				109,77	89,66			65,50	62,10	
Predikat kinerja																				SANGAT TINGGI	TINGGI			RENDAH	RENDAH	

Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja :
Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja :
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD tahun berikutnya :

		Dewan Perwakilan rakyat Daerah			470.655.493.615				78.748.714.500		12.943.809.695		14.766.381.186		18.526.047.693		27.117.600.128		73.353.838.702				73.353.838.702			
4.1.10		Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah			470.655.493.615				78.748.714.500		12.943.809.695		14.766.381.186		18.526.047.693		27.117.600.128		73.353.838.702				73.353.838.702			
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	46.443.515.184			100	7.877.689.300	100,00	899.629.637	100	2.099.866.618	100	1.628.301.697	100	2.523.224.674	100	7.151.022.626	100,00	90,78	100,00	7.151.022.626	100	15,40	
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Ketersediaan dan Kelayakan Sarana dan Prasarana Aparatur	100	39.167.776.799			100	6.346.864.000	100,00	53.369.142	100	396.829.662	100	918.285.044	100	3.653.983.986	100	5.022.467.234	100,00	79,13	100,00	5.022.467.234	100	12,82	
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan Pembinaan Kapasitas Sumberdaya Aparatur (%)	100	1.978.383.876			100	352.264.600	100,00	4.687.500	100	16.559.000	100	35.513.000	100	258.698.500	100	315.458.000	100,00	89,55	100,00	315.458.000	100	15,95	
		Program Peningkatan Disiplin Aparatur (usulan hanya 2020 dan 2023)			447.930.000	-	-		-				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Cakupan Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja DPD (%)	100	1.781.697.704			100	317.243.300	100,00	3.600.000	100	150.800.000	100	6.000.000	100	137.600.000	100	298.000.000	100,00	93,93	100,00	298.000.000	100	16,73	
		Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Meningkatnya Kualitas Penatausahaan Barang Milik Daerah (%)	100	197.341.573			100	35.138.000	100,00	5.025.000	100	5.753.000	100	6.145.000	100	11.658.000	100	28.581.000	100,00	81,34	100,00	28.581.000	100	14,48	

No	Kod a	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2019)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab
										I		II		III		IV										
				1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	16
			Cakupan Perda yang diinisiasi DPRD (%)	41,09	380.638.848.473			37,50	63.819.515.300		11.977.498.416		12.096.573.506		15.931.802.952	21,43	20.532.434.968	21,43	60.538.309.842	57,14	94,86	21,43	60.538.309.842	52,14	15,90	
		Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	Cakupan Rekomendasi DPRD kepada Eksekutif yang ditindaklanjuti (%)	88,00				80,00								0,00		0,00								
Rata-rata capaian kinerja (%)																			92,86	88,27			78,88	13,04		
Predikat kinerja																			SANGAT TINGGI	TINGGI			TINGGI	SANGAT RENDAH		

Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja : Konsistensi Anggota DPRD terhadap jadwal yang telah dibuat.
Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja : Sering terjadi perubahan jadwal kegiatan DPRD, dan kurang cermatnya pelaksana kegiatan dalam mengikuti jadwal penarikan kas.
Tindak Lanjut yang Diperlukan dalam Triwulan berikutnya : Memperhatikan kembali jadwal penarikan kas, dan disesuaikan dengan jadwal kegiatan DPRD
Tindak Lanjut yang Diperlukan dalam Renja SKPD tahun berikutnya : Menyusun perencanaan yang efisien dan efektif untuk mendukung fungsi pelayanan terhadap Anggota DPRD

4.1.11		Badan Penghubung Daerah			37.932.631.360				8.754.161.000		852.387.393		1.134.222.577		2.600.952.897		1.933.195.444		6.520.758.111	97,51	12,83		6.519.604.111	85,71	15,79		
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	18.809.761.920	0	100	3.682.811.000	19,23	644.798.035	23,04	780.743.178	23	781.139.972	32	1.375.914.090	97,32	3.582.595.275	97,32	97,28	97,32	3.582.641.275	97,32	19,05			
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Ketersediaan dan Kelayakan Sarana dan Prasarana Aparatur	100	14.817.620.669	0	100	2.477.850.000	5,60	147.889.358	6,95	183.453.400	65	1.703.162.725	20	185.322.353	97,08	2.219.827.836	97,08	89,59	97,08	2.218.627.836	97,08	14,97			
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan Pembinaan Kapasitas Sumberdaya Aparatur (%)	100	50.319.082	0	100	9.000.000	-	-	50,00	4.500.000	25	2.250.000	25	2.250.000	100,00	9.000.000	100,00	100,00	100,00	9.000.000	100,00	17,89			
		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Cakupan Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja UPD (%)	100	638.994.770	0	100	133.800.000	20,39	23.200.000	4,63	6.200.000	17	22.200.000	54	76.265.000	95,62	127.865.000	95,62	95,56	95,62	127.865.000	95,62	20,01			
		Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Meningkatnya Kualitas Penatausahaan Barang Milik Daerah (%)	100	103.500.000	0	100	20.700.000	25,60	5.300.000	28,02	5.800.000	46	6.300.000		3.300.000	99,62	20.700.000	99,62	100,00	99,62	20.700.000	99,62	20,00			
		Program Peningkatan Pelayanan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Keala Daerah		100	550.385.200	0	100	110.000.000	31,84	31.200.000	44,08	43.200.000	17	27.400.000		1.080.000	92,92	102.880.000	92,92	93,53	92,92	102.880.000	92,92	18,69			
		Program Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara	Jumlah kunjungan wisatawan pada Anjungan Daerah NTB di Jakarta (.....)	35.000	2.920.416.900	0	67.488	520.000.000	6.680	-	7.924	110.325.999	9.215	58.500.000	43.669	289.064.001	67.488	457.890.000	100,00	88,06	36,083	457.890.000	103,09	15,68			
Rata-rata capaian kinerja (%)																				97,51	84,61				85,71	15,79	
Predikat kinerja																				SANGAT TINGGI	TINGGI				TINGGI	SANGAT RENDAH	

Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja : -
Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja : -
Tindak Lanjut yang Diperlukan dalam Triwulan berikutnya : -
Tindak Lanjut yang Diperlukan dalam Renja SKPD tahun berikutnya : -

No	Kod s	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2018)	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2018)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2018 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab		
								I		II		III		IV												
								1	2	3	4	5		6		7		8		9		10			11	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
4.2		PENGAWASAN			80.948.790.910				14.413.478.500		1.182.078.788		4.072.005.834		3.140.814.724		5.387.387.875		13.782.298.101	102,48	93,96		13.732.741.351	122,66	221,30	
4.2.1		Inspektoret			80.948.790.910				14.313.478.500		1.182.078.788		4.072.005.834		3.140.814.724		5.387.387.875		13.782.298.101	102,48	93,96		13.732.741.351	122,66	221,30	
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Tingkat Kepuasan Pelayanan (%)	80	12.794.865.786	-	-	60	2.494.376.200	58	262.567.003	60	714.020.066	60	378.220.488	60	1.041.807.539	60	2.396.615.096	99,17	96,08	60	2.380.812.296	74	19	INSP
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Tingkat Kepuasan Pelayanan (%)	80	5.933.616.048	-	-	60	1.275.572.380	58	22.550.000	60	139.183.800	60	249.662.500	58	801.722.500	59	1.213.118.800	98,33	95,10	59	1.166.511.050	74	20	INSP
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Tingkat Kepuasan Pelayanan (%)	80	15.741.790.325	-	-	60	2.697.182.000	58	610.590.000	60	668.352.500	60	659.245.000	60	718.495.000	60	2.656.682.500	99,17	98,50	60	2.656.682.500	74	17	INSP
		Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase Tingkat Kepuasan Pelayanan (%)	80	1.373.298.130	-	-	60	223.053.000	60	51.200.000	60	91.286.569	-	-	60	77.815.000	60	220.301.569	100,00	98,77	60	220.301.569	75	16	INSP
		Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Tingkat Kepuasan Pelayanan (%)	80	207.394.554	0	-	60	39.941.500	60,00	4.800.000	60	7.169.000	0	-	60	25.598.200	90	37.567.200	150,00	94,06	90	37.567.200	113	18	INSP
		Program Peningkatan Sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kepala daerah	- Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan (%)	90	21.563.397.925	0	-	70	3.795.256.620	0	167.986.420	0	893.235.311	0	989.383.712	33,94	1.623.328.643	33,94	3.673.934.086	48,49	96,80	34	3.673.934.086	38	17	INSP
			- Persentase Penurunan Angka Kerugian Negara/Daerah (-)	48,89		0	32,17	0		0	0	0	2,17		2,17	-	6,75		2,17		4					
		Program Penguatan Akuntabilitas Kinerja	Persentase Hasil Evaluasi SAKIP PD Predikat BB-AA (%)	100	3.466.513.375	-	-	71,73	592.336.100	-	22.980.000	93,48	183.720.000	-	59.960.000	-	298.955.322	93,48	565.615.322	130,32	95,49	93	565.615.322	93	16	INSP
		Program Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah di Lingkungan Provinsi NTB	Persentase Peningkatan Level Maturitas DPD terdefinisi-terkelola dan terukur (%)	100	618.560.100	-	-	37,77	110.138.800	-	-	-	-	-	40.300.000	60,87	54.625.200	60,87	94.925.200	161,16	86,19	60,87	94.925.200	61	15	INSP
			Nilai Telaahan	90		-	-	70		-	-	-	-	157.550.706	-	100.684.100	82,49	117.856.977	82,49	376.091.783	117,84	81,04	82,49	376.091.783	92	15
		Program Peningkatan Kapabilitas APIP	Persentase Auditor dan P2UPD bersertifikasi	63		-	55			-	-	-	-	55		55	-	100,00		55		87			INSP	
		Program Pencegahan Korupsi	Persentase Penyelesaian Pengaduan Masyarakat tepat waktu (%)	97	16.705.218	-	-	60	2.621.521.300	71	49.406.345	71	1.217.487.682	71	663.358.924	70,96	627.193.594	2.557.446.545	118,27	97,56	70,96	2.560.300.345	73	15.326	INSP	
			Persentase PD Zona Integritas berpredikat WBK (%)	26,66		-	-	8,88		-		-		-												
			Pesentase PD Zona Integritas berpredikat WBBM (%)																							
Rata-rata capaian kinerja (%)																			102,46	93,96			122,66	221,30		
Predikat kinerja																			SANGAT TINGGI	SANGAT TINGGI			SANGAT TINGGI	SANGAT TINGGI		
Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja : 1. Pengembangan SDM, 2. Profesionalisme SDM, 3. Ketersediaan Anggaran, 4. Ketepatan Waktu Dalam Pelaksanaan Kegiatan Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja : 1. Keterbatasan Anggaran, 2. Kurangnya Jumlah SDM pada Jabatan fungsional Auditor dan P2UPD, 3. Infrastruktur yang belum memadai Tindak lanjut yang Diperlukan dalam Triwulan berikutnya : 1. Percepatan Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan, 2. Mendorong Pengembangan, Peningkatan dan Profesionalisme SDM Tindak Lanjut yang Diperlukan dalam Renja SKPD tahun berikutnya : 1. Penambahan Anggaran Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan, 2. Penyusunan Rencana Pengembangan, Peningkatan dan Profesionalisme SDM, 3. Penambahan Sarana dan Prasarana Pendukung Pengawasan																										
4.3		PERENCANAAN			164.784.203.751				28.563.363.300		2.550.438.828		5.685.947.164		6.343.234.637		9.342.667.359		23.902.288.986				23.902.288.986			
4.3.1		Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah			164.784.203.751				28.563.363.300		2.550.438.828		5.685.947.164		6.343.234.637		9.342.667.359		23.902.288.986				23.902.288.986			
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Porsentase Penyelesaian Jenis Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	45.813.001.336	-	100	6.919.409.195	20	945.246.731	47	1.421.899.990	25	2.117.215.905	8	2.121.723.832	100,00	6.606.086.458	100,00	95,47	100,00	6.606.086.458	100,00	14,42	Bappeda	

No	Kod s	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2019)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	
										I		II		III		IV											
				1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100			14=8+12
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Ketersediaan Perlengkapan Gedung Kantor (%)	100	8.513.489.100			-	100	1.630.439.100	20	554.831.461	37	659.778.856	30	94.637.394	13	286.176.068	100.00	1.595.423.779	100.00	97.85	100.00	1.595.423.779	100.00	18.74	Bappeda
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase ASN yang meningkat kapasitasnya (%)	100	165.008.093			-	100	29.500.000	20	2.200.000	33	2.850.000	30	7.350.000	17	7.400.000	99.82	19.800.000	99.82	67.12	499.82	19.800.000	99.82	12.00	Bappeda
		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Penyelesaian Dokumen Program/Pelaporan	100	433.103.730			-	100	78.722.000	20	36.750.000	45	9.050.000	25	10.593.500	10	21.374.000	99.74	77.767.500	99.74	98.79	99.74	77.767.500	99.74	17.96	Bappeda
		Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Penyelesaian Dokumen Aset/Barang Milik	100	564.752.535		-	-	100	100.558.000	20	1.600.000	50	43.100.000	20	29.750.000	10	24.471.000	100.32	98.921.000	100.32	98.37	100.32	98.921.000	100.32	17.52	Bappeda
		Program Pengembangan Data/Informasi	Cakupan data/informasi pembangunan tersedia (%)	100	4.499.055.784		-	-	100	662.820.700	20	29.567.100	37	203.385.713	30	132.719.218	13	206.313.480	100.21	571.985.511	100.21	86.30	100.21	571.985.511	100.21	12.71	Bappeda
		Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase keselarasan Program pada RKPD dengan RPJMD (%)	100	21.996.958.406			-	100	5.486.696.705	20	362.522.853	38	1.261.689.113	30	1.357.934.106	6.74	2.148.388.350	95.09	5.130.534.422	95.09	93.51	100.35	5.130.534.422	100.35	23.32	Bappeda
		Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	Persentase keselarasan Program pada RKPD dengan Renja OPD bidang ekonomi (%)	100	14.150.844.213		-	-	100	1.660.408.200	20	88.449.800	17	311.591.391	35	382.912.304	25.14	690.935.928	97.26	1.473.889.423	97.26	88.77	100.12	1.473.889.423	100.12	10.42	Bappeda
		Program Perencanaan Sosial dan Budaya	Persentase keselarasan Program pada RKPD dengan Renja OPD bidang sosial budaya (%)	100	19.835.411.783		-	-	100	2.536.255.700	20	112.797.300	7	515.511.850	30	604.495.251	39.26	621.237.433	96.05	1.854.041.834	96.05	73.10	99.79	1.854.041.834	99.79	9.35	Bappeda
		Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam	Persentase keselarasan Program pada RKPD dengan Renja OPD bidang prasarana wilayah dan sumber daya	100	42.577.492.171		-	-	100	6.862.641.600	20	377.264.981	27	1.095.212.615	30	1.471.497.367	15.13	2.989.059.461	92.00	5.933.034.424	92.00	86.45	99.87	5.933.034.424	99.87	13.93	Bappeda
		Program Perencanaan Tata Ruang	Persentase Keselarasan Program Perencanaan Wilayah	100	1.027.606.600		-	-	100	595.912.100	20	39.209.600	27	141.877.636	35	134.129.592	18.00	225.587.807	99.87	540.804.635	99.87	90.75	99.87	540.804.635	99.87	52.63	Bappeda
		Program Perencanaan Wilayah	Persentase Keselarasan Program Perencanaan Wilayah	80	5.207.480.000		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Rata-rata capaian kinerja (%)																				98.22	88.77			100.01	18.45		
Predikat kinerja																				SANGAT TINGGI	TINGGI			SANGAT TINGGI	SANGAT RENDAH		

Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja : -
Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja : -
Tindak Lanjut yang Diperlukan dalam Triwulan berikutnya : -
Tindak Lanjut yang Diperlukan dalam Renja SKPD tahun berikutnya : -

4.4	KEUANGAN			684.485.891.400			57.808.958.576		11.828.308.421		15.371.940.564		13.851.485.680		12.280.052.875		53.111.768.518					89.108.311.108			
4.4.1	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Selaku SKPD			345.256.331.785			37.968.772.482		7.310.306.979		11.053.938.122		9.533.463.218		7.942.050.433		35.839.758.752					40.958.930.254			
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kelancaran pelayanan administrasi perkantoran (%)	100	49.462.839.944	-	-	100	4.183.259.917	100	865.101.089	100	1.151.381.971	100	1.094.314.662	-	414.031.132	100	3.524.828.854	100,00	84,26	100	4.621.914.860	100	9	
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat kelancaran tugas aparatur (%)	100	63.664.025.943	-	-	100	2.951.710.000	100	139.423.143	100	1.016.068.296	100	645.129.830	-	704.086.935	100	2.504.718.204	100,00	84,86	100	2.875.100.204	100	4,52	
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Tingkat kompetensi aparatur (%)	100	1.933.934.001	-	-	100	114.350.000	100	8.325.000	100	23.175.000	100	7.150.000	-	53.781.800	100	92.431.800	100,00	80,83	100	125.461.441	100	6	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2019)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab
										I		II		III		IV										
										1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=12/7x100	14=6+12	15=14/5x100	16	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Rencana program (Dokumen)	6	5.655.795.744	-	-	6	663.724.600	1	349.798.800	1	98.453.000	4	285.518.000	-	(119.184.200)	6	614.575.600	100,00	92,59	6	848.185.100	100	15	
		Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Manajemen Aset (Dokumen)	1	555.874.466	-	-	1	98.977.200	-	7.968.800	1	10.452.200	-	30.562.000	-	47.754.169	1	96.737.169	100,00	97,74	1	96.737.169	100	17	
		Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Ketepatan waktu penetapan APBD Prov. NTB (Waktu)	Tepat Waktu	185.513.874.499	-	-	Tepat Waktu	28.499.148.775	Tepat Waktu	5.810.746.047	Tepat Waktu	8.575.378.355	Tepat Waktu	7.097.336.498	-	6.225.520.922	Tepat Waktu	27.708.981.822	100,00	97,23	Tepat Waktu	31.094.046.177	100	17	
			Opini laporan keuangan Prov. NTB (Jenis)	WTP				WTP		WTP		WTP		WTP			WTP	-	100,00		WTP		100			

No	Kod a	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2019)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab
										I		II		III		IV										
										8		9		10		11										
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100		14=8+12		15=14/5x100		16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Program Pembinaan Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota	Ketepatan waktu penetapan Perda APBD Kab./Kota (Waktu)	Tepat Waktu	9.343.998.554	-	-	Tepat Waktu	1.457.602.000	Tepat Waktu	128.954.100	Tepat Waktu	179.029.300		373.452.228	-	616.049.675	Tepat Waktu	1.297.485.303	100.00	89.02	Tepat Waktu	1.297.485.303	100	14	
		Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Aset Daerah	Kontribusi retribusi aset terhadap PAD (%)	PAD Meningkat	29.125.988.634	-	-	PAD Meningkat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Rata-rata capaian kinerja (%)																			100.00	89.50			100.00	11.91		
Predikat kinerja																			SANGAT TINGGI	TINGGI			SANGAT TINGGI	SANGAT RENDAH		

Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja : Komitmen pimpinan untuk meningkatkan kinerja perangkat daerah
Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja : Tingkat koordinasi yang belum optimal
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :Konsolidasi internal dan peningkatan koordinasi antar stakeholders
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD tahun berikutnya : Evaluasi kinerja dalam periode bulanan

4.4.2	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah			339.239.559.615				19.640.186.084		4.318.002.442		4.318.002.442		4.318.002.442		17.272.009.788				48.148.380.854					
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	88.351.370.758	-	-	16,91	5.757.043.318	5,71	1.258.060.604	15,52	1.258.060.604	91,79	1.258.060.604	5,71	1.258.060.604	15,52	5.032.242.415	91,79	87,41	15,52	13.711.791,129	15,52	15,52	Bappenda
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan ketersediaan dan kelayakan sarana dan prasarana aparatur	100	72.905.647.446,00	-	-	15,41	2.183.320.000	43,34	528.208.436	14,82	528.208.436	96,12	528.208.436	43,34	528.208.436	14,82	2.112.833.743	96,12	96,77	14,82	10.801.590.918	14,82	14,82	Bappenda
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan pembinaan kapasitas sumberdaya aparatur	100	5.030.440.058	-	-	11,91	432.712.000	32,87	87.582.828	21	87.582.828	175,58	87.582.828	32,87	87.582.828	21	350.331.313	175,58	80,96	20,92	514.532.113	20,92	10,23	Bappenda
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Cakupan penyelenggaraan Sistem akuntabilitas kinerja OPD (Dokumen)	462	5.823.202.226	-	-	93	862.539.633	34,29	197.686.188	84,34	197.686.188	90,69	197.686.188	34,29	197.686.188	84,34	790.744.750	90,69	91,68	84,34	864.100.350	18,26	14,84	Bappenda
	Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase BMD yang Tertib Administrasi (%)	80	4.131.900.528	-	-	14,20	362.545.000	3,84	85.624.478	13	85.624.478	92,18	85.624.478	3,84	85.624.478	13	342.497.912	92,18	94,47	13,09	433.032.129	16,36	10,48	Bappenda
	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah (Diluar DAK) (%)	56,52	162.996.998.599	-	-	47,19	10.042.026.133	49,88	2.160.839.908	49,88	2.160.839.908	109,49	2.160.839.908	49,88	2.160.839.908	49,88	8.643.359.633	105,71	86,07	49,88	21.824.334.215	0,88	13,39	Bappenda
Rata-rata capaian kinerja (%)																			108,68	89,56			14,46	13,21	
Predikat kinerja																			SANGAT TINGGI	TINGGI			SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH	

Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja : 1. Komitmen Bappenda, 2. memiliki program kerja, 3. Tersedianya Personil, 4. Tersedianya Dana, 5. Adanya UU 23 Tahun 2014, UU 34 Tahun 2001, dan kemauan Politik Pemda Untuk Peningkatan PAD.
Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja : 1.Masih adanya pekerjaan fisik yang tidak tepat waktu masa penyelesaianny 2. Minimnya serapan anggaran dari pagu yang ditetapkan.
Tindak Lanjut yang Diperlukan dalam Triwulan berikutnya : efektifitas dalam penyusunan anggaran kas, dan berusaha konsisten dengan apa yang direncanakan
Tindak Lanjut yang Diperlukan dalam Renja SKPD tahun berikutnya : Optimal dalam perencanaan, maksimal dalam pengendalian sehingga angka kesalahan dapat ditekan seminim mungkin

4.5	KEPEGAWAIAN			82.756.907.281				10.532.389.000		1.552.260.898		1.282.859.174		1.963.981.807		4.794.421.150		8.573.323.029				8.573.323.029			
4.5.1	Badan Kepegawaian Daerah			82.756.907.281				10.532.389.000		1.552.260.898		1.282.859.174		1.963.981.807		4.794.421.150		8.573.323.029				8.573.323.029			
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	500	13.600.378.652	-	-	100	2.395.697.200	20	499.444.761	30	349.413.443	30	429.918.043	20	855.108.052	100,00	2.133.884.299	100,00	89,07	100,00	2.133.884.299	20,00	15,69	BKD
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Ketersediaan dan Kelayakan Sarana Prasarana Aparatur	500	16.658.613.841	-	-	100	3.203.278.000	20	275.075.058	30	169.508.305	30	547.390.128	20	2.198.718.359	100,00	3.190.691.850	100,00	99,61	100,00	3.190.691.850	20,00	19,15	BKD
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan Pembinaan Kapasitas Sumber Daya Aparatur (%)	500	194.829.456	-	-	100	34.690.700	20	5.623.500	30	750.000	30	-	20	-	100,00	6.373.500	100,00	18,37	100,00	6.373.500	20,00	3,27	BKD
	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Nilai LKJIP OPD	500	1.117.530.000	-	-	100	199.555.000	20	89.181.600	30	14.272.050	30	8.864.850	20	84.806.525	100,00	197.125.125	100,00	98,78	100,00	197.125.125	20	17,64	BKD
	Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Manajemen Aset (Dokumen)	500	128.040.000	-	-	100	23.120.000	20	4.800.000	30	5.673.750	30	5.001.250	20	7.496.000	100	22.971.000	100,00	99,36	100	22.971.000	20,00	17,94	BKD
	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Indeks Dimensi Kualifikasi Pendidikan ASN (Nilai Indeks)	500,00	49.661.786.384	-	-	100,00	4.425.732.100	100	677.085.979	100	701.740.926	100	869.211.686	100	1.561.480.789	100,00	3.809.519.380	100,00	86,08	157	3.809.519.380	31,40	7,67	BKD

No	Kod a	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2019)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab
										I		II		III		IV										
										1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=12/7x100	14=B+12	15=14/5x100		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
			Persentase Tingkat Pelanggaran Disiplin ASN (%)																							
			Kriteria Penilaian Kinerja ASN (Kriteria)																							
		Program Peningkatan Transparansi Penyelenggara	Persentase ASN yang Patuh LHKPN (.....)	500	1.395.728.928	0	0	100,00	250.316.000	20,00	1050000	30,00	21.300.700	30,00	103595750	20	8681425	100,00	212757875	100,00	85,00	100,00	212757875	20	15.2434954	BKD
Rata-rata capaian kinerja (%)																			100,00	82,32			21,63	13,80		
Predikat kinerja																			SANGAT TINGGI	TINGGI			SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH		

Faktor Pendorong keberhasilan Kinerja : Program dan Kegiatan dapat Dilaksanakan sesuai dengan Time Schedule yang telah direncanakan

Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja : Adanya Peraturan Perundang-undangan yang mengikat terkait pelaksanaan kegiatan sehingga perlu dilakukan kajian dan perumusan kegiatan lebih lanjut

Tindak Lanjut yang Diperlukan dalam Triwulan Berikut : Melakukan Reschedule terhadap Program dan Kegiatan sehingga dapat mempercepat pencapaian target kinerja dan realisasi keuangan

Tindak Lanjut yang Diperlukan dalam RKPD Berikut : Melakukan Kajian Tentang Sekala Prioritas Organisasi sehingga mampu mengoptimalkan Sumber Daya yang ada untuk mencapai Tujuan OPD

4.6	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	Indeks Pelayanan Publik		81.237.407.952				21.288.374.841		872.179.694		1.873.735.395		4.820.548.348		10.338.278.117		18.205.737.554				18.203.037.554				
4.6.1	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah			81.237.407.952				21.288.374.841		872.179.694		1.873.735.395		4.820.548.348		10.338.278.117		18.205.737.554				18.203.037.554				
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	13.942.267.000			100	3.777.160.362	20	318.997.468	20	586.858.924	30	486.716.751	30	1.882.949.950	100	3.275.523.093	100.00	86.72	100	3.275.523.093	100.00	23.49		
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Ketersediaan dan Kelayakan Sarana Prasarana Aparatur	100	16.520.309.000		-	100	2.098.395.392	25	17.743.901	25	297.330.671	25	387.682.381	25	1.107.193.144	100.00	1.809.950.097	100.00	86.25	100.00	1.809.950.097	100.00	10.96		
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan Pembinaan Kapasitas Sumber Daya Aparatur (%)	100	67.872.202		-	100	18.200.000	-	-	-	-	25	3.750.000	30	5.000.000	100	8.750.000	100.00	48.08	100	8.750.000	100.00	12.89		
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Cakupan Pegawai Yang Disiplin (%)	100	359.790.750		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-		
	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Cakupan Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja DPD (%)	100	1.638.050.000			100	370.717.000	50	116.723.750	20	42.050.000	30	66.857.250	-	95.617.125	100	321.248.125	100.00	86.66	100	321.248.125	100.00	19.61		
	Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Cakupan Pejabat Pengelola asset daerah dan PPK (%)	100	391.666.000			100	75.351.100	25	12.525.000	25	27.525.000	25	12.525.000	25	12.525.000	100	65.100.000	100.00	86.40	100	65.100.000	100	16.62		
	Program Peningkatan Mutu Sumber Daya Aparatur	Cakupan Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi ASN (%)	56.25	48.317.453.000			10.43	14.948.550.987	1.27	506.189.575	2.91	1.019.970.800	2.31	3.963.014.966	5.35	7.235.990.898	11.85	12.725.166.239	113.61	85.13	11.84	12.722.466.239	21.05	26.33		
Rata-rata capaian kinerja (%)																			102.27	79.87				86.84	18.32	
Predikat kinerja																			SANGAT TINGGI	TINGGI				TINGGI	SANGAT RENDAH	

Faktor Pendorong keberhasilan Kinerja : Adanya visi dan misi yang tepat yg dimiliki SKPD, SKPD memiliki ASN yang kreatif, inovatif dan kompeten, perencanaan anggaran yang sesuai mulai dari penyusunan RPJMD, RENSTRA, RKA sampai menjadi DPA , ketepatan waktu realisasi anggaran dengan kegiatan yang telah direncanakan

Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja : ASN yang tidak kompeten dan kurang inovasi di bidangnya, tidak sesuainya pelaksanaan anggaran dengan target yang telah disusun dalam RPJMD, RENSTRA sampai pelaksanaan program kegiatan di DPA, adanya peraturan dari pusat atau dari Gubernur terkait dengan program dan kegiatan yang harus dilaksanakan padahal anggaran tidak ada,kurangnya sarana dan prasarana pendukung kinerja

Tindak Lanjut yang Diperlukan dalam Triwulan Berikut : Melakukan evaluasi atau perbaikan terhadap data ye Melakukan evaluasi atau perbaikan terhadap data yang salah dengan melakukan konsultasi dengan dinas pendukung perencanaan dan penganggaran,melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran yang telah tersedia.

Tindak Lanjut yang Diperlukan dalam RKPD Berikut : Menyusun dokumen-dokumen perencanaan sesuai /Menyusun dokumen-dokumen perencanaan sesuai dengan kebutuhan OPD,Menyusun anggaran sesuai yang ada di RPJMD,RENSTRA dan DPA,Melakukan perbaikan atau menelash kembali data yang digunakan sebagai dasar penyusunan Renja PD.

4.7	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN			18.215.748.700				2.347.528.700		212.858.350		314.813.953		218.684.650		1.081.110.325		1.807.465.278				1.807.465.278				
4.7.1	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah			18.215.748.700				2.347.528.700		212.858.350		314.813.953		218.684.650		1.081.110.325		1.807.465.278				1.807.465.278				
	Program Penelitian dan Pengembangan	Persentase pemanfaatan hasil keltibangan (.....)	30	16.215.748.700	-	-	18	2.347.528.700	4	212.856.350	5	314.813.953	3	218.684.650	9	1.081.110.325	21	1.807.465.278	116.67	76.99	18.00	1.807.465.278	60.00	11.15	Bappeda	
Rata-rata capaian kinerja (%)																			116.67	76.99				60.00	11.15	
Predikat kinerja																			SANGAT TINGGI	TINGGI				RENDAH	SANGAT RENDAH	

Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja : -

Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja : -

Tindak Lanjut yang Diperlukan dalam Triwulan berikutnya : -

Tindak Lanjut yang Diperlukan dalam Renja SKPD tahun berikutnya :-

Disetujui,

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2019)	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2019)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)	Perangkat Daerah Penanggungjawab							
							I		II		III		IV													
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100		14=B+12		15=14/5x100		16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	

Disusun,
Mataram, Januari 2020
KEPALA BAPPEDA
PROVINSI NTB

Mataram, Januari 2020
GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

Ir. WEDHA MAGMA ARDHI, MTP

Dr. H. ZULKIEFLIMANSYAH, SE, M.Sc